

Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012

Integrasi Ekonomi ASEAN
dan Prospek Perekonomian Nasional

Januari 2008



BANK INDONESIA

**Biro Riset Ekonomi
Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter**

Outlook Ekonomi Indonesia

Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional

Januari 2008



BANK INDONESIA

Biro Riset Ekonomi

Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter

Penanggung Jawab:

Made Sukada

Tim Penyusun:

Wijoyo Santoso

Endy Dwi Tjahjono

Harmanta

Hidayah Dhini Ari

Haris Munandar

Ferry Kurniawan

Oki Hermansyah

Myrnawati Savitri

Tim penyusun mengucapkan terima kasih atas partisipasi, sumbang saran dan informasi dari beberapa pihak dalam Focus Group Discussion, yaitu: Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, BAPPENAS, IPB, LIPI, CSIS, KADIN, GAIKINDO, dan API.

Asesmen ini merupakan hasil analisis dan penelitian dari tim peneliti ekonomi di lingkungan Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM). Asesmen ini sepenuhnya merupakan pendapat dari tim dan tidak harus menjadi atau mencerminkan pendapat resmi Bank Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
BAB 1 - TINJAUAN UMUM	1
1.1 Perkembangan Ekonomi Dunia dan Indonesia	2
1.2 Prospek Ekonomi Indonesia 2008-2012	4
1.3 Implikasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Sektoral	5
BAB 2 - TINJAUAN TERKINI PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA	7
2.1 Gambaran Perekonomian Dunia	7
2.2 Gambaran Perekonomian Indonesia	10
2.2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Indonesia	10
2.2.2 Perkembangan Sektoral Ekonomi Nasional	14
2.2.3 Perkembangan Kebijakan Sektor Riil dan Ekonomi Makro	17
BAB 3 - MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015: IMPLIKASINYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA	19
3.1 Latar Belakang Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN	20
3.2 Dinamika Perekonomian ASEAN	22
3.3 Tinjauan Konseptual Teoretis Integrasi Ekonomi	25
3.4 MEA dan Implikasi Kesejahteraan	29
3.4.1 Dampak Terhadap Perdagangan Barang	29
3.4.2 Dampak Terhadap Investasi, Pertumbuhan dan Kemiskinan	30
3.4.3 Dampak Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan	31
3.5 MEA dan Distribusi Output Pasca-Integrasi	33
3.6 MEA 2015 dan Peran Otoritas Moneter	35
3.7 Implikasi Kebijakan	36
3.7.1 Perbaikan Iklim Investasi dan Penguatan Institusi	37
3.7.2 Persiapan di Tingkat Sektoral	37
<i>Boks: Dampak Kesepakatan AFTA Bagi Kinerja Ekspor ASEAN-5: Suatu Pendekatan Model Gravitasi</i>	39
BAB 4 - PROSPEK EKONOMI JANGKA MENENGAH	43
4.1 Asumsi Perekonomian Global 2008-2012	43
a. Pertumbuhan Ekonomi Dunia	43
b. Harga Komoditas Dunia	44
c. Suku Bunga Internasional	45
d. Aliran FDI Global	45
4.2 Asumsi Perekonomian Indonesia 2008-2012	46
a. Kondisi Keuangan Pemerintah	46

b.	Suku Bunga Domestik	47
c.	Aliran Masuk FDI	47
4.3	Proyeksi Perekonomian Indonesia 2008-2012	47
4.4	Implikasi Kebijakan	49
4.4.1	Kebijakan Ekonomi Makro (Moneter dan Fiskal)	49
4.4.2	Kebijakan Ekonomi Mikro (Struktural)	50
BAB 5 - TOPIKAL ISU	51
5.1	Mobilitas Faktor, Distribusi Produksi dan Integrasi Ekonomi Kawasan	51
5.1.1	Latar Belakang dan Motivasi	51
5.1.2	Pemodelan Ekonomi	52
5.1.3	Implikasi Kebijakan	54
5.1.4	Epilog	55
5.2	Integrasi Ekonomi Kawasan, Investasi dan Peran Otoritas Moneter	56
5.2.1	Latar Belakang dan Motivasi	56
5.2.2	Data dan Metode Analisis	57
5.2.3	Analisis Jangka Pendek	58
5.2.4	Analisis Jangka Panjang	59
5.2.5	Kesimpulan	59
5.3	Dampak Kedekatan Lokasi Terhadap Ekspor Komoditas Provinsi: Pendekatan Model Gravitasi	60
5.3.1	Gambaran Singkat Ekspor Provinsi-Provinsi di Indonesia	60
5.3.2	Model dan Hasil Estimasi	62
5.3.3	Hasil Estimasi	62
5.3.4	Kesimpulan	63
5.4	Formasi Sumber Daya Manusia, Ketimpangan Pendapatan dan Integrasi Ekonomi: Kajian Meta-Analisis	64
5.4.1	Latar Belakang dan Motivasi	64
5.4.2	Pendidikan, Keterbukaan dan Ketimpangan Pendapatan	64
5.4.3	Model Ekonomi <i>Overlapping Generation</i> , Heterogenitas dan Integrasi Ekonomi	66
5.4.4	Peran <i>Human Capital</i> dalam Kondisi Ekuilibrium	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proyeksi	5
Tabel 2.1	Konsumsi Komoditas Dunia	8
Tabel 2.2	Aliran FDI Global 1997-2006	9
Tabel 2.3	Perubahan Kebijakan di Negara Tujuan FDI 1992-2006	10
Tabel 2.4	Peringkat Daya Saing oleh WEF	12
Tabel 2.5	Peringkat Daya Saing oleh IMD	12
Tabel 2.6	Peringkat Komponen Daya Saing	12
Tabel 2.7	Hasil Survei "Doing Business 2008"	13
Tabel 2.8	Kemajuan Pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2007	17
Tabel 3.1	Beberapa Indikator Ekonomi ASEAN	23
Tabel 3.2	Produktivitas Tenaga Kerja ASEAN	24
Tabel 3.3	Pangsa Ekspor Total Negara Asal ke Kawasan Terhadap Total Perdagangan Negara Asal	24
Tabel 3.4	Pangsa Ekspor Total Negara Asal ke Negara Tujuan Terhadap Total Perdagangan Negara Asal	25
Tabel 3.5	Pangsa Ekspor Komoditas Negara Asal ke Negara Tujuan Terhadap Total Ekspor Negara Asal	25
Tabel 3.6	Indeks <i>Intra-Industry Trade</i> (IIT) Sesama ASEAN-5 per Sektor Dalam 5 Tahun	26
Tabel 3.7	Indeks <i>Intra-Industry Trade</i> (IIT) Indonesia per Sektor Dalam 5 Tahun	26
Tabel 3.8	Jumlah Pekerja Migran ASEAN Tahun 2006	32
Tabel 3.9	Perkembangan Realisasi FDI dan Penyerapan Tenaga Kerja	33
Tabel 3.10	Beberapa Indikator Dasar ASEAN	34
Tabel 3.11	Beberapa Indikator Pembangunan Manusia ASEAN	35
Tabel 3.12	Komponen Daya Saing Beberapa Negara Anggota ASEAN	35
Tabel 3.13	Kondisi Infrastruktur ASEAN	36
Boks Tabel	<i>Estimasi Parameter Model Gravitasi</i>	41
Tabel 4.1	Proyeksi Aliran Masuk FDI Global 2008-2011	46
Tabel 4.2	Asumsi Dasar Domestik	47
Tabel 4.3	Proyeksi	49
Tabel 5.1	Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Thailand	58
Tabel 5.2	Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Indonesia	58
Tabel 5.3	Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Kamboja	58
Tabel 5.4	Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Singapura	58

Tabel 5.5	Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Malaysia	58
Tabel 5.6	Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Filipina	58
Tabel 5.7	Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Vietnam	58
Tabel 5.8	<i>Inward FDI</i> dan Kinerja Ekonomi Makro - Tahun Referensi 2006	59
Tabel 5.9	<i>Inward FDI</i> dan Kinerja Ekonomi Makro - Periode Referensi 2002-2006	59
Tabel 5.10	Kontribusi Provinsi Terhadap Ekspor Impor Nonmigas	60
Tabel 5.11	Komoditas Ekspor Utama dan Beberapa Wilayah Pengekspornya	61
Tabel 5.12	Hasil Estimasi Model Gravitasi	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Kontribusi Pertumbuhan Dunia	7
Grafik 2.2 Kontribusi Pertumbuhan Dunia	7
Grafik 2.3 Harga Minyak, Permintaan dan Kapasitas Produksi	8
Grafik 2.4 Perkembangan Harga Komoditas Primer Nonmigas	8
Grafik 2.5 Suplai Komoditas Dunia	9
Grafik 2.6 Aliran FDI Global dan <i>Mergers & Acquisitions</i>	9
Grafik 2.7 Pertumbuhan PDB 1989-2007	10
Grafik 2.8 Perkembangan Inflasi 1989-2007	11
Grafik 2.9 Faktor Paling Bermasalah dalam Menjalankan Usaha	13
Grafik 2.10 Lama Perizinan Melakukan Usaha	13
Grafik 2.11 Lokasi Paling Menarik Penempatan FDI	14
Grafik 2.12 Indeks Risiko	14
Grafik 2.13 Kriteria Penentuan Lokasi Penempatan FDI	14
Grafik 2.14 Perkembangan Pangsa Sektoral PDB	14
Grafik 2.15 Perkembangan Investasi Sektoral	15
Grafik 2.16 Dinamika Stok Kapital Sektoral	15
Grafik 2.17 Pertumbuhan Stok Kapital Sektoral	15
Grafik 2.18 BI Rate dan Inflasi	18
Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Volume Perdagangan Dunia	44
Grafik 4.2 Perkembangan dan Proyeksi Harga Minyak Dunia	44
Grafik 4.3 Perkembangan Harga Komoditas Riil Dunia 1906-2006	45
Grafik 4.4 Perkembangan Kebijakan Fiskal	46

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4. 1 Reformasi Struktural, Penawaran Agregat dan Kinerja Ekonomi Indonesia	47
--	----

S A M B U T A N
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA BIDANG KEBIJAKAN MONETER
DALAM RANGKA PENERBITAN
BUKU OUTLOOK EKONOMI INDONESIA EDISI JANUARI 2008

Outlook Ekonomi Indonesia edisi Januari 2008 merupakan publikasi berkala (setiap enam bulan) Bank Indonesia edisi ke-empat sejak diawali penerbitan perdana bulan Juli 2006. Setiap enam bulan, yakni bulan Januari dan Juli, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia menyusun Outlook Ekonomi Indonesia dengan tujuan untuk memberikan terawangan beberapa aspek perekonomian Indonesia jangka menengah dan panjang (5 tahun kedepan). Aspek perekonomian Indonesia yang diterawang adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran dan neraca transaksi berjalan berdasarkan Model Makroekonomi Bank Indonesia (MODBI).

Outlook Ekonomi Indonesia edisi Januari 2008 menguraikan bagaimana suatu kebijakan moneter yang *prudent* dengan tingkat inflasi yang rendah merupakan kebijakan moneter yang *pro-investment*. Kebijakan peningkatan penawaran agregat secara signifikan merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa mengorbankan stabilitas harga. Inflasi yang rendah dan stabil akan mendorong membaiknya iklim investasi sehingga stok kapital meningkat secara signifikan. Dengan demikian, kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi menjadi sangat penting terlebih dalam menghadapi perekonomian global yang dinamis dan tidak menentu. Peningkatan investasi terutama FDI, perbaikan kualitas *human capital* bangsa, serta alih teknologi ekstensif dan intensif menuju produktivitas dan efisiensi perekonomian yang tinggi harus terus diupayakan agar menjadi semangat dari tiap kebijakan nasional, regional maupun sektoral. Outlook Ekonomi Indonesia edisi ini juga dilengkapi dengan tema khusus yakni "Integrasi Perekonomian ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional."

Akhir kata, atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, saya mengharapkan agar Outlook Ekonomi Indonesia ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan umpan balik dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan Outlook Ekonomi Indonesia di masa mendatang serta semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi pekerjaan kita dan meringankan langkah kita dalam berusaha menuju masa depan yang lebih baik.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA



Hartadi A. Sarwono

halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan atas perkenanNya, maka buku Outlook Ekonomi Indonesia (OEI) 2008-2012 Edisi IV, Januari 2008 telah diselesaikan. Berbeda dengan OEI sebelumnya, OEI kali ini mengkaji tentang peluang dan tantangan Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang, serta implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Isu integrasi ekonomi dititikberatkan mengingat telah disepakatinya cetak biru (*blue print*) pembentukan MEA 2015 November 2007 lalu oleh Indonesia, bersama-sama dengan sembilan negara anggota ASEAN lainnya, sebagai komitmen dalam mewujudkan suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Kebutuhan akan asesmen faktor fundamental perekonomian Indonesia, termasuk asesmen integrasi ekonomi ASEAN, semakin dibutuhkan untuk mendukung analisis dan proyeksi arah perkeekonomian jangka menengah panjang hingga lima tahun ke depan. Karena itu, buku Outlook Ekonomi Indonesia ini disusun sebagai sebuah produk dari Biro Riset Ekonomi, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia secara rutin.

Hasil proyeksi perekonomian dalam OEI Edisi IV kali ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai referensi internal bagi Satuan Kerja di lingkungan Bank Indonesia dalam kegiatan analisis dan proyeksi jangka menengah, termasuk asesmen dan perumusan *Destination Statement* dalam Forum Strategis (FORSTRA) yang dilakukan setiap tahun, serta sebagai sumber informasi bagi para *stakeholder* Bank Indonesia, dengan terus melakukan penyesuaian data dan informasi terkini. Semoga dengan hadirnya buku Outlook Ekonomi Indonesia ini dapat dinilai sebagai suatu perwujudan dari keinginan yang tulus untuk dapat ikut serta mengantarkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik bagi kesejahteraan semua anak negeri.

Jakarta, Januari 2008

Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter



MADE SUKADA

Direktur

halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 1: Tinjauan Umum

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan ekonomi dunia ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata historisnya (di atas 4%), aliran FDI global yang terus meningkat dan melambungnya harga komoditas minyak serta non-minyak dunia, sehingga menyebabkan tekanan inflasi dunia meningkat. Dalam periode yang sama perekonomian domestik juga ditandai dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi namun dengan tingkat yang moderat, rasio investasi terhadap PDB yang masih lebih rendah dibandingkan sebelum krisis walaupun aliran masuk FDI neto terus meningkat serta rata-rata inflasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis, terutama karena kenaikan BBM pada 2005.

Pertumbuhan perekonomian dunia dan volume perdagangan dunia periode 2008-2012 diperkirakan akan tetap tinggi sementara harga komoditas migas dan non-migas masih berada pada level di atas rata-rata historis. Dari sisi domestik, diperkirakan stabilitas ekonomi makro tetap terkendali, kondisi fiskal Indonesia masih terjaga, dan aliran FDI ke Indonesia terus meningkat. Dengan asumsi perekonomian dunia dan domestik seperti tersebut di atas, perekonomian Indonesia 2008-2012 diperkirakan akan semakin baik, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkualitas serta inflasi yang menurun. Prospek perekonomian tersebut didasarkan pada optimisme terjadinya sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro serta terus membaiknya iklim investasi, infrastruktur, ketenagakerjaan dan

kepastian usaha melalui kebijakan sektoral. Stabilitas ekonomi makro yang terus terjaga dan potensi pasar yang besar menjadi daya tarik investor internasional untuk tetap melakukan investasi di Indonesia sehingga aliran masuk FDI ke Indonesia akan meningkat dan investasi tumbuh tinggi. Seiring meningkatnya investasi tersebut, ekonomi diharapkan akan tumbuh lebih tinggi dan berkualitas, sedangkan inflasi akan menurun. Daya beli riil masyarakat juga akan meningkat, sehingga konsumsi diperkirakan tetap tumbuh tinggi. Sementara itu, kondisi eksternal yang masih kondusif, yang tercermin dari masih tingginya volume perdagangan dunia, menyebabkan kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan membaik. Kenaikan ekspor dan maraknya kegiatan investasi akan diikuti dengan derasnya impor barang dan jasa sehingga surplus pada transaksi berjalan akan terus menurun. Namun demikian, adanya peningkatan aliran FDI global akan menjadi katup pengaman bagi kondisi neraca pembayaran sehingga nilai tukar akan relatif stabil.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,4-8,0% pada 2012, kondisi ekonomi makro yang stabil, perlu didukung kebijakan struktural yang kokoh seperti perbaikan iklim investasi (termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur), upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas SDM. Kondisi-kondisi tersebut merupakan kunci mengatasi keterbatasan sisi penawaran dan meningkatkan aliran masuk FDI global dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

1.1. Perkembangan Ekonomi Dunia dan Indonesia

Dinamika perekonomian Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan kawasan serta berbagai kemajuan dalam perbaikan, iklim investasi, infrastruktur, produktivitas dan daya saing (sisi penawaran) dalam negeri. Ekonomi dunia telah mampu tumbuh diatas 4% dalam lima tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata historisnya.¹ Perkembangan ini terutama didorong oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara berkembang (China dan India) serta kawasan Eropa. Tingginya pertumbuhan ekonomi dunia tersebut diiringi dengan volume perdagangan dunia yang juga tumbuh lebih tinggi dari tren jangka panjangnya.² Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia tersebut, aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) global juga meningkat pesat. Namun perkembangan ekonomi dunia yang impresif ini dibayangi dengan melambungnya harga minyak dan non-minyak dunia. Terus naiknya harga komoditas dan tetap tingginya pertumbuhan ekonomi dunia menyebabkan tekanan inflasi dunia meningkat.

Tekanan inflasi dunia yang meningkat seiring dengan harga komoditas yang masih tinggi direspons secara bervariasi oleh bank sentral di beberapa negara. Disamping tekanan inflasi, beberapa bank sentral tampaknya juga mempertimbangkan kondisi stabilitas pasar keuangan dan prospek pertumbuhan ekonomi domestiknya. Bank sentral Amerika Serikat (*The Fed*) memberi bobot yang tinggi pada pemulihan krisis di pasar keuangan dan stimulus perekonomian domestik, yang terlihat dari agresivitas penurunan Fed Fund Rate menjadi 3%

pada Januari 2008. Sebaliknya, bank sentral Uni Eropa (ECB) dan Jepang (BOJ) tampaknya lebih memprioritaskan tekanan inflasi domestik sehingga memilih mempertahankan tingkat bunga.

Dari sisi domestik, walaupun stabilitas ekonomi makro bisa dijaga, sejumlah masalah struktural, iklim investasi, infrastruktur, produktivitas dan daya saing (sisi penawaran) masih membayangi pencapaian pertumbuhan yang lebih cepat dan berkualitas. Hal ini antara lain karena struktur perekonomian pascakrisis lebih ditopang oleh konsumsi dan ekspor, sementara investasi belum menunjukkan peran yang signifikan. Belum pulihnya investasi ditunjukkan oleh menurunnya pangsa investasi terhadap PDB, terutama dialami oleh sektor terpenting dalam perekonomian Indonesia seperti industri pengolahan, pertanian dan pertambangan. Dalam pada itu, pergerakan inflasi menunjukkan karakteristik yang berbeda antara periode sebelum dan sesudah krisis, dimana volatilitas inflasi jauh lebih tinggi pascakrisis. Kondisi di mana pertumbuhan ekonomi pascakrisis lebih rendah dan rata-rata inflasi yang sedikit lebih tinggi menunjukkan penawaran agregat yang mengindikasikan adanya permasalahan di sisi penawaran (*supply side constraints*),³ sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia lebih sensitif terhadap tekanan harga.

Meskipun masih dibayangi berbagai permasalahan di atas, secara umum investor internasional menilai bahwa prospek usaha di Indonesia tetap baik dan Indonesia masih dianggap sebagai lokasi yang menarik untuk penempatan

1 Pertumbuhan ekonomi dunia selama tahun 1970-2006 rata-rata mencapai 3,7%.

2 Rata-rata pertumbuhan volume perdagangan dunia periode 1970-2006 adalah 6,1%.

3 Analisis BI menggunakan pendekatan SVAR Blanchard-Quah mengindikasikan bahwa kurva penawaran pasca krisis lebih curam dibandingkan dengan periode sebelum krisis. Analisis lebih lanjut lihat Nugroho (2007): Meninjau Kembali Kurva Penawaran Agregat Pra & Pasca Krisis, dalam Outlook Ekonomi Indonesia Edisi Juli 2007.

FDI. Berdasarkan survei UNCTAD pada 2007, Indonesia ditempatkan dalam 15 besar negara paling menarik sebagai lokasi penempatan FDI. Selain itu, peringkat Indonesia dalam indeks kinerja dan potensi FDI juga terus menunjukkan perbaikan.⁴ Hal ini sejalan dengan persepsi risiko terhadap Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin membaik, seperti terlihat dalam International Country Risk Guide (ICRG). Selain itu, Indonesia dianggap memiliki potensi pasar yang besar dan kualitas lingkungan usaha yang baik.

Mempertimbangkan konstelasi perekonomian dunia dan Indonesia selama 5 tahun terakhir, faktor eksternal menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Hal ini terkait dengan semakin terbukanya perekonomian Indonesia, baik terhadap ekonomi dunia maupun ekonomi kawasan. Perkembangan signifikan di tingkat kawasan yang perlu diamati adalah rencana percepatan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dari 2020 menjadi 2015, yang memiliki tujuan tercapainya suatu kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Hal ini karena integrasi ekonomi menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi negara-negara di dalamnya melalui pembukaan akses pasar yang lebih besar, dorongan mencapai efisiensi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi, serta terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.

Sebagai satu kesatuan wilayah, ASEAN menjanjikan potensi ekonomi yang sangat potensial. Dilihat dari sisi perdagangan intra ASEAN, hasil penghitungan Indeks *Intra-Industry Trade* (IIT) menunjukkan adanya keterkaitan antar

berbagai industri di ASEAN, sehingga sangat mendukung proses integrasi ekonomi ASEAN. Studi dengan model gravitasi terhadap lima negara ASEAN periode 1989-2006 menunjukkan bahwa perjanjian AFTA merupakan salah satu faktor yang berperan dalam perdagangan intra-ASEAN.⁵ Dalam pada itu, liberalisasi dalam perdagangan barang, jasa, investasi, dan mobilitas faktor produksi tenaga kerja akan berdampak pada kondisi ketenagakerjaan. Bagi Indonesia, peluang terjadinya migrasi tenaga kerja ini berpotensi menguntungkan mengingat relatif tingginya tingkat pengangguran di Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya.⁶ Namun, perkembangan FDI ke Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran orientasi industri FDI, yakni dari sektor sekunder ke sektor tersier. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, pergeseran orientasi ini perlu dicermati, mengingat sektor sekunder (industri pengolahan) selama ini adalah sektor penyerap tenaga kerja terbesar.

Agar dapat menuai manfaat optimal dari integrasi ekonomi, setiap negara dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Dalam kaitan ini bank sentral memiliki peran yang signifikan melalui kebijakan moneternya untuk mendorong investasi yang tinggi guna meningkatkan stok kapital fisik (*physical capital*). Bukti empiris dengan menggunakan data Thailand, Indonesia, Kamboja, Singapura, Malaysia, Filipina dan Vietnam (ASEAN-7) periode 1992-2006 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif

4 World Investment Report 2007.

5 Hasil penelitian lebih lengkap dapat dilihat dalam Boks "Dampak Kesepakatan AFTA Bagi Kinerja Ekspor ASEAN-5: Suatu Pendekatan Model Gravitasi" pada Bab 3.

6 Data statistik tahun 2006 menunjukkan Indonesia bersama Myanmar merupakan negara pengirim tenaga kerja migran terbesar, masing-masing mengirim 23% dan 27% dari total tenaga kerja migran di ASEAN.

yang kuat antara inflasi dan pertumbuhan investasi di negara-negara tersebut.⁷ Hubungan positif juga ditemukan antara stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan investasi. Kedua temuan ini memberikan indikasi bahwa negara yang memiliki inflasi rendah dan ekonomi makro yang stabil cenderung mampu menarik investasi yang tinggi. Kebijakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan mempertahankan inflasi yang rendah dan ekonomi makro yang stabil dapat dikatakan merupakan kebijakan moneter yang pro-investasi.

1.2. Prospek Ekonomi Indonesia 2008-2012

Secara umum, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia yang tetap tinggi, harga komoditas migas dan non-migas yang masih pada level tinggi, kebijakan moneter dunia dan Indonesia yang relatif stabil, kondisi fiskal Indonesia yang masih mantap, serta aliran FDI ke Indonesia yang meningkat, perekonomian Indonesia 5 tahun ke depan diperkirakan akan semakin membaik dan berada dalam kisaran 7,4-8,0%. Sumber pertumbuhan ekonomi ini terutama adalah perbaikan iklim investasi yang akan mendorong masuknya aliran FDI secara signifikan hingga mencapai 1,5% PDB pada 2012, sehingga diharapkan pangsa investasi terus meningkat dan mencapai sekitar 30% PDB pada 2012. Selain itu, perdagangan intra-regional dalam kawasan ASEAN dan Asia Pasifik diperkirakan masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam jangka menengah. Dari sisi domestik, kebijakan moneter yang tetap disiplin dalam menjaga stabilitas ekonomi makro serta kebijakan fiskal yang masih bersifat stimulasi

akan berperan penting dalam mendukung prospek perekonomian Indonesia dalam jangka menengah. Prakiraan pertumbuhan ekonomi di atas jelas membutuhkan prasyarat kebijakan struktural yang kokoh seperti perbaikan iklim investasi, pemberdayaan UMKM, reformasi sektor keuangan dan perbaikan infrastruktur.

Berbagai kondisi eksternal dan domestik yang kondusif tersebut diperkirakan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan laju inflasi yang tetap terkendali. Stabilitas ekonomi makro yang terus terjaga dan potensi pasar yang besar menjadi daya tarik investor internasional untuk tetap melakukan investasi di Indonesia.⁸ Aliran masuk FDI yang terus meningkat diikuti dengan pesatnya pertumbuhan investasi yaitu dari kisaran 9,3% pada 2008 menjadi 13,0-15,0% pada 2012. Investasi yang meningkat pesat selanjutnya akan menaikkan (baca: perbaikan produksi dan distribusi) kapasitas perekonomian dari sisi penawaran sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai dari 6,2% pada 2008 menjadi 7,4-8,0% pada 2012, diiringi dengan menurunnya inflasi. Inflasi yang rendah yang dibarengi rencana kenaikan upah minimum menyebabkan daya beli riil masyarakat akan meningkat, sehingga konsumsi swasta diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi mencapai 5,6-6,0% pada 2012.

Kondisi eksternal yang masih kondusif menyebabkan kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan membaik dan aliran FDI global ke Indonesia terus meningkat sehingga neraca pembayaran tetap mantap dan nilai tukar masih

7 Hasil penelitian lebih lengkap dapat dilihat pada Bab V, Topical Issue 2 berjudul: "Integrasi Ekonomi Kawasan, Investasi dan Peran Otoritas Moneter"

8 Hasil survei UNCTAD menyebutkan bahwa ukuran dan pertumbuhan pasar bersama dengan kualitas lingkungan usaha menjadi determinan utama dalam menentukan lokasi penempatan FDI.

Tabel 1.1 Proyeksi

Proyeksi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Produk Domestik Bruto	6,3	6,2	6,2-6,8	6,8-7,4	7,2-7,8	7,4-8,0
- Konsumsi Swasta	5,0	5,4	5,6-5,9	5,6-6,0	5,6-6,0	5,6-6,0
- Konsumsi Pemerintah	3,9	3,8	4,0-5,0	7,0-9,0	8,0-10,0	8,0-10,0
- Investasi	9,2	9,3	10,5-10,8	11,0-13,0	12,0-13,0	13,0-15,0
- Ekspor Barang & Jasa	8,0	7,9	8,1-9,1	10,5-11,5	11,5-12,5	12,5-13,5
- Impor Barang & Jasa	8,9	9,4	10,4-10,7	12,5-13,5	13,5-14,5	14,5-15,5
Lain-lain						
Pendapatan per Kapita (USD)	1947,1	1980	2145-2180	2375-2410	2650-2685	2950-3000
Pengangguran (%)	9,1	9	9,0-10,0	8,5-9,5	8,0-9,0	7,5-8,5
Target Inflasi (%)	6,0±1%	5,0±1%	4,5±1%	4,0±1%		

*) Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 1/2008

dapat cenderung stabil. Berbagai pembenahan struktural yang dilaksanakan Pemerintah, seperti perbaikan infrastruktur, perizinan, bea cukai dan perpajakan diperkirakan memberikan dukungan yang cukup signifikan dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Selain itu, maraknya aliran masuk FDI akan disertai perbaikan teknologi yang berdampak peningkatan produktivitas dan efisiensi. Namun, kenaikan ekspor dan maraknya kegiatan investasi akan diikuti oleh kenaikan impor barang dan jasa. Sebagai akibatnya surplus pada transaksi berjalan akan terus menurun. Namun demikian, adanya peningkatan aliran FDI global akan menjadi katup pengaman bagi kondisi neraca pembayaran yang mengalami tekanan tersebut. Relatif amannya neraca pembayaran yang didukung oleh membaiknya fundamental perekonomian diprakirakan akan mampu menstabilkan nilai tukar.⁹

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, laju inflasi yang tetap terkendali, nilai tukar yang cenderung stabil, serta perbaikan sisi penawaran

9 Sejalan dengan hasil survei UNCTAD dan *Intelligence Economic Unit* (IEU) dari *The Economists* yang menyatakan bahwa aliran masuk FDI ke Indonesia diperkirakan masih positif, terutama didasarkan pada besarnya pasar domestik dan potensi perkembangannya yang dinilai cukup tinggi untuk mengimbangi risiko yang ada.

diprediksi akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tinggi yang didorong oleh meningkatnya kapasitas produksi akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran diproyeksikan turun menjadi 7,5-8,5% pada 2012. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang dibarengi dengan inflasi yang terus menurun akan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan. Berbagai capaian perbaikan propek perekonomian dalam jangka menengah tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pendapatan per kapita masyarakat diharapkan meningkat dari USD 1.980 pada 2008 menjadi USD 2.950–3.000 pada 2012.

1.3. Implikasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Sektoral

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4-8,0% diperlukan dukungan kuat dari kebijakan makro dan sektoral sebagai berikut:

- Kebijakan moneter akan tetap dilakukan secara berhati-hati dengan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat menuju sasaran inflasi dengan mempertimbangkan secara saksama dinamika perekonomian dunia dan domestik.

- b. Kebijakan fiskal dalam lima tahun ke depan diharapkan tetap memberikan stimulus bagi perekonomian, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Upaya-upaya di sisi fiskal yang bersifat stimulus diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur, mendorong industri yang berdaya serap tenaga kerja tinggi, mempertahankan daya beli masyarakat, mengentaskan kemiskinan serta memperbaiki distribusi pendapatan. Diperkirakan defisit fiskal terus menurun mencapai 1,4% PDB pada akhir tahun 2012.
- c. Mengingat investasi fisik dan sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang, maka

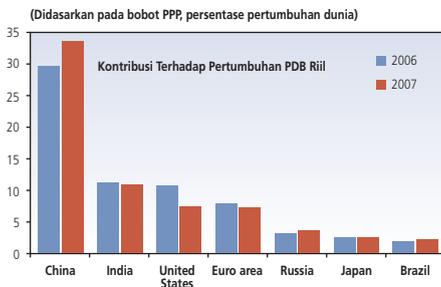
kebijakan menciptakan iklim kondusif bagi investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing dan perbaikan kualitas SDM (*human capital*) menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan serta menyongsong pembentukan MEA 2015. Dalam kaitan ini, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi: 1) Perbaikan Iklim Investasi, 2) Reformasi Sektor Keuangan, 3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan 4) Pemberdayaan UMKM seyogyanya dipercepat implementasinya secara optimal.

Bab 2: Tinjauan Terkini Perekonomian Dunia dan Indonesia

Perkembangan ekonomi dunia dalam jangka panjang diharapkan tetap menunjukkan gambaran yang positif walaupun akhir-akhir ini penuh dinamika. Kondisi ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi, yang diikuti peningkatan volume perdagangan dunia dan aliran modal antar negara yang terus meningkat. Namun demikian, perkembangan positif tersebut dibayangi oleh harga komoditas dunia (migas maupun non migas) yang tetap tinggi dan pasar keuangan dunia yang belum stabil. Di sisi domestik, perekonomian Indonesia terus menunjukkan kemajuan, walaupun masih dibayangi oleh rendahnya respon sisi penawaran, peran investasi yang relatif rendah, dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum baik yang tercermin dari tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

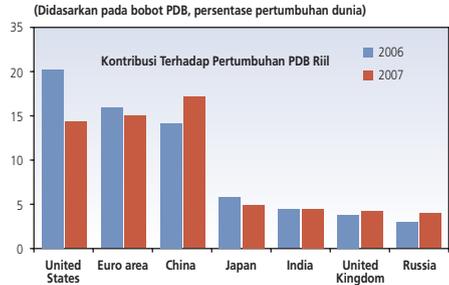
2.1. Gambaran Perekonomian Dunia

Dalam lima tahun terakhir, ekonomi dunia telah mampu tumbuh diatas 4% per tahun, yang berarti lebih tinggi dari rata-rata historisnya (3,7% untuk kurun waktu 1970-2006). Perkembangan yang impresif ini terutama didorong oleh pesatnya



Sumber: IMF: Survey Magazine-IMF Research

Grafik 2.1 Kontribusi Pertumbuhan Dunia



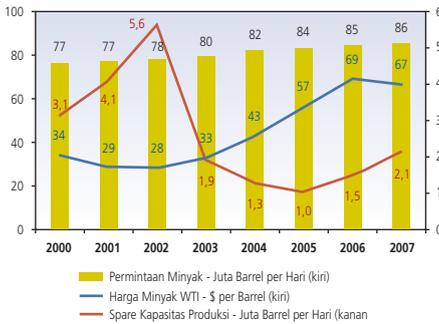
Sumber: IMF: Survey Magazine-IMF Research

Grafik 2.2 Kontribusi Pertumbuhan Dunia

pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang serta kawasan Eropa (tertinggi dalam lima tahun terakhir). Pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara sedang berkembang, khususnya China, India dan Rusia, telah berhasil menutupi perlambatan ekonomi AS akibat dampak krisis pasar keuangan yang dipicu krisis kredit perumahan (*subprime mortgage*). Bahkan untuk pertama kalinya, China dan India saat ini telah menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi dunia seperti terlihat pada Grafik 2.1 dan 2.2.¹ Perkembangan ekonomi dunia yang impresif ini juga diikuti dengan perdagangan dunia yang terus meningkat, dimana rata-rata pertumbuhan volume perdagangan dunia dalam tiga tahun terakhir mencapai 9,2%, lebih tinggi dari tren jangka panjangnya.²

Namun **perkembangan ekonomi dunia yang impresif ini dibayangi oleh harga minyak yang terus meningkat.** Secara fundamental kenaikan ini

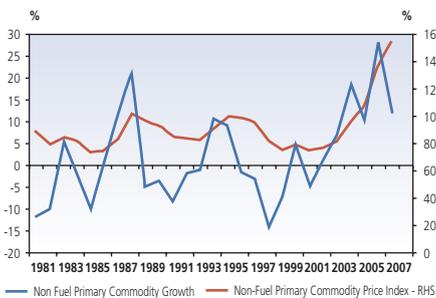
- 1 Pada 2006 secara bersama-sama, kontribusi pertumbuhan ekonomi Cina (11,5%), India (9%) dan Rusia (8%) adalah setengah dari pertumbuhan ekonomi dunia.
- 2 Rata-rata pertumbuhan volume perdagangan dunia periode 1970-2006 adalah 6,1%.



Sumber: Energy International Agency (EIA)

Grafik 2.3 Harga Minyak, Permintaan dan Kapasitas Produksi

disebabkan oleh tingginya permintaan dunia dan terbatasnya pasokan (lihat Grafik 2.3). Konsumsi minyak dunia yang terus meningkat, terutama dari *emerging market* seperti China -yang menyumbang lebih dari sepertiga pertumbuhan konsumsi minyak dunia- tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai. Bahkan sejak 2003 *spare* kapasitas produksi minyak dunia cenderung berkurang. Kondisi ini mengakibatkan harga minyak meningkat secara tajam sejak 2003, dan sempat menyentuh level tertingginya, USD100/ barel pada awal Januari 2008. Lebih lanjut, faktor non-fundamental, seperti kondisi geopolitik negara-negara penghasil minyak, kondisi cuaca dan faktor ekspektasi, juga turut berpengaruh terhadap pergerakan harga minyak.



Sumber: Database IMF

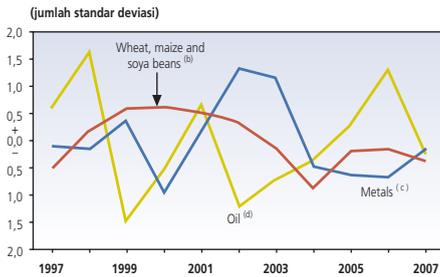
Grafik 2.4 Perkembangan Harga Komoditas Primer Nonmigas

Harga komoditas primer non-migas juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Sebelum 2000, pergerakan harga komoditas ini relatif stabil (lihat Grafik 2.4). Namun sejak 2003 harga komoditas primer naik signifikan, bahkan tumbuh sebesar 28% pada 2006. Kenaikan harga yang terus menerus ini terutama dipicu oleh tingginya permintaan dunia serta terbatasnya pasokan. Pada Tabel 2.1 di bawah terlihat besarnya kontribusi China dalam konsumsi beberapa komoditas non migas, seperti aluminium dan tembaga. Sedangkan pasokan yang terbatas terjadi akibat rendahnya investasi pada produksi logam dasar dan minimnya penemuan sumber baru, dimana sejak 2004 inventori logam sudah berada di bawah rata-rata historisnya (lihat Grafik 2.5). Kenaikan harga komoditas logam ini juga diikuti dengan kenaikan harga bahan makanan. Selain diakibatkan terbatasnya pasokan, misalnya akibat panen yang terganggu, kenaikan harga makanan tersebut juga didorong meningkatnya permintaan komoditas bahan makanan yang digunakan sebagai bahan pembuatan *biofuel*. Terus naiknya harga komoditas bersama-sama dengan tetap tingginya pertumbuhan ekonomi dunia menyebabkan

Tabel 2.1 Konsumsi Komoditas Dunia (% Pertumbuhan)

Proyeksi 2008-2012	2000 - 04			2005 - 07 ^(a)		
	Contribution of ^(b)			Contribution of ^(b)		
	World	United States	China	World	United States	China
Oil	1.7	0.3	0.6	1.4	0.1	0.5
Aluminium	5.2	-0.4	2.8	6.6	0.2	5.5
Metals						
Copper	3.4	-0.9	2.5	2.7	-0.8	3.1
Zinc	4.4	-0.5	3.3	2.4	-0.4	2.4
Agriculture food ^(c)						
Wheat	0.5	-0.1	-0.2	1.2	-0.1	-0.1
Maize	2.5	1.0	0.5	3.5	1.4	0.8
Soya beans	4.4	0.0	1.9	5.0	0.9	1.6
Memo:						
Share of world GDP (percent) ^(d)	-	20.8	12.3	-	19.6	15.1

Sumber : Bank of England, Inflation Report November 2007

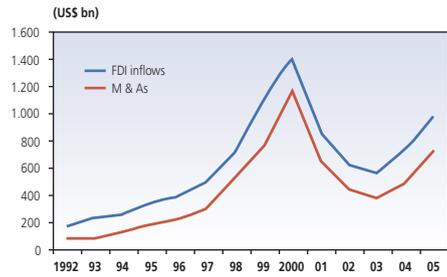


Sumber: BoE, Energy Information Agency, London Metal Exchange, The Economist, Thompson Data Stream and US Department of Agriculture

Grafik 2.5 Suplai Komoditas Dunia

tekanan inflasi meningkat. Pada semester dua 2007, inflasi negara-negara industri dan negara sedang berkembang cenderung meningkat.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia yang impresif dalam 4 tahun terakhir, aliran **Foreign Direct Investment (FDI) global meningkat pesat**. Setelah sempat mengalami pertumbuhan negatif yang cukup besar, pada periode 2004-2006 FDI global meningkat cukup signifikan. Pertumbuhan negatif pada periode 2001-2003 terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan berakhirnya era *booming Mergers & Acquisitions (M&A)* pada periode sebelumnya. Namun seiring membaiknya kondisi perekonomian dunia, aliran masuk FDI meningkat pesat, yang ditandai dengan pertumbuhan sebesar 29,6; 33,1 dan 37,4%



Sumber: National Statistics, Economist Intelligence Unit, IMF, UNCTAD

Grafik 2.6 Aliran FDI Global dan *Mergers & Acquisitions*

berturut-turut pada 2004, 2005 dan 2006. Bahkan pada 2006 aliran masuk FDI hampir menyamai level tertinggi yang terjadi pada 2000, yaitu sekitar 1,3 miliar USD (seperti terlihat pada Tabel 2.2 di bawah). Pada 2007, pertumbuhan aliran masuk FDI masih tetap tinggi, meskipun tidak sebesar periode 2004-2006.

Kenaikan aliran FDI global yang tinggi antara lain diakibatkan oleh meningkatnya keuntungan perusahaan di dunia sehingga harga saham juga ikut meningkat, yang selanjutnya diikuti dengan pesatnya pertumbuhan **crossborder Mergers & Acquisitions**. Hubungan yang sangat erat antara aliran FDI global dan *crossborder M&A* dapat dilihat pada Grafik 2.6. Kenaikan keuntungan perusahaan ini selanjutnya juga mengakibatkan *reinvested earnings* menjadi komponen penting dari aliran

Tabel 2.2 Aliran FDI Global 1997-2006 (dalam miliar dolar)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Word total	491,8	712,9	1.113,8	1.408,3	851,1	618,1	563,4	730,2	971,7	1.335,1
Developed countries	279,0	493,8	853,0	1.125,0	563,4	421,1	354,6	379,5	546,8	824,4
% of world total	56,7	69,3	76,6	79,9	66,2	68,1	62,9	52,0	56,3	61,7
Emerging markets	212,8	219,1	260,9	283,3	287,8	197,0	208,9	350,7	424,9	510,7
% of world total	43,3	20,7	23,4	20,1	33,8	31,9	37,1	48,0	43,7	38,8

Sumber: National Statistics, Economist Intelligence Unit, IMF, UNCTAD

Tabel 2.3 Perubahan Kebijakan di Negara Tujuan FDI 1992-2006

Item	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Jumlah Negara yang															
Memberlakukan Perubahan	43	56	49	63	66	76	60	65	70	71	72	82	103	93	93
Jumlah Perubahan Peraturan	77	100	110	112	114	150	145	139	150	207	246	242	270	205	184
Terkait dengan FDI	77	99	108	106	98	134	136	130	147	193	234	218	234	164	147
Tidak Terkait dengan FDI	0	1	2	6	16	16	9	9	3	14	12	24	36	41	37

Sumber: UNCTAD, World Investment Report 2007

masuk FDI, dimana pada 2006 pangsaanya mencapai 30% dari aliran FDI global. Bahkan di negara-negara berkembang rasionya bisa mencapai 50% dari aliran FDI di negara-negara tersebut. Kebijakan pemerintah di negara-negara tujuan FDI ikut berperan dalam peningkatan aliran masuk FDI global ini. Pada 2006 ada 147 kebijakan yang mengakibatkan negara penerima FDI menjadi lebih menarik dan kondusif, seperti penurunan pajak pendapatan perusahaan yang dilakukan Brasil dan India.

2.2. Gambaran Perekonomian Indonesia

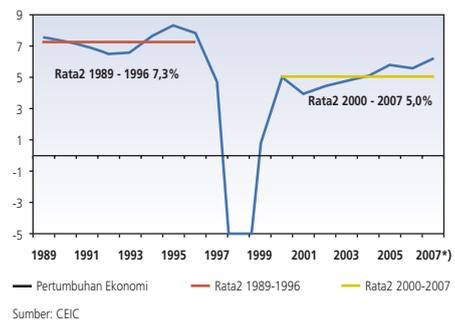
Dengan melihat perkembangan konstelasi perekonomian dunia dalam perspektif jangka panjang, seperti pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia yang masih tinggi, aliran FDI global yang cukup besar, dan harga komoditas yang tetap tinggi, dinamika perekonomian Indonesia tetap akan dipengaruhi faktor-faktor dunia tersebut.

2.2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Indonesia

Perkembangan perekonomian domestik menunjukkan perbaikan meskipun masih dibayangi berbagai permasalahan yang bersifat struktural dan berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih lanjut.

Stabilitas makro, yang menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, masih bisa dijaga melalui kolaborasi berbagai kebijakan Pemerintah dan otoritas moneter. Namun untuk memacu pertumbuhan lebih cepat dan mencapai pertumbuhan yang berkualitas, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang bersifat struktural.

Sejak 2002 pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah menunjukkan akselerasi namun masih rendah, dengan tingkat pertumbuhan di bawah sebelum krisis (lihat Grafik 2.7).³ Secara umum, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode setelah krisis hanya berkisar 5% per tahun, jauh di bawah periode sebelum krisis, sehingga dapat

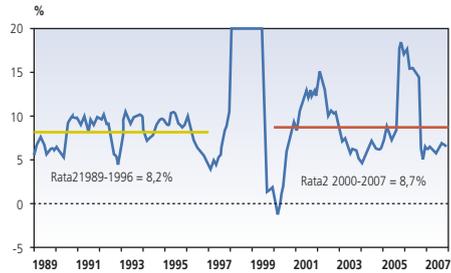


Grafik 2.7 Pertumbuhan PDB 1989-2007

3 Analisis menggunakan periodisasi sebagai berikut: sebelum krisis 1989-1996 dan sesudah krisis 2000-2007.

dikatakan bahwa permintaan agregat melemah.⁴ Hal ini juga diikuti dengan perubahan struktur ekonomi, di mana pangsa investasi yang dulu mencapai 30% PDB, setelah krisis hanya berkisar 20% PDB. Hal sebaliknya terjadi pada konsumsi swasta, apabila sebelum krisis pangsaanya terhadap PDB berada di bawah 60% namun setelah krisis pangsaanya selalu lebih dari 60%.

Pergerakan inflasi menunjukkan karakteristik yang berbeda antara periode sebelum dan sesudah krisis, dimana walaupun tingkat inflasi kedua periode tidak jauh berbeda, volatilitas inflasi pascakrisis jauh lebih tinggi (lihat Grafik 2.8). Meskipun pertumbuhan ekonomi pascakrisis lebih rendah dari periode sebelumnya, namun rata-rata inflasi periode setelah krisis sedikit lebih tinggi dari periode sebelumnya. Secara teoritis, kondisi ini hanya akan terjadi apabila perlambatan permintaan agregat juga dibarengi dengan perlambatan penawaran agregat. Interaksi antara permintaan dan penawaran ini mengindikasikan adanya permasalahan di sisi penawaran (*supply constraints*).⁵ Sehingga perbaikan berbagai masalah struktural yang akan bermuara pada perbaikan iklim investasi dan sisi penawaran bersama dengan usaha untuk mendorong permintaan menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan dan berkualitas.



Sumber: CEIC

Grafik 2.8 Perkembangan Inflasi 1989 – 2007

Berbagai indikator dan hasil survei menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi Indonesia ini masih lambat. Dalam publikasi *Global Competitiveness Report 2007-2008*, disebutkan bahwa daya saing ekonomi Indonesia 2007 tetap berada pada posisi 54 dari 131 negara, setelah pada 2006 sempat mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan 2005 (lihat Tabel 2.4).⁶ Situasi yang sama juga terungkap dari hasil survei International Institute for Management Development (IMD), dalam publikasinya *World Competitiveness Yearbook* tahun 2007, yang menunjukkan bahwa daya saing ekonomi Indonesia tidak mengalami perbaikan (Tabel 2.5). Indonesia mengalami penurunan peringkat daya saing dari peringkat 52 pada tahun 2006 menjadi peringkat 54 dari 55 negara pada 2007.⁷ Posisi Indonesia hanya unggul satu tingkat di atas Venezuela, dan berada tepat di bawah Argentina, Polandia, dan Kroasia. Terlebih lagi apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina posisi Indonesia masih jauh tertinggal di bawahnya.

4 Berdasarkan riset BI, *long-term trend* pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 1981-2007 adalah 4,9%. Angka *long-term trend* merupakan angka konstanta dalam persamaan PDB yang diperoleh dari model makro.

5 Analisis BI menggunakan pendekatan SVAR Blanchard-Quah mengindikasikan bahwa kurva penawaran pasca krisis lebih curam dibandingkan dengan periode sebelum krisis. Analisis lebih lanjut lihat Nugroho (2007): Meninjau Kembali Kurva Penawaran Agregat Pra & Pasca Krisis, dalam Outlook Ekonomi Indonesia Edisi Juli 2007.

6 Publikasi yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* (WEF) berdasarkan hasil survei.

7 Kriteria IMD dalam menilai tingkat daya saing suatu negara terdiri dari indikator seperti kinerja perekonomian, tingkat efisiensi pemerintah, legitimasi dunia usaha, tingkat efisiensi dunia usaha, dan infrastruktur.

Tabel 2.4 Peringkat Daya Saing oleh WEF

Negara	Peringkat		
	2005	2006	2007
Indonesia	69	54	54
Singapura	5	8	7
Malaysia	25	19	21
Thailand	33	28	28
Filipina	73	75	71
Vietnam	74	64	68
Kamboja	111	106	110
Timor-Leste	113	120	127

Sumber: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2006 & 2007

Kondisi infrastruktur, institusi dan pendidikan dasar yang buruk berkontribusi pada tidak membaiknya daya saing ekonomi Indonesia. Dalam survei WEF (World Economic Forum) 2007 seperti terlihat pada Tabel 2.6. dan Grafik 2.9. juga disebutkan bahwa faktor utama yang menghambat bisnis di Indonesia adalah infrastruktur yang buruk, dan diikuti dengan birokrasi pemerintah yang dinilai belum efisien. Kualitas institusi di Indonesia juga dinilai rendah berdasarkan hasil survei Transparency

Tabel 2.5 Peringkat Daya Saing oleh IMD

Negara	2007	2006	2005	2004	2003
USA	1	1	1	1	1
Singapore	2	3	3	2	4
Hongkong	3	2	2	6	40
China	15	18	31	24	29
Taiwan	18	17	11	12	17
Malaysia	23	22	28	16	21
India	27	27	39	34	50
Korea	29	32	29	35	37
Thailand	33	29	27	29	30
Philippines	45	42	49	52	49
Brazil	49	44	51	53	52
South Africa	50	44	46	49	47
Argentina	51	47	58	59	58
Poland	52	58	57	57	55
Croatia	53	59	-	-	-
Indonesia	54	52	59	58	57
Venezuela	55	53	60	60	59
Jumlah Negara	55	55	60	60	59

Sumber: International for Management Development (IMD)

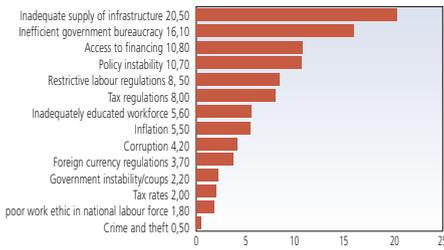
International mengenai persepsi korupsi yang menempatkan Indonesia berada pada peringkat 134 terkorup di dunia (dari 163 negara).

Sementara itu menurut hasil survei Bank Dunia, ditemukan sejumlah hambatan dalam proses memulai usaha di Indonesia, yang mencakup jumlah prosedur serta waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Secara umum pada 2007 peringkat kemudahan melakukan usaha di Indonesia membaik, dari peringkat 133 pada 2006 menjadi 123 (lihat Tabel 2.7). Namun apabila dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN, peringkat Indonesia jauh lebih buruk. Posisi Indonesia di urutan 123 ini unggul hanya jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Lesotho, Algeria, dan Mesir. Hambatan paling utama untuk melakukan usaha di Indonesia adalah proses memulai usaha yang rata-rata membutuhkan 105 hari, jauh lebih lama jika dibandingkan dengan proses memulai usaha di negara tetangga di kawasan ASEAN seperti Singapura (5 hari), Malaysia (24), Thailand (33), Vietnam (50) dan bahkan Filipina (58) (lihat Grafik 2.10). Dalam kategori ini Indonesia berada di peringkat 168 dari 178 negara.

Tabel 2.6 Peringkat Komponen Daya Saing

Indonesia	2006	2007
Indonesia	69	54
Overall index	54	54
Basic requirements	75	82
Institutions	60	63
Infrastructures	78	91
Macroeconomic stability	73	89
Health & primary education	93	78
Efficiency enhancers	44	37
Higher education and training	70	65
Goods market & efficiency	33	23
Labor market efficiency	51	31
Financial market sophistication	58	50
Technological readiness	75	75
Market size	15	15
Innovation & sophistication factors	41	34
Business sophistication	41	33
Innovation	39	41

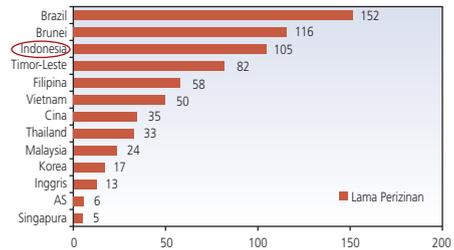
Sumber: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2006 & 2007



Sumber: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007

Grafik 2.9 Faktor Paling Bermasalah dalam Menjalankan Usaha

Meskipun demikian, **Indonesia tetap dianggap lokasi yang menarik untuk penempatan FDI.** Berdasarkan survei UNCTAD pada 2007 Indonesia termasuk 15 besar negara paling menarik sebagai lokasi penempatan FDI (lihat Grafik 2.11).⁸ Dalam publikasi UNCTAD yang lain, disebutkan bahwa peringkat Indonesia dalam indeks kinerja dan potensi FDI terus menunjukkan perbaikan.⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun



Sumber: World Bank

Grafik 2.10 Lama Perizinan Melakukan Usaha (hari)

Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, namun secara umum investor internasional menilai bahwa prospek usaha di Indonesia masih baik. Hal ini sejalan dengan persepsi risiko terhadap Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin membaik, seperti terlihat dalam

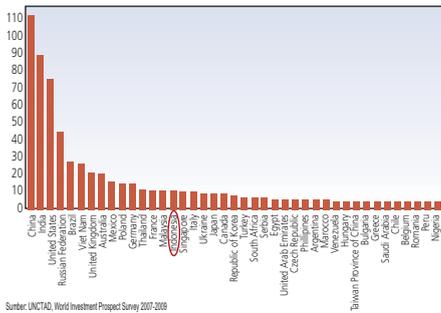
8 UNCTAD, World Investment Prospects Survey 2007-2009.

9 World Investment Report 2007.

Tabel 2.7 Hasil Survei "Doing Business 2008"

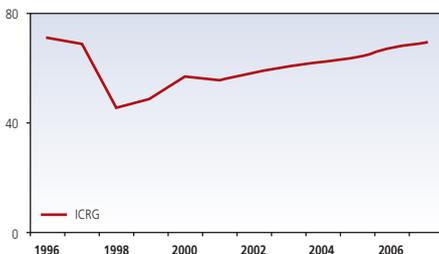
Economic	Year	Ease of Doing Business Rank	Starting Business		Dealing with Licenses		Registering Property		Protecting Investors	Enforcing Contracts		
			Rank	Time (days)	Rank	Time (days)	Rank	Time (days)		Rank	Time (days)	Cost (% debt)
Indonesia	2006	133	163	97	117	224	123	42	49	142	570	122,7
Indonesia	2007	123	168	105	99	196	121	42	51	141	570	122,7
Malaysia	2006	21	74	30	102	285	65	144	4	62	600	27,5
Malaysia	2007	24	74	24	105	285	67	144	4	63	600	27,5
Thailand	2006	17	27	33	11	156	19	2	32	26	479	14,3
Thailand	2007	15	36	33	12	156	20	2	33	26	479	14,3
Philippines	2006	130	135	58	75	177	81	33	141	113	842	26
Philippines	2007	133	144	58	77	177	86	33	141	113	842	26
Singapore	2006	1	11	6	5	102	13	9	2	5	120	17,8
Singapore	2007	1	9	5	5	102	13	9	2	4	120	17,8
India	2006	132	93	35	133	224	108	62	32	177	1,420	39,6
India	2007	120	111	33	134	224	112	62	33	177	1,420	39,6
Honduras	2006	126	143	44	98	184	89	36	147	126	480	30,4
Honduras	2007	121	135	21	72	125	78	24	147	124	480	30,4
Brazil	2006	113	120	152	95	316	109	47	62	112	616	16,5
Brazil	2007	122	122	152	107	411	110	45	64	106	616	16,5
Lesotho	2006	119	120	73	146	601	129	101	141	99	695	16,6
Lesotho	2007	124	126	73	146	601	132	101	141	99	695	16,6
Algeria	2006	125	119	24	104	240	153	51	62	120	630	17,4
Algeria	2007	125	131	24	108	240	156	51	64	117	630	17,4
Egypt	2006	152	126	19	165	249	147	193	105	146	1,010	25,3
Egypt	2007	126	55	9	163	249	101	193	83	145	1,010	25,3
China	2006	92	128	35	175	349	28	29	81	20	406	8,8
China	2007	83	135	35	175	336	29	29	83	20	406	8,8
Korea	2006	27	101	17	16	34	65	11	62	10	230	10,3
Korea	2007	30	110	17	22	34	68	11	64	10	230	10,3

Sumber: World Bank



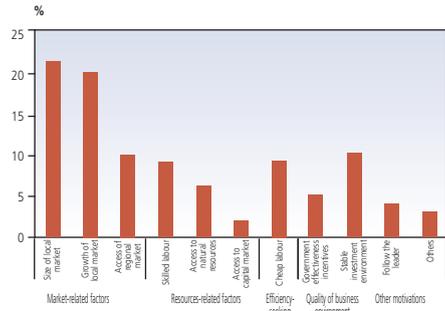
Grafik 2.11 Lokasi Paling Menarik Penempatan FDI (jumlah respon)

peringkat indeks risiko yang dikeluarkan International Country Risk Guide (ICRG) seperti terlihat pada Grafik 2.12. Daya tarik yang lain adalah Indonesia dianggap memiliki potensi pasar yang besar, seperti terlihat pada hasil survei WEF di atas yang menempatkan *market size* Indonesia pada posisi 15 dari 131 negara. Dalam survei UNCTAD juga disebutkan bahwa besarnya pasar dan pertumbuhan pasar bersama dengan kualitas lingkungan usaha menjadi determinan utama dalam menentukan lokasi penempatan FDI (lihat Grafik 2.13).¹⁰



Grafik 2.12 Indeks Risiko

¹⁰ Hasil riset Kurniati, Prasmuko dan Yanfitri (2007) menyatakan bahwa determinan FDI ke Indonesia dan *emerging Asia* adalah potensi pasar, masalah efisiensi terkait dengan tenaga kerja dan infrastruktur, dan stabilitas finansial yang tercermin dari stabilitas nilai tukar serta adanya insentif investasi yang dapat tercermin dari terlibatnya *home and host countries* dalam perjanjian bilateral atau regional.

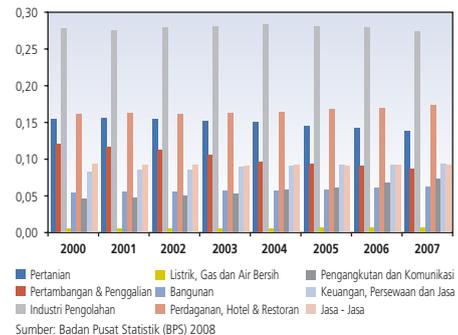


Sumber: Hasil survey UNCTAD, World Investment Prospect Survey 2007-2009

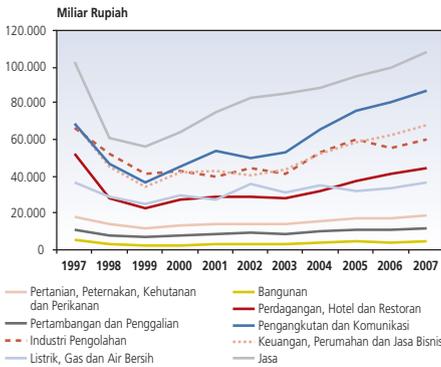
Grafik 2.13 Kriteria Penentuan Lokasi Penempatan FDI (Persentase Respon)

2.2.2. Perkembangan Sektoral Ekonomi Nasional

Berdasarkan data BPS, sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi, meskipun cenderung mengalami penurunan pangsa dalam PDB, dari 15,2% pada 2003 menjadi 12,9% pada 2006 (lihat Grafik 2.14). Kendala yang dihadapi adalah rendahnya investasi dalam rangka penyediaan dan perbaikan infrastruktur. Dari Grafik 2.15, terlihat bahwa pembentukan modal untuk sektor pertanian pada 2007 hanya Rp 19 Triliun (4,3%) dari total Rp 438 Triliun untuk seluruh industri. Namun dalam 40 tahun terakhir pertumbuhan pertanian Indonesia mengalami



Grafik 2.14 Perkembangan Pangsa Sektoral PDB

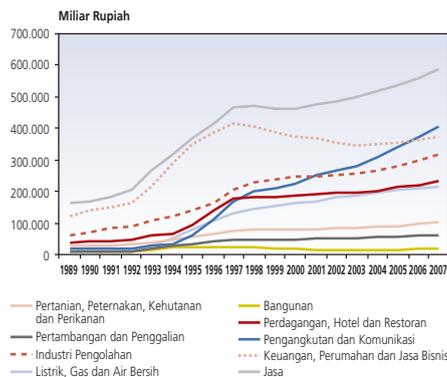


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 2.15 Perkembangan Investasi Sektoral

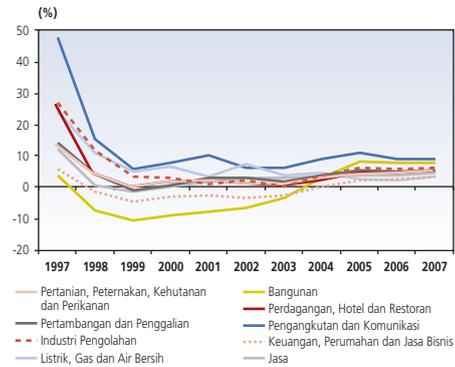
perlambatan. Pergeseran sektoral telah terjadi dimana penurunan pangsa sektor pertanian dibarengi peningkatan pangsa industri pengolahan. Untuk negara maju seperti Jepang dan USA, pergeseran terjadi ke arah peningkatan pangsa sektor jasa bisnis.

Indonesia menempati peringkat 20 negara eksportir pertanian namun sayangnya justru kalah dari negara-negara dengan luas lahan pertanian yang lebih sempit. Data 2005 menunjukkan terjadinya peningkatan volume ekspor pertanian yang diikuti pula dengan kenaikan impor dengan jumlah lebih besar. Meski secara volume defisit



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 2.16 Dinamika Stok Kapital Sektoral



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 2.17 Pertumbuhan Stok Kapital Sektoral

akan tetapi dari sisi nilai, neraca komoditas pertanian masih menunjukkan surplus dari waktu ke waktu. Saat ini, volume ekspor karet Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan menduduki peringkat ke-2 dunia setelah Thailand. Indonesia juga merupakan negara pengekspor CPO terbesar kedua setelah Malaysia, namun pertumbuhan eksportnya saat ini lebih cepat dari Malaysia.

Produksi padi mengalami perlambatan pertumbuhan dari waktu ke waktu, sehingga menyebabkan swasembada beras yang diraih oleh Indonesia pada 1984 tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan Indonesia saat ini harus melakukan impor beras. Perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan luas baku lahan sawah khususnya di Pulau Jawa akibat konversi lahan yang diperuntukkan di luar sektor pertanian. Penyebab lain adalah stagnasi atau bahkan penurunan produktivitas lahan akibat tidak adanya inovasi baru dan memburuknya tingkat kesuburan tanah, rusaknya jaringan serta sumber irigasi.

Survei Pemetaan Sektor Ekonomi (SPSE) 2005 menunjukkan terdapat 12 komoditas pertanian unggulan yang menjadi penggerak utama sektor pertanian, memberikan sumbangan

lebih dari 80% output sektor pertanian primer dan merupakan komoditas input yang dominan terhadap sektor agro industri. Sementara berdasarkan kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 2006 telah ditetapkan 5 komoditas unggulan pertanian yaitu kelapa sawit, kopi, karet, coklat, serta ikan dan udang.

Subsektor perkebunan kelapa sawit (CPO), karet, kakao, dan gula memiliki prospek yang cerah di pasar internasional dengan daya saing yang semakin meningkat. Tiga faktor fundamental yang mendasarinya yaitu keberhasilan pertemuan WTO di Hong Kong yang menyepakati bahwa semua bentuk subsidi ekspor pada sektor pertanian sudah harus dihapuskan paling lambat tahun 2013, negara-negara pesaing menghadapi tekanan untuk melakukan reformasi sektor pertanian dengan mengurangi dukungan harga, subsidi dan proteksinya secara substansial serta kecenderungan kenaikan BBM.

Pertumbuhan tahunan sektor pertambangan dan penggalian sangat berfluktuasi terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan pada sub sektor pertambangan migas. Peran sektor pertambangan walaupun relatif kecil dalam PDB (10,6% pada 2006) dan cenderung tumbuh lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi (5% pada 2006) namun berperan strategis dalam penyediaan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Di samping itu subsektor pertambangan migas masih berperan besar dalam penerimaan APBN.

Investasi di sektor pertambangan relatif rendah dibandingkan sektor lain (Rp 11 Triliun atau 2,6% pada 2007). Hal tersebut juga dikonfirmasi dengan data pemberian persetujuan PMDN dan PMA (BKPM), data kredit investasi serta hasil survei Price Waterhouse Cooper. Nilai PMDN dan PMA

yang disetujui cenderung mengalami tren penurunan. Hasil survei dimaksud menyatakan bahwa pengeluaran investasi pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara mengalami penurunan dan mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2002.

Terdapat 10 komoditas unggulan di sektor pertambangan yaitu minyak dan gas bumi di subsektor migas dan batubara, tembaga, emas, perak, timah, nikel, bauksit dan bijih besi di subsektor non migas. Selain karena memiliki *linkage* yang tinggi, komoditas-komoditas tersebut perlu didorong untuk meningkatkan produksinya karena berdaya saing tinggi. Subsektor pertambangan migas masih mendominasi proporsi sektor pertambangan (53% pada 2007) meskipun memiliki tren menurun. Penurunan produksi migas perlu diwaspadai dengan jalan meningkatkan investasi di sektor pertambangan sembari mengurangi tingkat konsumsi migas dalam negeri.

Sumber daya dan cadangan sektor pertambangan terutama batubara, gas, minyak bumi masih cukup potensial untuk dikembangkan. Perkembangan produksi minyak mentah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir akibat sumur-sumur sudah banyak yang tua sementara pengembangan dalam skala yang luas sangat minim. Negara-negara non OPEC seperti Rusia, Angola, Brazil, Azerbaijan, AS, dan Kanada diperkirakan akan terus meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Pada subsektor migas masih dijumpai sejumlah hambatan yang terkait dengan kebijakan atau peraturan seperti pungutan pajak, ketentuan dalam kontrak kerjasama, ketenagakerjaan, masalah sosial dan lingkungan hidup. Pada subsektor nonmigas masih terdapat tantangan

terkait dengan kebijakan lintas sektoral yang tumpang tindih, implementasi otonomi daerah yang tidak mendukung, pungutan negara pajak maupun non pajak, minimnya pembiayaan perbankan serta masalah yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Secara sektoral, penyumbang PDB terbesar adalah sektor industri pengolahan (28% pada 2007) namun stok kapital neto tertinggi justru dimiliki oleh sektor jasa (25,3%). Hal ini terkait dengan kebutuhan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi di segala bidang, misalnya untuk transaksi keuangan.

Secara umum peran sektor industri nonmigas dalam perekonomian nasional masih dominan walaupun sempat mengalami penurunan selama periode krisis. Pada 2007, pangsa sektor industri non migas ini mencapai 22,8% dari total PDB, dibandingkan pangsa industri migas yang hanya 5,2%. Namun sektor ini tetap sensitif terhadap gejala permintaan eksternal, dan masih dilingkupi persoalan rendahnya daya saing serta rendahnya tingkat investasi. Dilihat dari segi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja maupun pemerataan pembangunan, peran ini masih lebih rendah dibandingkan pada periode pra krisis. Hal ini disebabkan karakteristik industri nonmigas yang dominan dalam melayani pasar domestik tetapi memiliki tingkat ketergantungan impor yang tinggi, sensitivitas sektor industri terhadap gejala permintaan eksternal yang masih tinggi, rendahnya daya saing, serta minimnya tingkat investasi. Komoditas nonmigas yang memiliki daya saing dan nilai tambah cukup tinggi antara lain Minyak Kelapa Sawit (CPO) serta beberapa komoditas tekstil dan TPT.

2.2.3. Perkembangan Kebijakan Sektor Riil dan Ekonomi Makro

Sinergi kebijakan Pemerintah dan otoritas moneter berhasil menjaga stabilitas makro yang merupakan prasyarat bagi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan dan berkualitas.

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Melalui Menko Perekonomian, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Inpres ini meliputi: 1) Perbaikan Iklim Investasi, 2) Reformasi Sektor Keuangan, 3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan 4) Pemberdayaan UMKM. Namun realisasi Inpres ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Kemajuan pelaksanaan Inpres ini sampai dengan pertengahan tahun lalu dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Dari sisi kebijakan fiskal, dalam rangka memberi daya dukung pada pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah melalui Departemen Keuangan sejak 2006 mengubah orientasi fiskalnya menjadi bersifat stimulasi. Stimulus fiskal tersebut dilakukan

Tabel 2.8 Kemajuan Pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2007

Agenda	Rencana Tindak	Dapat Diselesaikan
Perbaikan Iklim Investasi	49	40
Reformasi Sektor Keuangan	36	28
Percepatan Pembangunan Infrastruktur	40	13
Pemberdayaan UMKM	34	28

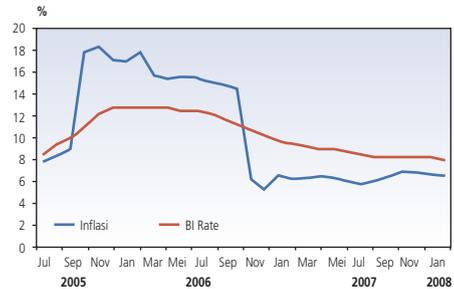
Sumber: Kantor Menko

dalam bidang perpajakan, pengeluaran rutin serta belanja modal yang didorong agar dapat meningkatkan infrastruktur dasar sebagai prasyarat percepatan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas, stimulasi juga dilakukan terhadap perekonomian daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) tetap secara konsisten mengarahkan kebijakannya untuk mencapai stabilitas harga melalui penerapan *Inflation Targeting Framework (ITF)*. Kondisi ekonomi makro yang stabil dan inflasi yang terkendali menjadi dasar dilaksanakannya penurunan BI Rate secara bertahap oleh otoritas moneter. Penurunan tersebut dimaksudkan untuk memberi stimulasi bagi sektor riil dan insentif yang lebih besar bagi perbankan untuk dapat menurunkan suku bunga kreditnya guna mendorong kenaikan permintaan domestik lebih lanjut.

Dalam rangka mencapai stabilitas harga, sinergi antara otoritas fiskal dan moneter antara lain terlihat dalam penetapan sasaran inflasi yang ditetapkan secara bersama antara Pemerintah dan BI. Secara eksplisit, kerja sama antara Pemerintah

dan BI ini tertuang dalam Nota Kesepakatan tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi di Indonesia tanggal 1 Juli 2004. Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Keuangan No.339/KMK.011/2004 tanggal 6 September 2004, disebutkan bahwa periode sasaran inflasi yang ditetapkan adalah 3 tahun dan jenis sasaran yang digunakan adalah inflasi IHK tahunan (yoy). Penetapan target pertama kali adalah tahun 2005-2007, dimana target masing-masing tahun adalah 6,5; 5,5; dan 4,5% dengan toleransi deviasi sebesar $\pm 1\%$. Pada perjalanannya target tersebut direvisi untuk periode 2005-2008 menjadi 8,0%; 6,0% dan 5,0% dengan deviasi $\pm 1\%$ pada 17 Maret 2006. Pencapaian inflasi yang rendah dipandang penting untuk membantu mempertahankan daya beli masyarakat.



Grifik 2.18 BI Rate dan Inflasi

Bab 3: Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia

Mempertimbangkan konstelasi perekonomian dunia dan Indonesia selama lima tahun terakhir, faktor eksternal menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Hal ini terkait dengan semakin terbukanya perekonomian Indonesia, baik terhadap ekonomi dunia maupun ekonomi kawasan. Perkembangan signifikan yang terjadi di tingkat kawasan yang perlu dicermati adalah rencana pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, yang memiliki tujuan tercapainya suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Mengingat pentingnya perkembangan di kawasan Asia Tenggara tersebut, berikut akan dikaji implikasi MEA terhadap perekonomian Indonesia.

Globalisasi telah menjadi topik yang banyak diperbincangkan dalam dua dekade terakhir, umumnya secara antusias dan bersemangat, namun kadang dibayangi oleh kekhawatiran dan kekecewaan. Globalisasi, yang tidak lain berarti integrasi ekonomi secara menyeluruh, akan segera menampakkan bentuknya di mata negara-negara ASEAN dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perkembangan dunia internasional setelah Perang Dunia II diwarnai dengan fenomena maraknya perjanjian ekonomi regional di berbagai belahan dunia, menuju ke arah globalisasi. Menurut laporan WTO, hingga tahun 2006 terdapat sekitar 200 perjanjian ekonomi regional di seluruh dunia yang berjalan efektif, dan masih ada sejumlah lagi yang masih berada dalam taraf negosiasi. Volume perdagangan antar negara yang

terlibat dalam perjanjian ekonomi regional sekarang telah melebihi separuh dari total perdagangan global, meningkat dari hanya sekitar 20% pada tahun 1960.¹ Perjanjian ekonomi regional yang terbesar sampai saat ini adalah North American Free Trade Area (NAFTA) dan European Community (EC).

Secara teoritis, integrasi ekonomi menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi negara-negara di dalamnya, di antaranya melalui pembukaan akses pasar lebih besar, dorongan mencapai efisiensi dan daya saing ekonomi lebih tinggi, termasuk terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Hal ini juga didukung oleh banyaknya hasil empiris yang menunjukkan adanya hubungan positif antara integrasi ekonomi dunia dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, tidak sedikit pula yang berpendapat sebaliknya, dimana integrasi ekonomi hanya memberi dampak positif pada negara-negara yang lebih maju.

Penandatanganan Deklarasi ASEAN di Singapura pada 20 November 2007 tentang MEA 2015 menandai babak baru dalam sejarah kerjasama regional ASEAN. Disahkannya deklarasi yang memuat cetak biru (*blue print*) langkah-langkah menuju MEA 2015 tersebut memberi implikasi bahwa integrasi ekonomi ASEAN telah menjadi suatu komitmen yang tak dapat ditawar lagi. Secara ringkas, MEA adalah transformasi ASEAN menjadi sebuah wilayah dimana barang, jasa, dan tenaga kerja terampil dapat bergerak bebas tanpa batas yang didukung dengan

1 Lihat WTO News & Views, July-September 2006, Vol. 2 No.3

pergerakan modal yang lebih bebas. Dampak dari perubahan ini adalah terciptanya konfigurasi baru distribusi output produksi dan faktor produksi perekonomian intra ASEAN.

Pertanyaan yang sangat krusial kemudian adalah sejauh mana perubahan ini akan berimplikasi pada perekonomian nasional. Pertanyaan ini akan coba dijawab dengan meninjau dampak MEA terhadap beberapa aspek, yaitu dampak terhadap perdagangan, kondisi ketenagakerjaan, serta investasi, pertumbuhan, dan pengentasan kemiskinan. Ada kajian yang mampu dilakukan secara empiris, namun sejumlah aspek, seperti dampak terhadap kondisi ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan akan coba dijawab secara konseptual teoritis mengingat belum tersedianya data yang dapat diinterpretasikan secara empiris. Selain itu, tinjauan teoritis juga akan coba dilakukan untuk mengkaji pembagian kue ekonomi antar-anggota ASEAN, pasca-integrasi. Terakhir, peran otoritas moneter dalam implementasi MEA 2015 juga akan dibahas. Dalam hal ini akan dikaji apakah kebijakan moneter BI yang terfokus pada komitmen pencapaian inflasi yang rendah dan ekonomi makro yang stabil merupakan kebijakan moneter yang akan membantu Indonesia memetik manfaat optimal dari terbentuknya MEA.

3.1. Latar Belakang Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada dasarnya adalah perluasan dari integrasi ekonomi regional yang telah dimulai beberapa tahun silam, tepatnya pada saat pembentukan AFTA tahun 1992. Kerangka besar dari integrasi ekonomi regional kemudian dirumuskan pada *ASEAN Summit* tahun 1997 di Kuala Lumpur yang

menghasilkan Visi ASEAN 2020, yaitu: **tercapainya suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.**

Dalam ASEAN Summit di Bali tahun 2003, ditetapkan 3 (tiga) pilar guna merealisasikan visi ASEAN tersebut yaitu: **ASEAN Economic Community (AEC)-MEA, ASEAN Security Community, ASEAN Socio-Cultural Community.** Pertemuan juga menyepakati MEA paling lambat sudah terwujud pada 2020. Selain itu, pertemuan tersebut juga menyepakati **11 sektor yang diprioritaskan (terdiri dari 7 barang dan 4 jasa-jasa) yang ditargetkan mencapai integrasi pada 2010.** Kemudian pada tahun 2005 ditambah satu lagi sektor prioritas yaitu *logistic services*. Adapun sembilan di antara sektor-sektor tersebut menyumbang lebih dari 50 persen perdagangan barang di ASEAN. **Selengkapnya daftar barang dan jasa yang diprioritaskan adalah: 1) Agro-based products, 2) Automotive, 3) Electronics, 4) Fisheries, 5) Rubber-based products, 6) Textiles & apparels, 7) Wood-based products, 8) Air travel, 9) E-ASEAN, 10) Healthcare, 11) Tourism dan 12) Logistic services.**

Beberapa pertemuan setelah itu selanjutnya mulai membahas *draft* cetak biru (*blueprint*) MEA yang memuat karakteristik, elemen, rencana aksi prioritas, target dan jadwal pencapaian MEA dengan 4 (empat) pilar sebagai berikut:

- 1) *Single market and production base*, yang meliputi: *free flow of goods, services, investment, skilled labor and freer flow of capital, Priority Integration Sectors, and food, agriculture and forestry.*
- 2) *Competitive economic region*, yang meliputi: *competition policy, consumer protection,*

Intellectual Property Rights (IPR), infrastructure development, energy, taxation, e-commerce.

- 3) *Equitable economic development*, yang meliputi: *SME development, initiative for ASEAN integration.*
- 4) *Full integration into global economy*, yang meliputi: *coherent approach toward external economic relations, enhanced participation in global supply networks.*

Selanjutnya, dalam **ASEAN Summit pada bulan Januari 2007 telah disepakati untuk mempercepat pembentukan MEA dari 2020 menjadi 2015.** Beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah: (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN untuk barang konsumsi hingga 20 persen sebagai dampak integrasi ekonomi,² (ii) peningkatan kemampuan kawasan dengan adanya implementasi standar dan praktek internasional serta penerapan *intellectual property rights* (iii) peningkatan kualitas infrastruktur kawasan seiring dengan integrasi transportasi, telekomunikasi dan energi (iv) peningkatan manfaat bagi sektor swasta ASEAN. Pada ASEAN Summit November 2007, draft cetak biru MEA akhirnya disetujui dan ditandatangani oleh semua Kepala Negara ASEAN.

Pencapaian keempat pilar dalam MEA akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus saat ini pada pencapaian pilar pertama, yaitu terciptanya liberalisasi di perdagangan barang, jasa, dan investasi. Tercapainya pilar pertama akan menjadi dasar menuju pencapaian pilar-pilar selanjutnya, sehingga pada akhirnya ASEAN akan siap untuk sepenuhnya berintegrasi dengan perekonomian global.

Harapan bahwa pada akhirnya dapat sepenuhnya berintegrasi dengan perekonomian global sekaligus menunjukkan keyakinan ASEAN bahwa kerjasama regional dalam MEA merupakan **"building blocks"** menuju tercapainya perdagangan bebas multilateral.³ Kerjasama regional yang dilakukan akan mendorong terciptanya keunggulan komparatif bagi kawasan secara keseluruhan, sehingga pada akhirnya akan memperbesar kesempatan masing-masing negara dalam persaingan global. Selain itu, kerjasama regional yang dijalankan ASEAN juga bersifat terbuka, yang berarti bahwa bersamaan dengan penurunan tarif dan hambatan di sesama negara anggota (*preferential liberalization*), negara-negara ASEAN juga melakukan penurunan tarif dan hambatan perdagangan terhadap semua negara di dunia (*unilateral liberalization*).⁴

Untuk perdagangan barang, ASEAN sudah mencapai kemajuan cukup berarti dalam hal penghapusan tarif melalui skema ASEAN Free Trade Area Common Effective Preferential Tariff (AFTA CEPT). Sebagai gambaran, pada 2006 rata-rata tarif CEPT untuk negara ASEAN-6 sudah tinggal 1,74%, untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) 4,65% dan untuk seluruh negara ASEAN-10 sebesar 2,82%.⁵ Oleh karena itu, cetak biru MEA untuk perdagangan barang akan difokuskan pada hal-hal seperti pengurangan

2 Studi oleh A McKinsey & Company, publikasi ASEAN Secretariat "An ASEAN Economic Community by 2015", 23 Januari 2007.

3 Hal ini terkait dengan kajian Bhagwati (World Trading System at Risk, Princeton, 1990) yang terkenal dengan pertanyaan: apakah kerjasama regional (*preferential trading arrangements*) akan menjadi "building blocks" atau "stumbling blocks" dari proses menuju perdagangan bebas multilateral.

4 Soesastro, Hadi, Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi, dan Semua Itu, CSIS Working Paper Series, Maret 2004

5 Pangestu, Mari E., "AEC Blueprint: Tantangan bagi Indonesia", CSIS Jakarta, 2 November 2007

hambatan non-tarif, perbaikan sistem kepabeanan, dan penyeragaman dalam standar produksi.

Untuk perdagangan jasa, liberalisasi sektor jasa akan dilakukan dalam kerangka ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang sebenarnya telah dideklarasikan sejak tahun 1995. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah mengkompilasi berbagai hambatan dalam pergerakan jasa antar negara, penyusunan MRA (*Mutual Recognition Agreement*) untuk jasa arsitektur, akuntansi, kualifikasi surveyor, tenaga kerja medis termasuk di antaranya dokter gigi (ditargetkan selesai 2008), dilanjutkan MRA untuk jasa-jasa profesional lainnya (selesai 2015), serta peningkatan partisipasi asing dalam 4 (empat) sektor jasa (hingga 51%) serta jasa logistik (hingga 49%) pada tahun 2008.⁶

Dalam bidang investasi, langkah-langkah yang dilakukan pada dasarnya memperkuat kerangka yang sudah ada yaitu Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (AIA) yang sudah ditetapkan pada 1998 menjadi suatu kerangka yang lebih komprehensif, yaitu ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Termasuk di dalamnya adalah pencabutan semua restriksi dalam bidang investasi (2008-2009), peningkatan semua fasilitas penunjang kegiatan investasi seperti *database* FDI, jejaring antara ASEAN Investment Promotion Agencies, serta *database* untuk kluster-kluster industri.

Dalam hal tenaga kerja terlatih (*skilled labor*), penyusunan MRA untuk tenaga kerja profesional

6 *Mutual recognition agreement (MRA)* merupakan perjanjian internasional antara dua negara atau lebih yang menyepakati untuk mengakui penilaian kecocokan satu sama lain. Penilaian kecocokan merupakan kegiatan dalam menentukan, langsung atau tidak langsung, sebuah proses, produk, atau jasa memenuhi standar dan kebutuhan yang relevan.

(termasuk yang berada dalam daftar sektor yang diprioritaskan) ditargetkan akan selesai pada 2008.

Dalam *Blueprint* MEA 2015 *skilled labor* didefinisikan sebagai berikut: 1) Pekerja yang mempunyai keterampilan khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidang pekerjaannya; 2) Lulusan Universitas, akademi, sekolah teknik, atau keahlian yang diperoleh melalui pekerjaan sehari-hari. Adapun langkah-langkah terkait dengan mobilitas faktor produksi tenaga kerja dalam *Blueprint* MEA 2015 secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan mobilitas atau fasilitas masuk bagi tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang biasa digunakan oleh negara penerima. ASEAN akan memfasilitasi penerbitan visa dan kartu pekerja bagi tenaga profesional ASEAN dan tenaga kerja terampil.
- b. Untuk memudahkan arus bebas jasa-jasa pada 2015, ASEAN melakukan upaya harmonisasi dan standardisasi melalui:
 - Kerja sama diantara anggota ASEAN University Network (AUN) untuk meningkatkan mobilitas pelajar dan staf jajarannya.
 - Penyusunan indeks *core competencies* (sesuai dengan keahlian dan kualifikasi) untuk pekerjaan dan *trainers skills* di sektor jasa prioritas (2009) dan sektor jasa lainnya (2010-2015).
 - Memperkuat riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja.

3.2. Dinamika Perekonomian ASEAN

Sebagai satu kesatuan wilayah, ASEAN menjanjikan potensi ekonomi yang sangat besar.

Dengan total jumlah penduduk mencapai 567,6 juta orang (bandingkan dengan Uni Eropa yang mendekati 500 juta orang), dan total GDP mencapai sekitar US\$1,1 triliun, ASEAN menjanjikan potensi pasar yang sangat besar. Selain itu, pangsa total perdagangan terhadap GDP dari masing-masing negara ASEAN juga cukup tinggi, yang menunjukkan aktifnya kawasan ini dalam perdagangan internasional. Dari sisi aliran modal internasional, kawasan ASEAN juga dipandang sangat menarik, seperti terlihat dari aliran masuk FDI yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus menunjukkan besarnya potensi ASEAN sebagai *production base*. Kondisi ini didukung pula dengan melimpahnya jumlah tenaga kerja. Potensi ASEAN tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Meskipun menyimpan potensi yang sangat besar sebagai satu kawasan, kondisi ASEAN sayangnya juga diwarnai oleh kesenjangan yang sangat besar. Dari sisi pendapatan per kapita,

terdapat variasi yang besar pada tingkat pendapatan per kapita dari negara-negara ASEAN. Di sisi ekstrem yang tinggi adalah Brunei Darussalam, dengan pendapatan per kapita sebesar USD30.200 per tahun atau hampir 150 kali Myanmar yang hanya sebesar USD200 per tahun. Peringkat pendapatan di antara negara-negara ASEAN secara praktis juga tidak berubah sejak pertengahan 1970-an. Dari sisi inflasi, ada negara yang hanya mencatat inflasi sekitar 1%, bahkan ada yang mencatat deflasi, sementara beberapa negara masih berkuat di sekitar 6-7%. Profil ketenagakerjaan juga menunjukkan gambaran serupa, dimana Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar memiliki angka pengangguran sekitar 10%, jauh di atas negara-negara lainnya. Sejalan dengan profil tingkat pengangguran, kesenjangan kualitas tenaga kerja juga tergambar dari disparitas angka produktivitas tenaga kerja yang cukup besar. Sebagai contoh, tingkat produktivitas Singapura

Tabel 3.1 Beberapa Indikator Ekonomi ASEAN*

Negara	Populasi	Inflasi (yoy)	GDP per kapita		Tingkat Pengangguran	Perdagangan Barang		FDI Net Inflow (yoy)	
			US\$	US\$ PPP		Rasio Ekspor terhadap GDP	Rasio Impor terhadap GDP	juta US\$	persen
	Juta	persen	2006	2006	persen	2006	2006	2005-2006	2005-2006
Brunei Darussalam	0,38	-0,7	30,213,6	25,094,1	4,0	65,8	12,9	145,0	50,2
Kamboja	14,16	2,8	512,3	3,226,0	0,8	48,4	40,3	102,0	26,8
Indonesia	222,05	6,6	1,640,4	4,321,3	10,5	27,7	16,8	(2,779,8)	(33,4)
Laos	6,14	4,7	574,0	2,332,1	-	11,4	16,7	159,7	575,8
Malaysia	26,69	3,1	5,880,4	12,184,9	3,0	100,2	81,8	2,094,9	52,8
Myanmar	57,29	-	208,6	1,958,8	-	29,4	17,7	(92,9)	(39,4)
Filipina	86,91	4,3	1,351,5	5,332,7	8,1	40,4	44,1	491,0	26,5
Singapura	4,48	0,8	29,499,6	32,379,6	2,7	205,3	180,3	9,053,5	60,4
Thailand	65,23	3,5	3,167,8	9,163,5	1,3	58,8	61,5	1,799,1	20,1
Vietnam	84,22	6,6	723,9	3,373,3	5,3	60,8	66,0	339,2	16,8
ASEAN	567,60	-	1,890,3	5,210,2	n,a	70,0	61,0	11,311,7	27,5

* as of 15 September 2007
Sumber: ASEAN Secretariat

Tabel 3.2 Produktivitas Tenaga Kerja ASEAN (Output per TK Beberapa Negara ASEAN)

Negara	1990	1995	2000	2003	2004	2005
Kamboja	2296	2297	3037	2732	2714	2845
Indonesia	5945	8205	7588	8321	8656	922
Malaysia	13434	18473	19254	19953	21128	22112
Myanmar	1959	2328	3017	3819	4172	4541
Filipina	6348	6195	6952	6797	7164	7271
Singapura	28191	38888	42888	46235	49457	47975
Thailand	8291	11871	11984	13135	13541	13915
Vietnam	2346	3094	3803	4328	4553	4809

Sumber: ILO

mencapai hampir 17 kali Kamboja, 10,6 kali Myanmar, dan 10 kalinya Vietnam (lihat Tabel 3.2). Dari sisi aliran modal internasional, aliran FDI terbesar didominasi oleh Singapura, jauh melebihi angka yang mampu dicatat negara-negara lainnya. Hal ini sejalan dengan variasi pada kondisi iklim bisnis, dimana Singapura hanya membutuhkan 5 hari untuk memulai bisnis, sementara Indonesia dan Laos masing-masing membutuhkan 105 dan 103 hari.

Dilihat dari sisi perdagangan antar ASEAN, prospek perdagangan dalam kawasan ini sangat menjanjikan. Pangsa total perdagangan intra ASEAN memang masih terbilang kecil bila dibandingkan dengan pangsa ekstra ASEAN. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir

pangsa perdagangan intra ASEAN terus mengalami peningkatan. Pada 2006 pangsa perdagangan intra ASEAN mencapai 24,9%, jauh melampaui pangsa ekspor ASEAN ke AS dan Eropa, masing-masing sebesar 14,1% dan 13,0% (Tabel 3.3 dan 3.4). Dari segi jenis barang yang diperdagangkan, perdagangan intra ASEAN didominasi oleh *intermediate goods*, yaitu sebanyak 65% dari total ekspor intra ASEAN, jauh di atas pangsa *capital goods* (12%) dan *consumption goods* (9%), lihat Tabel 3.5.

Perdagangan antar negara ASEAN berdasarkan hasil penghitungan Indeks *Intra Industry Trade* (IIT) menunjukkan keterkaitan yang cukup tinggi.⁷ Hasil pengolahan data perdagangan lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dari UN COMTRADE selama 2002-2006 memperlihatkan bahwa tingkat IIT sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam integrasi ASEAN

7 Perdagangan Intra Industri merupakan perdagangan antara komoditas yang berbeda namun masih dalam jenis industri yang sama. Untuk mengukur hal tersebut, dilakukan perhitungan Indeks *Intra Industry Trade* (IIT) yang dirumuskan sbb : $IIT = \left[1 - \frac{X_{j,-M_j}}{X_{j,+M_j}} \right] \times 100$

Tabel 3.3 Pangsa Ekspor Total Negara Asal ke Kawasan Terhadap Total Perdagangan Negara Asal

Pangsa Perdagangan Intra Regional Terhadap Perdagangan Dunia			Negara Asal	Tujuan Ekspor (Pangsa terhadap Total Perdagangan di Negara Asal)											
				G3			Neg. Berkembang Asia			ASEAN+4			ASEAN		
1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006	
4,5	7,1	10,1	Neg. Berkembang Asia ASEAN ASEAN+4 Indonesia	53,1	50,0	41,6	33,1	37,9	43,6	43,8	44,8	48,5	11,2	12,8	12,9
0,8	1,4	1,6		54,3	49,0	37,7	34,9	41,2	50,3	48,8	47,7	56,4	18,9	21,7	24,9
7,2	9,5	12,1		51,7	49,5	41,1	33,3	38,1	43,7	36,6	40,3	46,1	11,6	13,2	12,8
n,a	n,a	n,a		67,9	50,7	43,1	25,1	37,5	45,0	63,7	54,0	58,5	10,0	17,0	20,3

Sumber: IMF Direction of Trade Statistics, diolah. Sebagai tujuan ekspor ASEAN+4, G3 tidak termasuk Jepang

Tabel 3.4 Pangsa Ekspor Total Negara Asal ke Negara Tujuan Terhadap Total Perdagangan Negara Asal

Negara Asal	Tujuan Ekspor (Pangsa terhadap Total Perdagangan Negara Asal)														
	AS			Euro			Jepang			Cina			India		
	1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006
Neg. Berkembang Asia	21,9	21,9	16,9	16,9	17,0	16,2	14,3	11,1	8,5	15,7	17,4	22,2	0,7	1,0	1,6
ASEAN	19,4	20,1	14,1	16,0	16,5	13,0	18,9	12,4	10,6	6,4	8,6	14,8	1,2	1,7	2,4
ASEAN+4	25,1	24,4	18,2	18,2	17,2	16,0	8,4	7,8	6,9	5,0	7,7	10,8	0,7	0,9	1,5
Indonesia	13,1	14,2	11,5	12,3	15,1	12,2	42,5	21,4	19,4	5,7	6,9	9,3	0,2	1,9	3,2

Sumber: IMF Direction of Trade Statistics, diolah.

cukup tinggi. Sektor yang mencatat IIT tertinggi diantaranya adalah sektor Elektronika, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technology-ICT*), Produk berbasis Kayu (*Wood-based Product*), serta Otomotif (Tabel 3.6). Tingginya tingkat IIT menunjukkan adanya keterkaitan antar industri di ASEAN, sehingga sangat mendukung proses integrasi ekonomi ASEAN. Untuk Indonesia, tingkat IIT tertinggi ditemukan pada Produk Kesehatan (*Healthcare Products*) dan Otomotif (Tabel 3.7)

3.3. Tinjauan Konseptual Teoretis Integrasi Ekonomi

Perdagangan internasional telah cukup lama menjadi salah satu subjek yang banyak menyita perhatian dalam perkembangan teori ekonomi. Beberapa ekonom yang mendalami masalah ini diantaranya adalah David Ricardo, yang terkenal dengan teori keunggulan komparasi (*Ricardian Model*) dan Heckscher-Ohlin dengan *Heckscher-Ohlin Model* yang mengedepankan perbedaan sumber daya sebagai faktor pendorong terciptanya perdagangan antar-negara. Meskipun demikian,

Tabel 3.5 Pangsa Ekspor Komoditas Negara Asal ke Negara Tujuan Terhadap Total Ekspor Negara Asal

Negara Asal	Negara Tujuan Ekspor (Pangsa terhadap Total Perdagangan Negara Asal)											
	G3*)			Neg. Berk. Asia			ASEAN + 4			ASEAN		
	1995	1999	2006	1995	1999	2006	1995	1999	2006	1995	1999	2006
Neg. Berkembang Asia												
Capital Goods	17	18	24	13	12	17	13	12	17	16	13	16
Intermediate Goods	40	39	40	67	67	66	63	62	64	67	68	62
Consumptions Goods	42	39	32	18	16	10	23	21	13	16	13	10
ASEAN												
Capital Goods	23	21	19	15	12	12	15	13	12	16	13	12
Intermediate Goods	51	53	58	68	69	69	66	67	70	67	69	65
Consumptions Goods	25	23	20	15	11	7	18	14	8	15	12	9
ASEAN+4												
Capital Goods	21	21	24	19	15	18	17	14	18	20	16	16
Intermediate Goods	43	40	40	66	68	66	63	64	65	66	68	64
Consumptions Goods	29	29	27	13	12	9	18	17	11	11	10	9
Indonesia												
Capital Goods	5	4	4	5	6	7	3	4	6	8	10	11
Intermediate Goods	65	61	67	80	77	82	80	79	83	70	68	72
Consumptions Goods	30	32	26	15	13	7	16	13	7	21	17	10

Sumber: UN Comtrade, diolah.

* Sebagai tujuan ekspor ASEAN+4, G3 tidak termasuk Jepang

Tabel 3.6 Indeks Intra-Industry Trade (IIT) Sesama ASEAN-5 per Sektor Dalam 5 Tahun

Sector	Total
ICT	92,86
Electronics	99,92
Healthcare Products	75,90
Textile and Garment	93,38
Automotive	90,12
Agro-based Products	84,22
Fisheries	78,33
Rubber-based Products	86,02
Wood-based Products	92,00

sumber: UN Comtrade, diolah

kajian tentang integrasi ekonomi secara khusus dipelopori oleh Viner (1950).⁸ Oleh Viner, dampak dari suatu integrasi ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan dijelaskan melalui konsep *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* terjadi apabila suatu negara dapat mengimpor barang dengan harga yang lebih murah dari negara lain dalam suatu kawasan integrasi ekonomi, sehingga secara keseluruhan kesejahteraan akan meningkat. Sementara itu, *trade diversion* terjadi apabila impor dari suatu negara yang berada di luar kawasan digantikan oleh negara lain yang berada dalam kawasan integrasi, karena produk dari negara lain dalam kawasan tersebut menjadi

8 Viner, J. 1950, *The Custom Union Issue*, New York, Carnegie Endowment for International Peace

lebih murah akibat adanya perlakuan khusus dalam penetapan tarif.

Bentuk kerjasama regional bervariasi menurut perbedaan tingkat integrasi ekonomi yang dilakukan. *Free Trade Agreement* (FTA) merupakan tahapan paling awal dari proses integrasi ekonomi. Dalam FTA, negara peserta bersepakat untuk menurunkan atau menghilangkan hambatan dalam perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, namun tetap dibebaskan menetapkan tarif perdagangannya sendiri terhadap negara bukan peserta FTA. Tahapan berikutnya dalam proses integrasi ekonomi adalah *Customs Union* (CU). Dalam CU, selain penetapan tarif *preferential* bagi sesama peserta, semua peserta juga menetapkan tarif impor yang sama terhadap negara non-anggota. Tahapan integrasi berikutnya adalah *Common Markets* (CM) atau pasar bersama. Dalam CM, negara peserta bersepakat mencabut semua penghalang dalam mobilitas modal dan tenaga kerja serta melakukan harmonisasi dalam peraturan dan hukum. Contoh CM yang cukup signifikan adalah Mercosur di Amerika Latin, yang antara lain melibatkan Brasil dan Argentina. Kerjasama regional yang paling komprehensif adalah *Economic Union* (EU), dimana negara peserta tidak saja bersepakat dalam menghilangkan semua

Tabel 3.7 Indeks Intra-Industry Trade (IIT) Indonesia per Sektor Dalam 5 Tahun

Sector	2002 - 2006				Total
	Malaysia	Filipina	Singapura	Thailand	
ICT	24.67	31.73	5.43	90.94	10.18
Electronics	78.33	31.14	48.31	86.70	74.71
Healthcare Products	49.45	49.74	42.85	51.59	80.80
Textile and Garment	9.23	5.16	26.18	78.99	32.95
Automotive	36.79	58.16	88.72	43.13	79.89
Agro-based Products	31.40	68.93	9.62	21.52	65.80
Fisheries	14.42	20.95	5.82	14.35	10.42
Rubber-based Products	49.56	8.01	39.22	86.89	47.84
Wood-based Products	18.73	19.12	78.15	92.85	52.87

sumber: UN Comtrade, diolah

hambatan perdagangan dan menjamin kebebasan mobilitas semua faktor produksi, namun juga sampai pada penyatuan kebijakan moneter dan fiskal. Contoh dari EU adalah Uni Eropa.

Manfaat yang ingin dicapai dari integrasi suatu kawasan tentu tidak hanya terbatas di sektor perdagangan saja. Harapan yang muncul dengan adanya MEA adalah bahwa dengan menggalakkan perdagangan intra regional dapat membantu meningkatkan kinerja pertumbuhan dari negara-negara anggota. Ekspansi perdagangan yang mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dapat membantu negara-negara yang kurang maju di ASEAN untuk mengejar ekonomi-ekonomi yang lebih maju di kawasan. Seperti yang dijumpai dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community* - EEC), terdapat tendensi terjadinya konvergensi pendapatan, bukan divergensi, diantara ekonomi-ekonomi yang menyatu melalui perdagangan internasional (Ben-David, 2000). Mengacu pada Baldwin dan Wyplosz (2004), dampak ekonomi pembentukan suatu integrasi kawasan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Dampak alokasi (*allocation effect*)

Integrasi ekonomi akan mendorong pelaku usaha di setiap negara untuk melakukan alokasi sumber daya yang dimilikinya secara lebih efisien. Kondisi ini akan tercapai melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

- (1) *Pro-competitive effect*. Dihapuskannya berbagai hambatan dalam perdagangan maupun mobilitas faktor produksi akan memicu persaingan dengan masuknya produsen dari luar negeri ke pasar domestik. Kondisi persaingan mendorong terciptanya *pro-competitive effect*, dimana

perusahaan dipaksa untuk terus menurunkan harga *mark-up*.

- (2) *Industrial restructuring* dan *scale effect*. Akibat persaingan yang makin ketat, perusahaan-perusahaan yang kalah efisien pada akhirnya akan keluar dari pasar. Perusahaan yang masih bertahan akan terus berusaha meningkatkan pangsa pasarnya, sehingga pada akhirnya dapat meraih keuntungan.

2. Dampak akumulasi (*accumulation effect*)

Integrasi ekonomi akan mendorong terjadinya akumulasi kapital, baik fisik maupun *human capital*, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan output. Dampak akumulasi sangat terkait dengan dampak alokasi yang memberikan dorongan bagi pengusaha untuk beroperasi secara lebih efisien. Meningkatnya efisiensi menciptakan iklim yang kondusif bagi penambahan investasi, sehingga pelaku ekonomi akan terdorong untuk menambah akumulasi kapital. Di sisi lain, integrasi ekonomi juga akan mempermudah mobilitas faktor produksi, sehingga akan semakin meningkatkan suplai faktor produksi.

3. Dampak lokasi (*location effect*)

Integrasi ekonomi akan mendorong suatu negara untuk melakukan spesialisasi sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki (*specialization*). Konsep keunggulan komparatif ini biasa dikenal sebagai *Heckscher-Ohlin comparative advantage*. Selain itu, integrasi ekonomi yang disertai dengan mobilitas faktor produksi juga akan mendorong terkumpulnya aktivitas ekonomi tertentu di suatu wilayah tertentu (*agglomeration*). Aglomerasi yang terjadi ini

dapat bekerja secara *backward* maupun *forward linkage*. Aglomerasi yang terkait dengan *forward linkage* adalah aglomerasi yang terjadi karena keinginan pengusaha untuk mendekati pasar yang lebih besar. Sementara itu, aglomerasi *backward linkage* terjadi karena keinginan pengusaha untuk mendekati *supplier* agar dapat menekan ongkos.

Studi empiris untuk mengkaji manfaat integrasi ekonomi telah banyak dilakukan.

Grossman dan Helpman (1991) membuktikan bahwa terbukanya perdagangan akan diikuti terjadinya transmisi pengetahuan sehingga pada umumnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rivera-Batiz dan Romer (1991) juga menunjukkan bahwa integrasi ekonomi dapat berdampak pada level maupun pertumbuhan ekonomi, yang tergantung pada seberapa jauh integrasi tersebut memungkinkan masuknya R&D dan informasi. Devereux and Lapham (1994) mengembangkan model Rivera-Batiz dan Romer lebih jauh dan menunjukkan bahwa perdagangan bebas akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih berimbang, bahkan dengan ketiadaan transfer pengetahuan sekalipun.

Meskipun demikian, penelitian yang mengkaji integrasi ekonomi dikaitkan dengan posisi relatif masing-masing negara anggota suatu klub perekonomian terintegrasi pasca-integrasi masih belum terlalu banyak dilakukan. Meskipun demikian, topik ini belakangan telah mulai menjadi suatu kajian penting dalam literatur perdagangan internasional, seperti yang telah dilakukan oleh Bowen *et al.* (1987), Helpman and Krugman (1985) dan Leamer (1984). Untuk MEA sendiri, kajian ini juga menjadi sangat menarik mengingat terdapatnya kesenjangan ekonomi yang cukup besar di antara

negara-negara anggota ASEAN. Dengan kesenjangan yang besar tersebut, menjadi pertanyaan apakah manfaat positif MEA tersebut pada akhirnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh negara-negara peserta atau sebaliknya hanya dapat dinikmati oleh negara tertentu saja. Terkait dengan ini, penelitian yang dilakukan oleh Bowen, Munandar, dan Viaene (2005)⁹ menawarkan konsep hubungan kesamaan proporsi (*equal-share relationship*) yang dapat dijadikan acuan dalam memprediksi distribusi output negara-negara pascaintegrasi ekonomi¹⁰ Konsep hubungan kesamaan proporsi menyatakan bahwa integrasi ekonomi akan menciptakan kondisi dimana pangsa output suatu negara terhadap total output dalam ekonomi akan sama dengan pangsa faktor produksi terhadap total faktor produksi (dengan asumsi tidak ada hambatan dalam mobilitas faktor dan tingkat teknologi yang homogen). Hubungan ini dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\frac{H_n}{\sum_{j=1}^N H_p} = \frac{Y_n}{\sum_{j=1}^N Y_p} = \frac{K_n}{\sum_{j=1}^N K_p}$$

Hubungan kesamaan proporsi tersebut memiliki konsekuensi bahwa perpindahan *physical capital* antar-ekonomi yang terintegrasi akan disertai peningkatan output dan peningkatan *human capital* (melalui arus masuk *human capital* asing atau akumulasi *human capital* domestik) untuk menyeimbangkan kembali kesamaan proporsi. Suatu kebijakan yang menaikkan pangsa *human capital* suatu negara dalam konteks

9 Selengkapnya lihat Topikal Isu “Mobilitas Faktor, Distribusi Produksi dan Integrasi Ekonomi Kawasan”.

10 Penelitian mencakup 14 negara Uni Eropa dan 51 negara bagian di AS, dengan menggunakan data tahun 1965-2000. Hasil penelitian mendukung hipotesis adanya “hubungan kesamaan proporsi”.

ekonomi terintegrasi akan meningkatkan baik pangsa dari total output maupun pangsa dari total *physical capital* (melalui arus masuk *physical capital* asing maupun akumulasi modal domestik).

3.4. MEA dan Implikasi Kesejahteraan

Tantangan paling sulit dalam menyongsong MEA adalah memperkirakan bagaimana MEA akan mempengaruhi perekonomian negara-negara di dalamnya. Kajian tentang hal ini sangat perlu dilakukan, karena dengan mengetahui perkiraan dampak yang akan terjadi, Pemerintah dan semua unsur bangsa dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang harus diambil agar dapat menuai manfaat optimal dari integrasi yang akan terjadi. Ada aspek dalam kajian dampak integrasi yang mampu dijawab dengan menggunakan kajian empiris, namun sejumlah aspek, seperti mobilitas faktor produksi intra ASEAN dan dampaknya pada pembagian kue ekonomi antar anggota ASEAN, akan coba dijawab secara konseptual teoritis.

3.4.1. Dampak terhadap Perdagangan Barang

Pengukuran dampak ekonomi dari suatu integrasi ekonomi merupakan topik yang banyak menyita perhatian dan sejauh ini telah cukup banyak dilakukan. Terkait dengan MEA, meskipun perwujudannya direncanakan baru akan tercapai sepenuhnya pada 2015, pengukuran dampaknya telah dapat dilakukan mengingat kesepakatan penurunan tarif telah mulai dilakukan pascapenandatanganan AFTA 1992 (yang termuat dalam *Common Effective Preferential Tariff - CEPT*). Sejauh ini, terdapat dua pendekatan utama dalam melakukan kajian empiris terhadap dampak ekonomi tersebut, yaitu:

(1) Pendekatan *ex-ante*, yang menggunakan parsial atau *general equilibrium model*,

seperti yang dilakukan oleh Imada et al. (1991), Adams and Par (1995), dan DeRosa (1995)

(2) Pendekatan *ex-post*, dengan menggunakan Metode Gravitasi, seperti yang dilakukan oleh Hamilton and Winters (1992), Frankel (1993), Sharma and Chua (2000), dan Endoh (1999, 2000).

Penggunaan Model Gravitasi pertama kali dipelopori oleh Tinbergen (1962) dan Pöyhönen (1963), untuk menganalisis arus perdagangan bilateral antara dua kesatuan geografis yang berbeda. Selanjutnya Frankel (1997) berusaha mengungkap dampak integrasi regional dengan memasukkan variabel *dummy* perjanjian internasional dalam persamaan umum model gravitasi.

Studi yang dilakukan menggunakan data lima negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand) periode 1989-2006 menunjukkan bahwa selain GDP per kapita dari negara-negara, perjanjian AFTA (sebagai cikal bakal MEA 2015) merupakan salah satu faktor yang berperan dalam perdagangan intra ASEAN.¹¹

Hasil studi di atas sejalan dengan data pangsa ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN (Tabel 3.3), yang meningkat cukup pesat dalam tujuh tahun terakhir (1999-2006). Meskipun demikian, ke depan tantangan peningkatan ekspor ke sesama negara ASEAN akan semakin berat. Hal ini terutama terkait dengan homogenitas dari komoditas yang diperdagangkan, contohnya di sektor pertanian, produk karet dan kayu, tekstil, serta elektronik. Selain itu, dengan telah cukup efektifnya penghapusan tarif selama ini (tinggal 1,74% pada 2006 untuk ASEAN-6), maka tahapan

11 Hasil penelitian lebih lengkap dapat dilihat dalam Boks "Dampak Kesepakatan AFTA Bagi Kinerja Ekspor ASEAN-5: Suatu Pendekatan Model Gravitasi"

integrasi perdagangan dalam *blueprint* MEA akan difokuskan pada penghapusan hambatan nontarif. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri untuk Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki hambatan nontarif¹². Hambatan nontarif yang diterapkan Indonesia diantaranya berupa penerapan pajak barang mewah untuk komoditas seperti produk kesehatan dan otomotif, ketentuan agen tunggal importir, serta ketentuan pemasangan label dalam bahasa lokal untuk komoditas tertentu.

Berbagai tantangan dalam perdagangan ini menyebabkan tujuan dari liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN perlu dipahami secara lebih luas, tidak hanya semata untuk meningkatkan perdagangan dalam kawasan. Penghilangan berbagai hambatan dalam perdagangan diharapkan dapat memicu setiap pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing masing-masing (dampak alokasi). Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan keunggulan ASEAN sebagai satu kawasan, sehingga akan menarik masuknya investasi asing. Hal ini akan menjadikan ASEAN sebagai salah satu *production platform* di dunia, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara di dalamnya.

3.4.2. Dampak Terhadap Investasi, Pertumbuhan dan Kemiskinan

Integrasi ekonomi akan mendorong masuknya investasi, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan, dan pada akhirnya

dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Integrasi mau tidak mau akan memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing apabila masih ingin bertahan di pasar. Restrukturisasi industri akan terjadi, sehingga pada akhirnya akan tercipta struktur industri yang lebih sehat. Bukti empiris dari hal ini dapat ditemukan di kawasan Uni Eropa, dimana struktur industri kawasan tersebut periode pascaintegrasi ditandai dengan jumlah perusahaan yang lebih sedikit, namun lebih besar dan lebih efisien. Kondisi ini pada akhirnya akan menciptakan atmosfer yang memacu masuknya FDI yang selanjutnya akan membantu menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih luas ke pasar dunia. Melalui efek terhadap pertumbuhan ekonomi ini FDI selanjutnya dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. FDI dapat juga membantu meningkatkan pendapatan pemerintah, yang dapat digunakan untuk membiayai jaring pengaman sosial untuk kaum miskin, melalui kontribusi pajak dan secara tidak langsung dengan menstimulasi pertumbuhan dan memperluas wajib pajak (*tax base*). Sebagai tambahan, FDI dapat secara instrumental mendekatkan jasa-jasa infrastruktur ke golongan miskin. Sebagai contoh, investor-investor asing di telekomunikasi, listrik dan sumber daya air, melalui kemitraan *build-operate-transfer* (BOT) atau skema *public-private*, telah memberikan jasa-jasa yang lebih baik ke jutaan rumah tangga, termasuk golongan miskin. FDI dapat berpengaruh pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan pada suatu lingkungan yang sehat, yaitu terdapat kesamaan aturan main antara investor asing dan domestik, dan kecukupan infrastruktur fisik dan sosial (Klein, *et al.* 2001, Mirza 2002).

12 De dios, C. Loreli : "An Investigation into the Measures Affecting the Integration of ASEAN's Priority Sectors (Phase 2): Overview: Non-Tariff Barriers to Trade in the ASEAN Priority Goods Sectors", REPSF Project 06/001a Final Report, October 2006

Untuk negara-negara ASEAN, Jalilian dan Weiss (2002) menemukan baik hubungan langsung maupun tak langsung antara FDI dan kemiskinan. Peningkatan 10% FDI berasosiasi dengan peningkatan pendapatan per kapita sebesar 0,17% dari kaum miskin di ASEAN. Sekitar 40% dari efek pengentasan kemiskinan dari FDI diperoleh melalui pertumbuhan ekonomi, sementara 60% berasal dari akibat langsung melalui adanya pelatihan tenaga kerja dan pembukaan lapangan kerja bagi kaum miskin.

Meskipun demikian, integrasi suatu kawasan dapat pula menghasilkan efek negatif terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Integrasi dapat menghasilkan pembalikan pengentasan kemiskinan (*poverty reduction reversal*) melalui dampaknya pada kenaikan harga-harga barang-barang *tradables*, menyusutnya lapangan kerja dan upah bagi kaum miskin, serta menurunnya pendapatan pemerintah. Integrasi ekonomi yang lebih luas juga dapat meningkatkan kerentanan kaum miskin, yang utamanya paling sulit untuk melindungi diri dari kejutan-kejutan pendapatan (*income shocks*), yang disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan aset finansial, rendahnya pendidikan dan keterampilan dan ketiadaan akses ke jaring pengaman sosial.

3.4.3. Dampak terhadap Kondisi Ketenagakerjaan

Liberalisasi dalam perdagangan barang, jasa, investasi, dan mobilitas faktor produksi tenaga kerja akan berdampak pada kondisi ketenagakerjaan. Dampak pada kondisi ketenagakerjaan ini biasanya menjadi isu yang paling sensitif dalam pembentukan suatu kawasan integrasi ekonomi, seperti yang misalnya dialami oleh Uni Eropa. Secara teoritis, liberalisasi dalam keempat faktor di atas akan meningkatkan

produktivitas tenaga kerja, karena akan menciptakan kondisi yang mendorong perusahaan untuk mengalokasikan sumber-sumber daya secara lebih efisien (dampak alokasi). Dihilangnya hambatan dalam mobilitas tenaga kerja akan membuka kesempatan pada para pekerja untuk mencari pekerjaan yang dianggap paling sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Di sisi lain, pengusaha juga memperoleh kesempatan untuk mempekerjakan tenaga kerja yang dianggap paling cocok. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja dan selanjutnya juga menaikkan upah tenaga kerja.

Meskipun demikian, **bukti empiris terkait dengan dampak integrasi ekonomi terhadap kondisi ketenagakerjaan cenderung tidak konklusif**. Beberapa isu ketenagakerjaan yang sering muncul terkait dengan integrasi ekonomi suatu kawasan di antaranya adalah :

- Apakah liberalisasi dalam mobilitas tenaga kerja akan memicu migrasi pekerja dari satu negara ke negara lainnya? Terkait dengan ini, apakah Indonesia akan dapat memetik manfaat optimal dari kondisi ini atau justru sebaliknya menjadi pihak yang dirugikan.
- Apakah liberalisasi dalam mobilitas tenaga kerja akan mendorong perbaikan tingkat upah atau malah sebaliknya?
- Apakah liberalisasi dalam mobilitas tenaga kerja akan lebih mendorong penyerapan tenaga kerja terampil (*skilled labor*) atau yang tidak terampil (*unskilled labor*)?

Pekerja (pada sektor tertentu) dalam suatu negara mendapatkan upah yang lebih tinggi dari upah untuk pekerja pada sektor yang sama di negara lain. Adanya liberalisasi dalam mobilitas tenaga kerja memicu terjadinya migrasi pekerja dari

luar ke negara tersebut. Akibat bertambahnya suplai pekerja, terjadi penurunan upah pekerja di sektor tersebut. Hal ini tentu saja merugikan pekerja dari negara tersebut yang sebelumnya menikmati upah yang lebih tinggi. Namun sebaliknya pengusaha di sektor tersebut menjadi diuntungkan. Keadaan yang sebaliknya terjadi di negara lain. Dengan berpindahya sebagian pekerja ke negara lain, upah di negara tersebut cenderung akan naik, sehingga menguntungkan pekerja di negara itu, namun merugikan pengusaha. Dengan demikian, migrasi akan selalu memunculkan adanya pihak yang dirugikan dan diuntungkan, namun secara umum kedua negara akan meraih keuntungan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa integrasi ekonomi bukan merupakan faktor dominan dalam menentukan pola migrasi yang terjadi. Penelitian yang dilakukan terhadap Uni Eropa menunjukkan bahwa kondisi siklus bisnis (*business cycle*) tetap merupakan faktor utama yang memicu terjadinya migrasi pekerja.

Bagi Indonesia, peluang terjadinya migrasi tenaga kerja ini berpotensi menguntungkan mengingat tingkat pengangguran di Indonesia yang relatif paling tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Data statistik tahun 2006 menunjukkan

Indonesia bersama Myanmar merupakan negara pengirim tenaga kerja migran terbesar, masing-masing mengirim 23% dan 27% dari total tenaga kerja migran di ASEAN (lihat Tabel 3.8).

Meskipun demikian, **kemampuan memanfaatkan peluang migrasi tenaga kerja ini tentu akan sangat terkait dengan kualifikasi yang dimiliki oleh para pekerja Indonesia.** Sejauh ini, jumlah pekerja migran yang besar dari Indonesia cenderung didominasi oleh pekerja dengan keahlian rendah (*low-skilled* atau *unskilled labor*). Dimasukkannya liberalisasi tenaga kerja dalam MEA 2015 diharapkan lebih membuka kesempatan kepada *skilled labor* untuk mendapatkan pekerjaan dengan kondisi yang dianggap lebih baik.

Sementara itu, **penelitian empiris mengenai dampak integrasi ekonomi terhadap tingkat upah menunjukkan hasil yang beragam.** Penelitian terhadap Uni Eropa (EU) menunjukkan bahwa integrasi ekonomi tidak akan membawa perubahan yang signifikan dalam tingkat upah pekerja. Kondisi upah pekerja domestik pascaintegrasi EU hanya berubah dalam kisaran $\pm 0,3\%$ setiap tambahan 1% jumlah pekerja akibat migrasi. Hal ini menjawab kekhawatiran sebagian negara bahwa liberalisasi dalam mobilitas tenaga kerja akan menyebabkan

Tabel 3.8 Jumlah Pekerja Migran ASEAN Tahun 2006 (ribu orang)

Negara Asal	Negara Tujuan										
	Brunei	Kamboja	Indonesia	Laos	Malaysia	Myanmar	Filipina	Singapura	Thailand	Vietnam	ASEAN
Brunei	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Kamboja	0	0	0	2	7	0	0	0	232	0	240
Indonesia	6	0	0	0	1215	0	5	96	1	0	1323
Laos	0	1	0	0	0	0	0	0	257	0	258
Malaysia	68	1	0	0	0	0	0	994	3	0	1066
Myanmar	0	0	0	0	92	0	0	0	1382	0	1475
Filipina	23	1	0	0	353	0	0	136	3	0	516
Singapura	3	1	0	0	87	0	0	0	2	0	92
Thailand	11	129	0	3	86	0	0	0	0	0	229
Vietnam	0	157	0	15	86	0	1	0	20	0	279
ASEAN	111	290	0	20	1925	0	8	1226	1900	0	5480

Sumber : ILO

membanjirnya pekerja ke negara tertentu yang pada akhirnya akan menekan upah domestik. Sementara itu, **penelitian lain menunjukkan bahwa dampak liberalisasi perdagangan terhadap tingkat upah akan tergantung pada industri yang mendapat manfaat dari liberalisasi tersebut.** Bila industri yang mengalami ekspansi akibat liberalisasi adalah industri yang bersifat *labor-intensive*, maka upah dari pekerja kurang terampil yang akan mengalami kenaikan **Hartono et al. (2007)** menunjukkan bahwa dampak integrasi ekonomi di Indonesia akan lebih dirasakan oleh *non-skilled labor*, yang menikmati kenaikan upah lebih tinggi daripada *skilled-labor*.

Penelitian empiris lain menunjukkan adanya hubungan antara integrasi ekonomi, perubahan teknologi, aliran FDI global dan restrukturisasi industri dan meningkatnya kebutuhan terhadap *skilled-labor*. Tan (2000, 2004) menemukan bahwa meningkatnya FDI ke kawasan Asia berdampak pada peningkatan permintaan akan tenaga terampil, sekaligus memperbesar upah tenaga terampil. **Fajnzylber dan Fernandes (2004)** berpendapat bahwa integrasi ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap negara-negara berkembang. Untuk Brazil, integrasi ekonomi meningkatkan permintaan terhadap *skilled-labor*, sedangkan untuk China integrasi ekonomi justru menurunkan permintaan terhadap *skilled-labor*.

Perkembangan FDI ke Indonesia selama 5 tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran orientasi industri FDI, yakni dari sektor sekunder ke sektor tersier. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, pergeseran orientasi ini perlu dicermati, mengingat sektor sekunder (industri pengolahan) selama ini adalah sektor penyerap tenaga kerja terbesar, khususnya untuk *unskilled* atau *low-skilled labor*. Apabila hal ini terus terjadi, maka terdapat indikasi awal bahwa integrasi ekonomi akan lebih meningkatkan permintaan terhadap *skilled-labor*, seperti yang terjadi di Brazil.

3.5 MEA dan Distribusi Output Pasca-Integrasi

Kajian mengenai distribusi output diantara negara-negara dalam kawasan terintegrasi pascaintegrasi merupakan topik yang sangat relevan, mengingat tidak sedikit pendapat yang menyatakan bahwa integrasi ekonomi pada akhirnya hanya akan menguntungkan negara dengan kondisi yang lebih maju. Konsep kesamaan proporsi (*equal-share relationship*) yang telah disinggung dalam sub-bab 3.3 di atas, menyatakan bahwa integrasi kawasan akan menghasilkan distribusi output ekonomi yang bergantung dari distribusi faktor produksi, baik kapital fisik (*physical capital*) maupun sumber daya manusia (*human capital*) tiap negara yang terlibat. Dengan kata lain, suatu negara yang memiliki porsi besar dalam distribusi faktor produksi di kawasan, pada

Tabel 3.9 Perkembangan Realisasi FDI dan Penyerapan Tenaga Kerja

Sector		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Sektor Primer	Nilai (juta USD)	102,5	253,4	308,5	407,8	533,0	502,4
	Tenaga Kerja (orang)	2.465	18.273	9.677	23.190	26.416	16.741
Sektor Sekunder	Nilai (juta USD)	1553,3	1880,6	2804,5	3502,1	3604,5	3622,9
	Tenaga Kerja (orang)	73.839	69.196	91.728	97.326	152.815	105.141
Sektor Tersier	Nilai (juta USD)	1435,4	3316,6	1489,3	5004,7	1839,5	4419,1
	Tenaga Kerja (orang)	12.082	29.755	46.996	35.593	27.714	16.910

Sumber : BKPM

akhirnya akan memperoleh distribusi output ekonomi yang besar pula. Negara yang unggul dari segi *human capital*, dan oleh karenanya memiliki proporsi total *human capital* yang tinggi, akan juga mempunyai bagian stok *physical capital* dan irisan kue output ekonomi regional yang paling besar. Ini mudah dimengerti karena sumber daya manusia yang unggul merupakan magnet sekaligus komplemen dari kapital fisik yang padat dengan teknologi canggih dan mutakhir sementara teknologi merupakan komponen yang mampu melipatgandakan produktivitas ekonomi dalam takaran eksponensial.

Meramal gambaran posisi Indonesia memang belum dapat dilakukan secara empiris, mengingat liberalisasi belum sepenuhnya terjadi. Meskipun demikian, dengan menggunakan konsep kesamaan proporsi di atas, deteksi dini posisi Indonesia pascaintegrasi dapat dilakukan dengan mengkaji perkembangan faktor-faktor produksi, yaitu stok kapital dan kondisi *human capital*, untuk kemudian dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan integrasi.

Dari sisi faktor produksi *human capital*, dalam kawasan ASEAN terdapat ketimpangan yang cukup lebar. Hal ini terlihat dari *Human Development Index* (HDI), dimana Singapura mengungguli 9 anggota ASEAN lainnya dengan

menempati urutan 25 dari 177 negara, sedangkan Myanmar menempati urutan 132 (lihat Tabel 3.10). Posisi Indonesia sendiri tidak terlalu menggembirakan, hanya lebih baik dibandingkan Laos, Kamboja, dan Myanmar. Kondisi ini sejalan dengan beberapa data SDM lainnya seperti tingkat melek huruf dan tingkat partisipasi sekolah yang relatif rendah, serta rendahnya pengeluaran porsi belanja negara untuk pendidikan dan kesehatan (Tabel 3.10).

Dari sisi faktor produksi stok kapital, juga terdapat kesenjangan yang cukup lebar di ASEAN. Hal ini antara lain dapat terlihat antara lain dari tabel peringkat daya saing negara yang dikeluarkan oleh WEF (lihat Tabel 3.11). Dari tabel tersebut terlihat betapa Indonesia nampaknya masih memiliki masalah dalam hal pemenuhan beberapa persyaratan mendasar bagi terciptanya pemupukan stok kapital yang tinggi, seperti kondisi infrastruktur, kelembagaan, dan SDM. Posisi Indonesia relatif tidak begitu baik dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya (Singapura, Malaysia, dan Thailand). Tingkat penguasaan teknologi Indonesia nampaknya juga cukup tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya seperti terlihat dari tingkat penggunaan telpon, internet, maupun konsumsi listrik (Tabel 3.13).

Tabel 3.10 Beberapa Indikator Dasar ASEAN

Negara	HDI	Life expectancy	Education index	GDP index	Poverty index	Rank index
Singapura	0.922	0.907	0.908	0.950	5.2	25
Brunei Darussalam	0.894	0.862	0.877	0.941	..	30
Malaysia	0.811	0.811	0.839	0.783	8.3	63
Thailand	0.781	0.743	0.855	0.745	10	78
Filipina	0.771	0.767	0.888	0.657	15.3	90
Vietnam	0.733	0.812	0.815	0.572	15.2	105
Indonesia	0.728	0.745	0.830	0.609	18.2	107
Laos	0.601	0.637	0.663	0.503	34.5	130
Kamboja	0.598	0.550	0.691	0.552	38.6	131
Myanmar	0.583	0.596	0.764	0.389	21.5	132

Sumber: UNDP, Human Development Report 2007

Tabel 3. 11 Beberapa Indikator Pembangunan Manusia ASEAN

Negara	Literacy rate (% of age 15+)	Gross enrolment ratio (primary-tertiary school)	Expenditure on education 2002-05 (% of GDP)	Expenditure on health 2004 (% of GDP)
Singapura	92,5	87,3	3,7	1,3
Brunei Darussalam	92,7	77,7	„	2,6
Malaysia	88,7	74,3	6,2	2,2
Thailand	92,6	71,2	4,2	2,3
Filipina	92,6	81,1	2,7	1,4
Vietnam	90,3	63,9	„	1,5
Indonesia	90,4	68,2	0,9	1
Laos	68,7	61,5	2,3	0,8
Kamboja	73,6	60	1,9	1,7
Myanmar	89,9	49,5	1,3	0,3

Sumber: UNDP, Human Development Report 2007

Mengacu pada konsep kesamaan proporsi di atas, maka apabila menggunakan patokan kondisi relatif faktor-faktor produksi, nampaknya manfaat terbesar dari integrasi ASEAN hanya akan dinikmati oleh beberapa negara tertentu, dalam hal ini adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sementara itu, peluang Indonesia untuk turut menikmati kue ekonomi pascaintegrasi tentu saja masih sangat terbuka, yaitu apabila dalam periode 7-8 tahun ini Indonesia mampu melakukan perubahan substansial dalam hal perbaikan SDM maupun fisik (*human and physical capital*).

3.6. MEA 2015 dan Peran Otoritas Moneter

Agar dapat menuai manfaat optimal dari integrasi ekonomi, setiap negara dituntut untuk

Tabel 3.12 Komponen Daya Saing Beberapa Negara Anggota ASEAN

Category	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand
Overall index	54	21	7	28
Basic requirements	82	21	3	40
Institutions	63	20	3	47
Infrastructures	91	23	3	27
Macroeconomic stability	89	45	24	30
Health & primary education	78	26	19	63
Efficiency enhancers	37	24	6	29
Higher education and training	65	27	16	44
Goods market & efficiency	23	20	2	34
Labor market efficiency	31	16	2	11
Financial market sophistication	50	19	3	52
Technological readiness	75	30	12	45
Market size	15	29	50	17
Innovation & sophistication factors	34	19	13	39
Business sophistication	33	18	16	40
Innovation	41	21	11	36

Sumber: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007

dapat meningkatkan kapasitas faktor produksinya, baik berupa kapital fisik (*physical capital*) maupun sumber daya manusia (*human capital*). Hal ini terkait dengan konsep kesamaan proporsi (*equal-share relationship*) yang diuraikan dalam sub-bab 3.3 di atas, yang menyatakan bahwa integrasi kawasan akan menghasilkan distribusi output ekonomi yang bergantung pada distribusi faktor produksi, baik kapital fisik (*physical capital*) maupun sumber daya manusia (*human capital*) tiap negara yang terlibat. Dengan kata lain, suatu negara yang memiliki porsi besar dalam distribusi faktor produksi di kawasan, pada akhirnya akan memperoleh distribusi output ekonomi yang besar pula.

Bank sentral memiliki peran yang signifikan melalui kebijakan moneternya untuk mendorong investasi yang tinggi guna meningkatkan stok kapital fisik (*physical capital*). Bukti empiris dengan menggunakan data Thailand, Indonesia, Kamboja, Singapura, Malaysia, Filipina dan Vietnam (ASEAN-7) dalam periode 1992-2006 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara inflasi dan investasi (dalam hal ini aliran masuk FDI) di negara-negara tersebut.¹³ Hubungan

13 Hasil penelitian lebih lengkap dapat dilihat pada Bab V, Topical Issue 1 berjudul: "Apakah Peran Bank Sentral Pasca Integrasi Ekonomi ASEAN 2015 Semakin Signifikan?"

Tabel 3.13 Kondisi Infrastruktur ASEAN

Negara	Telephone mainlines (per 100 people)	Cellular subscribers (per 100 people)	Internet users (per 100 people)	Electricity consumption (kWh per capita)
Singapura	43,5	103,4	57,9	8087,0
Brunei Darussalam	25,57	56,3	15,3	9133,0
Malaysia	16,8	75,2	42,4	3196,0
Thailand	11,0	43,0	11,0	1896,0
Filipina	4,2	39,5	5,3	655,0
Vietnam	18,8	11,4	12,7	503,0
Indonesia	5,7	21,1	7,2	498,0
Laos	1,3	10,8	0,4	135,0
Kamboja	0,3	7,6	0,3	9,0
Myanmar	0,79	0,17	0,12	126,0

Sumber: ITU 2007

positif juga ditemukan antara stabilitas ekonomi makro dan investasi. Kedua temuan ini memberikan indikasi bahwa negara-negara yang memiliki inflasi jangka panjang yang rendah dan ekonomi makro yang stabil cenderung mampu menarik investasi yang tinggi. Sehingga kebijakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan mempertahankan inflasi yang rendah dan ekonomi makro yang stabil adalah kebijakan moneter yang pro-investasi.

Uraian di atas memiliki satu benang merah, yaitu bahwa **integrasi ekonomi kawasan menjadikan peran investasi semakin sentral dan langsung menentukan posisi kesejahteraan suatu negara relatif terhadap peer-nya di kawasan**. Bank sentral melalui kebijakan moneternya dapat berperan mempengaruhi kinerja investasi secara positif: inflasi yang rendah dan ekonomi makro yang stabil akan mendorong investasi secara signifikan (kebijakan moneter menuju inflasi rendah dan ekonomi makro yang stabil: kebijakan moneter yang pro-investasi). Sehingga dapat disimpulkan bahwa integrasi ekonomi kawasan menjadikan peran bank sentral dalam meningkatkan investasi menjadi semakin penting.

3.7. Implikasi Kebijakan

Dari uraian di atas, secara umum terwujudnya MEA menawarkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, khususnya bagi Indonesia. Dalam hal perdagangan, kajian yang dilakukan menunjukkan langkah-langkah penurunan tarif sebagai salah satu faktor yang turut berperan dalam peningkatan perdagangan intraregional ASEAN beberapa tahun belakangan ini. Dalam hal ketenagakerjaan, dimasukkannya liberalisasi tenaga kerja dalam MEA 2015 diharapkan akan lebih membuka kesempatan kepada *skilled labor* untuk mencari peluang kerja yang lebih baik, sehingga karakter tenaga kerja migran dari Indonesia kelak tidak lagi didominasi oleh tenaga kerja *low-skilled* saja. Terdapat indikasi awal bahwa dampak integrasi ekonomi yang akan terjadi bagi Indonesia nampaknya akan lebih meningkatkan permintaan terhadap *skilled labor*. Dalam hal pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, kajian menunjukkan bahwa integrasi ekonomi melalui peningkatan FDI berperan dalam peningkatan pertumbuhan dan peningkatan pendapatan kaum miskin.

Meskipun demikian, agar hal-hal di atas dapat terwujud, perlu dilakukan sejumlah

langkah maupun strategi yang dapat mendukung pencapaian hal tersebut.

3.7.1. Perbaikan Iklim Investasi dan Penguatan Institusi

Terciptanya suatu lingkungan ekonomi makro yang mendukung investasi, kompetisi dan pembangunan sektor swasta merupakan faktor krusial dalam persiapan integrasi ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah perbaikan dalam hal yang terkait dengan institusi seperti birokrasi yang kompeten dan efisien, sistem hukum yang maju, dan pengakuan terhadap hak cipta. Selain itu, institusi keuangan juga harus diperkuat agar dapat mengelola secara efektif peningkatan arus modal masuk dan keluar yang semakin cepat sebagai dampak dari integrasi ekonomi. Aturan yang tepat juga harus dibuat untuk menjamin agar dana-dana yang terlibat disalurkan ke sektor-sektor produktif dan untuk menurunkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan regional kembali. Yang tak kalah penting, seperti telah dikemukakan di sub-bab sebelumnya, kebijakan moneter yang *prudent* perlu tetap dipertahankan karena akan berdampak positif pada inflasi dan stabilitas ekonomi makro sehingga mendukung investasi.

Selain sejumlah institusi di atas, yang juga sangat penting adalah institusi yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Gambaran kondisi SDM Indonesia yang tidak terlalu menggembirakan menyebabkan pemerintah harus berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalan dalam kualitas SDM. Alokasi anggaran pemerintah untuk dana pendidikan serta pendirian balai peningkatan latihan dan keterampilan harus menjadi prioritas. Yang juga penting adalah penguatan institusi yang secara langsung terkait dengan pengelolaan

program-program pengentasan kemiskinan agar lebih efisien dan efektif dalam memberikan bantuan kepada golongan miskin dan kaum yang terbelakang. Contoh dari institusi-institusi tersebut adalah yang terlibat dalam skema-skema redistribusi lahan, kredit mikro, dan program-program kesejahteraan sosial. Mayoritas dari orang miskin berada di pedesaan, sehingga menjadi penting untuk memperkuat kapasitas institusi yang terjun di daerah tersebut.

Terakhir, terdapat kebutuhan untuk membangun institusi-institusi yang dapat membantu negara-negara anggota membangun industri-industri utama mereka. Produksi dari produk-produk dan jasa-jasa yang berbeda-beda dapat membantu meningkatkan perdagangan intra-regional. Untuk keperluan ini, penelitian dan inovasi produk harus dilakukan sehingga tiap negara dapat mengembangkan produk unggulannya masing-masing. Besarnya dukungan terhadap riset dan pengembangan teknologi akan berdampak pada kinerja perdagangan dan pertumbuhan dari negara-negara anggota. Insentif untuk inovasi sudah seharusnya ditingkatkan, terutama di ekonomi-ekonomi kurang maju sehingga memungkinkan negara-negara tersebut memperoleh keuntungan dari pasar yang lebih besar melalui adanya integrasi. Disamping itu insentif untuk inovasi juga dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan pendapatan antara negara-negara berpendapatan tinggi dan rendah yang mungkin melebar karena ekonomi-ekonomi yang lebih maju dan unggul secara teknologi mungkin justru dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari integrasi.

3.7.2. Persiapan di Tingkat Sektoral

Telah ditetapkan 12 (dua belas) sektor sebagai sektor yang akan diliberalisasi

menyebabkan Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain mempersiapkan sektor-sektor tersebut. Efek negatif yang mungkin dalam jangka pendek dari liberalisasi harus secara jelas dikomunikasikan pada sektor-sektor yang terpengaruh untuk membantu persiapan mereka melalui pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, atau peralihan perlahan-lahan ke

pekerjaan lain. Pihak pemerintah juga harus menunjukkan pada sektor-sektor yang terkena dampaknya tersebut, efek positif dari liberalisasi yang lebih dalam sehingga mereka dapat memberi apresiasi terhadap kebijakan tersebut. Adanya konsultasi yang intensif dengan kelompok yang terpengaruh dapat menghindari reaksi yang tidak diinginkan.

BOKS: **Dampak Kesepakatan AFTA Bagi Kinerja Ekspor ASEAN 5: Suatu Pendekatan Model Gravitasi¹**

I. Pendahuluan

Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya telah menandatangani Deklarasi ASEAN pada 20 November 2007 lalu di Singapura yang berisi cetak biru (*blue print*) berbagai langkah menuju tercapainya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 mendatang. Proses ini didahului kesepakatan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang ditandatangani di Singapura pada 28 Januari 1992. AFTA akan mengarah pada terciptanya kawasan perdagangan yang bebas. Pemberlakuan AFTA secara penuh pada 1 Januari 2003 ditujukan kepada enam negara anggota yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Diharapkan melalui kesepakatan tersebut seluruh negara anggota dapat mencapai kesejahteraan seiring dengan peningkatan kegiatan perdagangan. Atas dasar itu, dilakukan kajian singkat yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan AFTA terhadap kinerja ekspor negara-negara ASEAN yang diwakili oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand (ASEAN-5).

1 Dipersiapkan oleh Oki Hermansyah dan Myrnawati Savitri

II. Model Gravitasi

Model gravitasi yang digunakan dalam menganalisis arus perdagangan bilateral antara dua kesatuan geografis yang berbeda diadopsi dari Jan Tinbergen (1962).² Dalam model tersebut digambarkan hubungan aliran perdagangan bilateral berupa ekspor maupun impor terhadap pendapatan masing-masing negara dan jarak di antara keduanya. Bentuk umum dari fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\log(X_{ij}) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(Y_i) + \alpha_2 \log(Y_j) + \alpha_3 \log(D_{ij}) \quad (1)$$

dimana:

- X_{ij} : nilai ekspor atau impor dari negara i ke negara j
 Y_i dan Y_j : ukuran perekonomian dari negara pengekspor atau pengimpor biasanya digambarkan dengan GDP.
 D_{ij} : jarak geografis antara dua negara yang melakukan perdagangan

Faktor jarak dianggap penting dalam teori gravitasi karena merupakan *proxy* dari berbagai biaya seperti biaya transportasi, komunikasi, dan transaksi yang diperlukan dalam melakukan suatu perdagangan. Frankel berusaha mengungkap dampak integrasi regional dengan memasukkan variabel perjanjian internasional dalam persamaan umum gravitasi tersebut.³ Dalam rangka

2 Tinbergen, J., 1962, *Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy*, the Twentieth Century Fund, New York.

3 Frankel, Jeffrey (1997): "Regional Trading Blocs in The World Economic System"

menganalisis pengaruh pemberlakuan AFTA bagi perdagangan bilateral di kawasan ASEAN, maka digunakan bentuk fungsi:
$$\log(X_{ij}) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(\text{GDPP}_{ij}) + \alpha_2 \log(\text{Dist}_{ij}) + \beta_1 \text{AFTA} + \beta_2 \text{trend} + \varepsilon_{ij} \quad (2)$$

Aliran perdagangan dalam estimasi ini berupa nilai ekspor antara satu negara anggota ASEAN dengan sekelompok anggota lainnya. Perbedaan dari model gravitasi Tinbergen adalah dimasukkannya bentuk perkalian antara GDP per kapita negara pengekspor dan GDP per kapita negara mitra dagangnya (GDPP). Koefisien dari GDPP diharapkan bernilai positif, semakin tinggi GDP per kapita suatu negara semakin besar pula tingkat daya beli masyarakatnya. Koefisien dari variabel jarak diharapkan bernilai negatif, artinya memiliki hubungan terbalik dengan variabel ekspor. Semakin jauh jarak antara dua negara maka semakin tinggi biaya transportasi untuk melakukan perdagangan, sehingga perdagangan yang akan terjadi di antara keduanya semakin rendah. Variabel AFTA merupakan *dummy* yang menunjukkan pengaruh perjanjian AFTA terhadap perdagangan bilateral yang dilakukan untuk melihat dampak beberapa momen yang terjadi, dimana *dummy* tersebut bernilai 1 untuk tahun 1995-2006. Pemilihan tahun 1995 berdasarkan pertimbangan bahwa pada tahun tersebut AFTA telah mengalami kemajuan sehingga menjadi semakin terpadu, antara lain pada akhir tahun 1994 sektor pertanian mulai dimasukkan dalam skema CEPT, dan pada tahun 1995 secara resmi AFTA Unit yang ditunjuk sebagai

koordinator dan pengatur pelaksanaan AFTA secara lebih efektif mulai dibentuk. Sementara itu, tren dimasukkan ke dalam persamaan tersebut dengan maksud untuk menangkap "pertumbuhan permanen" ekspor.

III. Data dan Temuan Empiris

Studi ini menggunakan data tahunan negara anggota ASEAN-5 periode 1989-2006. Nilai ekspor antar-negara anggota ASEAN diperoleh dari UN Comtrade yang dinyatakan dalam satuan USD. Data GDP dan populasi bersumber dari IMF International Financial Statistics CD ROM *database* dalam satuan mata uang masing-masing negara dan dikonversikan ke dalam satuan miliar USD. Data jarak antar ibukota negara diperoleh dari situs www.infoplease.com yang dinyatakan dalam satuan kilometer.

Pada umumnya model gravitasi menggunakan metode *pooling data*. Namun kelemahan metode ini adalah adanya asumsi *intercept* dan *slope* yang bernilai konstan untuk masing-masing negara sehingga kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sebagai alternatif, dalam kajian ini digunakan metode *cross section*. Berbeda dengan metode *pool*, metode *cross section* memiliki keunggulan karena mampu menunjukkan kinerja ekspor masing-masing negara anggota ASEAN-5 secara berbeda. Variabel ekspor suatu negara diestimasi dengan data GDP per kapita dan jarak keempat negara mitra dagangnya dengan penyusunan data berdasarkan tahun (*stacked by date*).

Estimasi yang dilakukan memberikan hasil yang signifikan dan sesuai dengan harapan seperti yang ditampilkan pada Tabel 1. Hasil

Tabel Estimasi Parameter Model Gravitasi

Negara	Periode	Dummy	C	log (GDPP)	log (Dist)	dum	Trend
Indonesia	1989-2006	1995	8,16* (6,93)	0,51* (7,83)	-0,41** (-2,55)	0,39* (3,10)	0,02* (4,98)
Singapura*)	1989-2006	1995	9,95* (17,59)	0,63* (8,36)	-0,61* (-10,82)	0,18*** (1,81)	0,01* (2,70)
Thailand	1989-2006	1995	8,05* (4,54)	0,51* (10,03)	-0,47** (-1,99)	0,51* (2,99)	0,02* (5,04)
Filipina	1989-2006	1995	37,37* (8,22)	0,44* (11,09)	-4,32* (-7,44)	0,85* (5,37)	0,02* (5,33)
Malaysia	1989-2006	1995	8,28* (12,64)	0,58* (12,00)	-0,41* (-4,76)	0,18*** (1,72)	0,01* (5,58)

Ket.: *) tidak memasukkan Indonesia karena keterbatasan data
 Nilai dalam tanda kurung merupakan t-statistics
 * signifikan di 1%
 ** signifikan di 5%
 *** signifikan di 10%

estimasi ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa perdagangan meningkat seiring dengan peningkatan GDP per kapita, sedangkan faktor jarak sebagai *proxy* biaya transportasi menunjukkan hubungan yang berlawanan.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, secara umum dapat disimpulkan bahwa GDP per kapita berpengaruh secara positif dan signifikan pada peningkatan kinerja ekspor. Adanya kesepakatan pembentukan kawasan perdagangan bebas AFTA yang tergambar dari variabel *dummy* AFTA juga menunjukkan hal serupa. Jarak sebagai perwakilan biaya yang timbul dalam transportasi berpengaruh negatif terhadap

peningkatan ekspor. Secara statistik, dengan adanya kesepakatan AFTA, kinerja ekspor negara-negara anggota meningkat dibandingkan sebelum menjalani kesepakatan, namun dalam kenyataan hasilnya belum optimal. Hal ini terbukti dari pangsa ekspor intra-ASEAN yang pada 2006 hanya sebesar 24.9%, tidak berbeda jauh pada 1999 dengan pangsa 21.7%.⁴ Kemungkinan ini terjadi akibat ekonomi ASEAN yang cenderung lebih kompetitif ketimbang komplementer. Persaingan yang terjadi semakin tajam melalui hambatan non-tarif yang diterapkan untuk menjaga produk lokal. Indonesia perlu mengupayakan berbagai langkah agar hasil yang dipetik dari integrasi ekonomi kawasan benar-benar maksimal.

4 Data bersumber dari IMF *Direction of Trade Statistics*

halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 4: Prospek Ekonomi Jangka Menengah

Prospek ekonomi Indonesia 2008-2012 didasarkan pada perkembangan ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia yang diwakili oleh volume perdagangan dunia, harga komoditas (baik minyak maupun non-migas), suku bunga internasional dan domestik, kondisi keuangan Pemerintah, serta aliran masuk FDI. Volume perdagangan dunia diperkirakan masih akan tetap tumbuh tinggi sekitar 7%, harga komoditas diperkirakan sedikit menurun namun masih pada level yang tinggi, suku bunga diasumsikan stabil, defisit keuangan Pemerintah diperkirakan cenderung menurun, dan aliran masuk FDI diperkirakan terus meningkat. Berdasarkan asumsi tersebut maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 7,4-8,0% pada 2012, sedangkan inflasi rata-rata menunjukkan lintasan yang cenderung menurun menuju target inflasi yang ditetapkan Pemerintah.

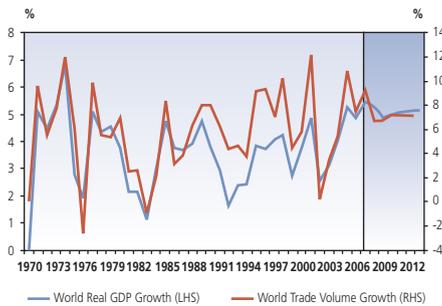
Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan inflasi yang terus menurun didasari oleh optimisme implementasi berbagai kebijakan struktural -antara lain mencakup perbaikan di bidang produksi, infrastruktur, kepastian hukum, tenaga kerja, pendidikan, keterampilan serta kesehatan- yang bermuara pada perbaikan daya saing ekonomi nasional dan iklim investasi. Selanjutnya perbaikan iklim investasi ini dicerminkan oleh meningkatnya FDI yang cukup signifikan (sekitar 1,5% PDB). Dengan demikian, kebijakan untuk memperbaiki sisi penawaran menjadi sangat strategis dalam jangka panjang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan serta diiringi dengan inflasi yang rendah.

4.1. Asumsi Perekonomian Global 2008-2012

a. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat namun masih berada di atas rata-rata historisnya. Bergejolaknya pasar keuangan, tetap tingginya harga komoditas dan lesunya perekonomian AS menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia 2008 diperkirakan mengalami perlambatan menjadi 4,1%, lebih rendah dari 2007 yang setinggi 4,9%.¹ Prediksi ekonomi yang melambat ini terutama disebabkan oleh semakin meluasnya dampak krisis finansial (yang diawali krisis *subprime mortgage* di AS) dan lesunya perekonomian negara-negara besar di dunia. Meskipun melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia ini diperkirakan akan berdampak negatif pada kinerja ekspor banyak negara, namun perekonomian negara-negara sedang berkembang diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi. Negara-negara berkembang diperkirakan mendapatkan keuntungan dari permintaan domestiknya yang masih kuat serta kebijakan ekonomi makro yang telah disiplin dijalankan. Negara-negara pengeksport barang-barang komoditas juga masih diuntungkan dengan harga energi dan bahan makanan yang masih tinggi. Oleh karena itu, ke depan, negara-negara berkembang yang besar seperti Cina, India dan Rusia diperkirakan masih

¹ Sesuai publikasi World Economic Outlook (WEO) dari IMF edisi Update Januari 2008. World Bank juga memprediksikan perlambatan ekonomi global dari 3,6% pada 2007 menjadi 3,3% di 2008.



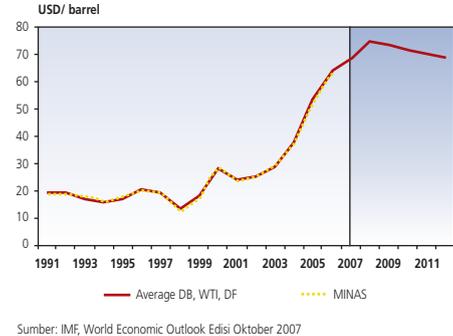
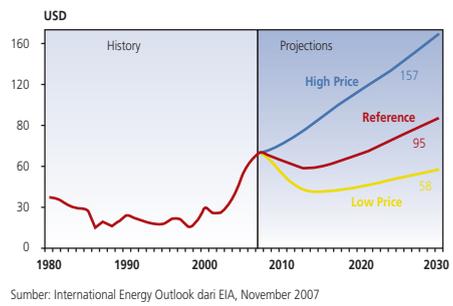
Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Volume Perdagangan Dunia

akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam jangka menengah (2009-2012) perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 5% per tahun dan masih diatas rata-rata historisnya (3,7%). Sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dunia tersebut, volume perdagangan dunia diperkirakan juga akan sedikit melambat dari 7,1% (2007) menjadi 7,0% pada 2008 dan 2009, dan selanjutnya akan tumbuh 7,2%.² Lebih lanjut, perkembangan volume perdagangan dunia ini masih berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dunia, seperti terlihat pada Grafik 4.1.

b. Harga Komoditas Dunia

Harga minyak diperkirakan akan tetap tinggi namun berangur-angsur diprediksi turun akibat perbaikan sisi suplai dan adanya kontraksi permintaan global, sebagai dampak melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam 4 tahun terakhir, harga minyak yang tinggi dipicu oleh tingginya kebutuhan energi dunia, rendahnya stok inventori dan adanya ketidakstabilan geopolitik di negara-negara produsen. Sedangkan kedepan,

2 Berdasarkan publikasi WEO Edisi Oktober 2007

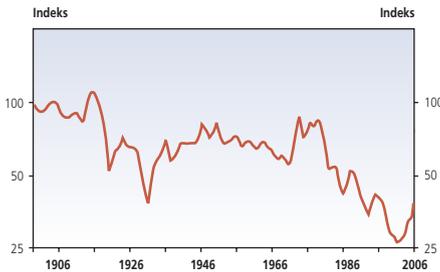


Grafik 4.2 Perkembangan dan Proyeksi Harga Minyak Dunia

harga minyak diperkirakan masih akan tinggi meskipun berangur-angsur akan turun. *Energy International Administration (EIA)* memperkirakan bahwa harga minyak dunia akan turun mulai 2008 yang antara lain disebabkan peningkatan produksi minyak.³ Prediksi ini sejalan dengan ramalan IMF bahwa harga minyak secara rata-rata akan turun sebesar 2,2% mulai 2009, seperti terlihat pada Grafik 4.2.⁴

Harga komoditas primer nonmigas diperkirakan tetap berada pada level yang tinggi

3 Lihat *International Energy Outlook*, November 2007
 4 Harga minyak dimaksud merupakan rata-rata harga Dated Brent(DB), World Texas International (WTI), dan Dubai Fateh (DF). Secara historis, harga rata-rata minyak tersebut sama dengan harga minyak nasional (MINAS), sehingga dalam penyusunan proyeksi, harga minyak ditetapkan searah dengan proyeksi IMF tersebut.



Sumber: Global Financial Data: Grill & Yang (1988), IMF: Pfaffensteller, Newbold & Rayner (2007), Reserve Bank of Australia

Grafik 4.3 Perkembangan Harga Komoditas Riel Dunia 1906-2006

walaupun akan turun secara gradual sebagai akibat peningkatan pasokan global. Siklus harga komoditas primer selama 100 tahun terakhir menunjukkan bahwa setelah melewati periode harga yang tinggi, harga komoditas berangsur-angsur akan turun (Grafik 4.3).⁵ Hal ini terjadi karena insentif dan investasi di bidang komoditas primer akan meningkat sebagai respon terhadap harga yang tinggi. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun kedepan produksi komoditas primer, terutama logam, juga diperkirakan akan meningkat sehingga harga komoditas primer nonmigas turun.⁶ Namun proyeksi harga komoditas primer nonmigas ini sangat ditentukan oleh perkembangan permintaan dunia. Di samping itu, isu konversi energi ke *biofuel* juga dapat memicu kenaikan harga komoditas seperti jagung dan gandum.

c. Suku Bunga Internasional

Tekanan inflasi yang diperkirakan meningkat seiring dengan harga komoditas yang masih tinggi direspons secara bervariasi oleh para bank sentral.

Di samping tekanan inflasi, beberapa bank sentral tampaknya juga mempertimbangkan kondisi stabilitas pasar keuangan dan prospek pertumbuhan ekonomi domestik negaranya masing-masing, sehingga meskipun sejak semester dua 2007 inflasi negara-negara industri dan negara sedang berkembang tetap tinggi, respons yang dilakukan para bank sentral berbeda-beda. Bank sentral Amerika (*The Fed*) memberi bobot yang tinggi baik pada pemulihan krisis di pasar keuangan maupun pada pemberian stimulus perekonomian domestik, terlihat dari agresivitas penurunan Fed Fund Rate dari 5,25% pada September 2007 menjadi 3,50% pada Januari 2008. Sebaliknya, bank sentral Uni Eropa (ECB) dan Jepang (BOJ) tampaknya lebih memprioritaskan prospek tekanan inflasi domestik yang tetap tinggi, sehingga memilih untuk mempertahankan tingkat bunga.

d. Aliran FDI Global

Sementara itu, aliran masuk FDI global baik ke negara maju maupun ke negara berkembang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perbaikan iklim usaha di banyak negara di dunia. Aliran masuk FDI global ini diperkirakan akan terus meningkat sampai 2011.⁷ Survei yang dilakukan UNCTAD menunjukkan bahwa hampir dua per tiga responden optimis aliran masuk FDI global akan terus meningkat sampai 2009.⁸ Proyeksi FDI global yang masih optimis ini antara lain didukung oleh ekonomi dunia yang diperkirakan masih kondusif, adanya perbaikan iklim usaha (*business environment*) di banyak negara, perbaikan

5 Lihat Reserve Bank of Australia (2007), "The Recent Rise in Commodity Prices: a Long-Run Perspective."

6 IMF memperkirakan rata-rata penurunan harga 2008-2012 adalah sebesar 6,8%.

7 Lihat World Investment Prospects 2011 yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit, The Economist pada 2007

8 World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development dan World Investment Prospects Survey 2007-2009.

Tabel 4.1 Proyeksi Aliran Masuk FDI Global 2008-2011

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
World FDI Inflows	618,1	563,4	730,2	971,7	1335,1	1474,7	1406,4	1470,3	1536,8	1604,0
% change, year on year	-27,4	-8,8	29,6	33,1	37,4	10,5	-4,6	4,5	4,5	4,4
% of GDP	1,9	1,5	1,8	2,2	2,8	2,8	2,5	2,5	2,4	2,4
FDI inflows to developed countries	421,1	354,6	379,5	546,8	824,4	940,2	879,0	925,5	972,6	1017,3
% change, year on year	-25,2	-15,8	7,0	44,1	50,7	14,0	-6,5	5,3	5,1	4,6
% of GDP	1,7	1,3	1,2	1,7	2,4	2,6	2,3	2,3	2,3	2,4
% of world total	68,1	62,9	52,0	56,3	61,7	63,8	62,5	62,9	63,3	63,4
FDI inflows to emerging markets	197,0	208,9	350,7	424,9	510,7	534,6	527,4	544,8	564,2	586,7
% change, year on year	-31,5	6,0	67,9	21,1	20,2	4,7	-1,3	3,3	3,6	4,0
% of GDP	2,5	2,4	3,4	3,5	3,6	3,3	2,9	2,7	2,6	2,4
% of world total	31,9	37,1	48,0	43,7	38,3	36,2	37,5	37,1	36,7	36,6

Sumber: National Statistics, IMF, OECD, UNCTAD, The Economist Intelligence Unit

teknologi, dan ketatnya persaingan global yang akan mendorong perusahaan terus mencari lokasi imbal hasil investasi yang lebih baik.⁹ Namun kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, peraturan-peraturan yang tidak pro-investasi, faktor geopolitik, *global imbalances*, harga minyak dan kondisi pasar keuangan yang masih bergejolak berpotensi menjadi penghambat perkembangan aliran FDI global ke depan. Pada 2008 aliran FDI ini diperkirakan akan sedikit turun seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, namun setelah 2009 akan kembali tumbuh sebesar 4,5% sampai 2011. Pertumbuhan aliran masuk FDI global ini terutama bersumber dari negara-negara maju.

4.2. Asumsi Perekonomian Indonesia 2008-2012

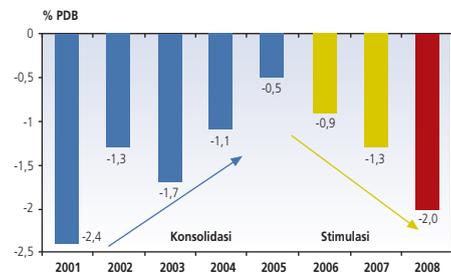
Perbaikan kondisi ekonomi makro selama beberapa tahun terakhir diperkirakan akan tetap

9 Indikator yang digunakan untuk menyusun business environment adalah: *political environment, macroeconomic environment, market opportunities, policy towards private enterprise & competition, policy towards foreign investment, foreign trade & exchange controls, taxes, financing, labor market, dan infrastructure.*

berlangsung meskipun dihadapkan pada tantangan yang berat di sektor eksternal terutama dari tingginya harga minyak dan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

a. Kondisi Keuangan Pemerintah

Dalam jangka panjang otoritas fiskal diperkirakan akan tetap menjaga kesinambungan fiskalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah mengubah orientasi kebijakan fiskalnya dari konsolidasi menjadi stimulus. Perubahan orientasi ini terlihat pada defisit keuangan Pemerintah yang semakin besar (seperti terlihat pada Grafik 4.4), dan pada 2008 diperkirakan akan meningkat menjadi 2% PDB. Namun ke depan,



Grafik 4.4 Perkembangan Kebijakan Fiskal

dalam rangka menjaga kesinambungan fiskalnya, defisit ini diperkirakan berangsur-angsur akan berkurang.

b. Suku Bunga Domestik

Bank Indonesia diperkirakan akan tetap konsisten menerapkan *Inflation Targeting Framework* (ITF) dalam rangka mencapai inflasi yang rendah dan stabil, yang terintegrasi dalam serangkaian kebijakan makro ekonomi dan sektoral. Dalam hal ini, penetapan BI Rate senantiasa konsisten dengan pencapaian target inflasi, namun dengan tidak menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

c. Aliran Masuk FDI

Aliran masuk FDI ke Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Upaya Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan memberikan ruang bagi upaya Pemerintah dalam menggerakkan sektor riil.¹⁰ Disamping itu, Pemerintah juga terus melakukan perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, reformasi sektor keuangan dan pemberdayaan UMKM. Berbagai upaya ini diperkirakan akan menciptakan kondisi kondusif bagi masuknya FDI ke Indonesia. Hasil survei UNCTAD dan *Economist Intelligence Unit* (EIU) dari *The Economists* menyatakan bahwa

¹⁰ Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Melalui Menko Perekonomian, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Inpres ini meliputi: 1) Perbaikan iklim Investasi, 2) Reformasi Sektor Keuangan, 3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan 4) Pemberdayaan UMKM.

Tabel 4.2 Asumsi Dasar Domestik

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pertumbuhan Volume						
Perdagangan Dunia (%)	7,1	7,0	7,0	7,2	7,2	7,2
Harga Minyak (USD/brel)	71	80	78	77	75	73
Pertumbuhan Harga Komoditas						
Primer Non Migas (%)	15,4	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Fed Fund Rate (%)	5,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
BI Rate (%)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Defisit Keuangan Pemerintah (% PDB)	-1,3	-2,0	-1,8	-1,6	-1,5	-1,4
Foreign Direct Investment Neto (% PDB)	1,0	1,25	1,35	1,40	1,45	1,50

aliran masuk FDI ke Indonesia diperkirakan masih positif. Prediksi ini terutama didasarkan pada besarnya pasar domestik dan potensi perkembangannya yang dinilai cukup tinggi untuk mengimbangi risiko yang ada.

Berbagai asumsi eksternal dan domestik di atas dijadikan dasar dalam penyusunan proyeksi ekonomi Indonesia 2008-2012 sebagai berikut:

4.3. Proyeksi Perekonomian Indonesia 2008-2012

Secara garis besar, **proyeksi ekonomi Indonesia 2008-2012 sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan Pemerintah dalam implementasi reformasi struktural**, seperti terlihat pada Diagram 4.1. Dalam lima tahun ke depan, pergerakan perekonomian Indonesia akan lebih ditentukan oleh faktor-faktor yang menggerakkan

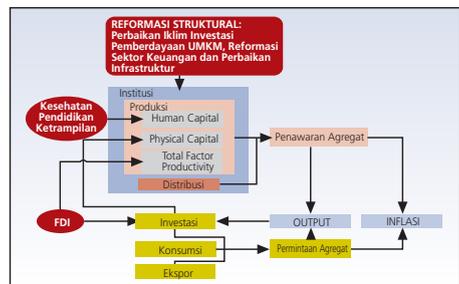


Diagram 4. 1 Reformasi Struktural, Penawaran Agregat dan Kinerja Ekonomi Indonesia

perekonomian dalam jangka panjang, seperti modal fisik, *human capital* dan produktivitas/efisiensi.

Implementasi reformasi struktural diasumsikan berjalan baik sehingga faktor-faktor produksi dan iklim investasi akan mengalami perbaikan secara signifikan. Iklim investasi yang membaik akan menyebabkan aliran masuk FDI yang besar, hingga mencapai 1,5% PDB pada 2012, yang selanjutnya akan meningkatkan akumulasi kapital fisik secara signifikan. Selain itu masuknya FDI juga berimplikasi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi (*total factor productivity*-TFP) proses produksi, sebagai dampak alih teknologi dan manajemen. Peningkatan TFP ini merupakan faktor kunci dalam peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang.¹¹ Disamping itu, kualitas tenaga kerja juga diprediksi mengalami peningkatan akibat berhasilnya implementasi kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan.

Sinergi antara komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan inflasi serta terus membaiknya iklim investasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Stabilitas ekonomi makro yang terus terjaga dan potensi pasar yang besar menjadi daya tarik investor internasional untuk tetap melakukan investasi di Indonesia.¹² Aliran

masuk FDI ke Indonesia yang diperkirakan terus meningkat berkontribusi pada pertumbuhan investasi dan mencapai 13-14% dan pangsa terhadap PDB mencapai sekitar 30% pada 2012. Dampak selanjutnya akan terjadi akumulasi kapital secara besar-besaran dan menjadi motor pendorong peningkatan kapasitas produksi. Kemajuan yang signifikan di sisi penawaran ini pada akhirnya akan menghasilkan lintasan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sebesar 7,4-8,0% pada 2012.

Dengan peningkatan produksi dan perbaikan distribusi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas harga. Meningkatnya kapasitas perekonomian menyebabkan tekanan terhadap inflasi akan berkurang, sehingga inflasi terus menurun. Inflasi yang rendah dan adanya rencana kenaikan upah minimum menyebabkan daya beli riil masyarakat meningkat, sehingga konsumsi swasta diperkirakan akan tetap tumbuh lebih dari 5%, bahkan mencapai sekitar 6% pada 2012 dan masih memegang peranan penting dalam perekonomian.

Sementara itu, daya saing yang meningkat berdampak pada tetap tingginya kinerja ekspor. Berbagai pembenahan struktural yang dilaksanakan Pemerintah, seperti perbaikan infrastruktur, perizinan, bea cukai dan perpajakan diperkirakan memberikan dukungan yang cukup signifikan dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Selain itu, maraknya aliran masuk FDI akan disertai perbaikan teknologi yang berdampak peningkatan produktivitas dan efisiensi. Meskipun prediksi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia akan berdampak kontraktif pada kinerja ekspor Indonesia, harga komoditas yang tetap tinggi dan negara tujuan ekspor yang lebih terdiversifikasi diperkirakan masih akan

11 Dalam World Development Report (2005) dinyatakan bahwa berdasarkan hasil studi dari tahun 1960-2000, faktor dominan (45%-90%) yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan antar negara berasal dari perbedaan dalam TFP, bukan dari perbedaan dalam akumulasi kapital maupun tenaga kerja.

12 Hasil survei UNCTAD menyebutkan bahwa ukuran dan pertumbuhan pasar bersama dengan kualitas lingkungan usaha menjadi determinan utama dalam menentukan lokasi penempatan FDI.

menghasilkan dampak positif bagi produk ekspor Indonesia, hingga tumbuh menjadi 12,5-13,5% pada 2012. Impor diprediksi juga tumbuh tinggi (14,5-15,5%) sebagai akibat kuatnya permintaan domestik. Kondisi diatas menyebabkan neraca transaksi berjalan akan tetap berada dalam kondisi surplus, namun dengan nilai surplus yang terus mengecil. Meskipun surplus neraca transaksi berjalan semakin kecil, namun tingginya aliran masuk FDI diprediksi akan mampu membawa neraca pembayaran dalam kondisi mantap sehingga nilai tukar akan cenderung stabil.

Pada akhirnya sinergi antara stabilitas ekonomi makro dan perbaikan sisi penawaran diprediksi akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tinggi akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran yang ada. Tingkat pengangguran diproyeksikan turun menjadi sekitar 8% pada 2012. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang dibarengi dengan inflasi yang terus menurun akan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan. Pendapatan per kapita masyarakat pun akan meningkat menjadi sekitar USD 3.000 pada 2012.

4.4. Implikasi Kebijakan

Agar target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai, komitmen dan kerja

keras semua pihak mutlak diperlukan. Berikut sejumlah kebijakan yang mungkin dilakukan dalam mendukung tercapainya kondisi paling optimal.

4.4.1. Kebijakan Ekonomi Makro (Moneter dan Fiskal)

Kebijakan moneter harus tetap berhati-hati dengan melihat perkembangan dunia secara lebih detail. Walaupun telah mengadopsi kerangka kebijakan moneter dengan target inflasi (*Inflation Targeting Framework*), penentuan kebijakan moneter dengan tujuan inflasi rendah dan stabilitas ekonomi makro sebaiknya juga memberikan bobot yang lebih besar terhadap stabilitas pasar keuangan, baik global maupun domestik, serta terhadap konstelasi perekonomian eksternal terkini. Sebagai contoh, prediksi turunnya permintaan dunia yang dapat berpengaruh terhadap ekspor dan nilai tukar, serta sisa dampak bergejolaknya pasar keuangan global, sebaiknya dijadikan masukan yang lebih penting saat kebijakan moneter diformulasikan.

Kebijakan fiskal yang diprediksi masih bersifat stimulus di tingkat pusat, sebaiknya disertai dengan kebijakan fiskal di daerah yang sejalan dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Upaya-upaya di sisi fiskal yang bersifat stimulus sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur, mendorong industri yang menjadi daya saing daerah berdaya serap tenaga kerja tinggi, mempertahankan daya beli masyarakat serta mengentaskan kemiskinan.

Koordinasi fiskal dan moneter perlu diperkuat agar resultan yang dihasilkan semakin bersifat komplementer (saling mendukung), tidak bersifat substitusi (saling mengaburkan). Stimulasi fiskal yang bermaksud memberikan efek ekspansif bagi perekonomian seyogyanya tidak disertai

Tabel 4.3 Proyeksi

Proyeksi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Produk Domestik Bruto	63	62	62-6,8	68-7,4	72-7,8	74-8,0
- Konsumsi Swasta	5,0	5,4	5,6-5,9	5,6-6,0	5,6-6,0	5,6-6,0
- Konsumsi Pemerintah	3,9	3,8	4,0-5,0	7,0-9,0	8,0-10,0	8,0-10,0
- Investasi	9,2	9,3	10,5-10,8	11,0-13,0	12,0-13,0	13,0-15,0
- Ekspor Barang & Jasa	8,0	7,9	8,1-9,1	10,5-11,5	11,5-12,5	12,5-13,5
- Impor Barang & Jasa	8,9	9,4	10,4-10,7	12,5-13,5	13,5-14,5	14,5-15,5
Lain-lain						
Pendapatan per Kapita (USD)	1947,1	1980	2145-2180	2375-2410	2650-2685	2950-3000
Pengangguran (%)	9,1	9	9,0-10,0	8,5-9,5	8,0-9,0	7,5-8,5
Target Inflasi (%)	6,0±1%	5,0±1%	4,5±1%	4,0±1%		

*) Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 1/2008

dengan pengetatan moneter yang berdampak sebaliknya. Sementara, penurunan tingkat bunga acuan oleh otoritas moneter sebaiknya juga direspons dengan kebijakan fiskal yang tidak semakin ketat.

4.4.2. Kebijakan Ekonomi Mikro (Struktural)

Untuk mendorong sektor riil agar bergerak lebih cepat, pembangunan infrastruktur menempati posisi kunci. Di satu sisi, infrastruktur yang baik akan menjamin kelancaran arus barang modal dan input antara guna terciptanya proses produksi yang lancar dan fleksibel dalam merespons permintaan pasar. Di sisi lain, infrastruktur yang handal juga menjamin kelancaran distribusi barang komoditas maupun hasil industri, yang berarti meningkatkan sisi penawaran agregat perekonomian. Pada

gilirannya, kondisi ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan inflasi.

Di samping itu, perbaikan institusi pemerintah yang terkait fungsi-fungsi ekonomi terutama dari sisi suplai, perlu diberi prioritas yang tinggi. Hal ini mencakup perbaikan-perbaikan yang terkait investasi (baik perizinan, keamanan dan kepastian usaha), *human capital development* (keterampilan, pendidikan dan kesehatan), efisiensi dan produktivitas produksi, serta distribusi barang dan jasa. Institusi yang berkualitas lebih baik akan menurunkan *overall cost* dari ekonomi yang bermuara pada meningkatnya volume serta daya saing produk. Keduanya berimplikasi positif pada pertumbuhan, stabilitas harga serta fundamental ekonomi lainnya secara keseluruhan.

Bab 5: Topikal Isu

5.1 Mobilitas Faktor, Distribusi Produksi dan Integrasi Ekonomi Kawasan

Dipersiapkan oleh Haris Munandar (Biro Riset Ekonomi – Bank Indonesia)

5.1.1 Latar Belakang dan Motivasi

Pada pertemuan ASEAN bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina, para pemimpin ASEAN setuju untuk mempercepat suatu inisiatif ambisius untuk mengintegrasikan perekonomian mereka dan membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) menjadi pada tahun 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini sebelumnya direncanakan untuk didirikan pada tahun 2020 sesuai keputusan para pemimpin ASEAN pada pertemuan tahun 2003 di Bali. Motivasi utama pada awalnya adalah kebutuhan akan integrasi yang semakin dalam dari ekonomi regional agar perekonomian negara-negara ASEAN mampu berkompetisi dalam suatu dunia baru dimana Cina dan India sedang dan akan tetap tumbuh pesat. MEA diinspirasi akan berwujud suatu pasar dan basis produksi tunggal, suatu area perekonomian yang sangat kompetitif, suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang sejajar dan suatu klub perekonomian yang mampu berintegrasi secara penuh dengan perekonomian global. Untuk mencapai tujuan tersebut cetak biru (*blue print*) MEA diluncurkan pada pertemuan pemimpin ASEAN di Singapura pada November 2007. Cetak biru ini dimaksudkan sebagai peta jalan (*roadmap*) yang memang dibutuhkan untuk mengimplementasikan MEA pada 2015. Risalah cetak biru ini berisi rencana aksi, target dan kurun

waktu implementasi berbagai inisiatif ekonomi menuju terwujudnya MEA.

Membangun suatu pasar dan basis produksi tunggal ASEAN, sesuai cetak biru MEA, mengharuskan terwujudnya terlebih dahulu aliran bebas dari barang, jasa, investasi, modal dan juga tenaga kerja terdidik. Untuk mencapai hal tersebut, 12 sektor prioritas telah dipilih sebagai katalis dimana sektor-sektor ini akan menjalankan sejumlah agenda integrasi jalur cepat.¹ Dalam konteks ini, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area – AFTA) telah berperan sebagai elemen paling penting dari MEA karena AFTA telah memfasilitasi sejumlah agenda menuju bebasnya perdagangan di kawasan. AFTA dibentuk pada Januari 1992 sewaktu pertemuan ASEAN di Singapura. Sekarang, penurunan tingkat tarif menjadi 0-5% dalam kerangka AFTA telah diadopsi oleh mayoritas anggota ASEAN dengan implementasi menyeluruh oleh semua anggota pada 2010. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand (sering disebut sebagai ASEAN-6) setuju untuk menyelesaikan program penurunan tarif secara komprehensif pada 2008

¹ Ke-12 sektor prioritas ini adalah: elektronika, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, produk-produk berbasis kayu, otomotif, produk-produk berbasis karet, tekstil dan *apparel*, produk-produk berbasis pertanian, perikanan, transportasi udara, pariwisata dan logistik.

yang kemudian dimajukan menjadi 2002. Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (negara-negara CLMV) diberikan kelonggaran waktu untuk menyelesaikan program tersebut: Vietnam pada 2006, Laos dan Myanmar pada 2008 dan Kamboja pada 2010.

Secara konsep, MEA dimaksudkan untuk dapat menyerupai pasar tunggal ala Uni Eropa. Dalam konteks ASEAN, masih dibutuhkan sejumlah tindakan untuk meniadakan berbagai halangan dan diskriminasi terhadap pemasok barang, jasa dan faktor produksi yang berasal dari negara-negara ASEAN sendiri. ASEAN masih membutuhkan suatu jalan panjang untuk mencapai suatu pasar tunggal. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan perubahan fundamental dari segi pemikiran oleh para pembuat kebijakan ekonomi ASEAN, terutama dari segi bagaimana mereka memandang integrasi ekonomi kawasan. Impementasi yang relatif berhasil dari AFTA (liberalisasi perdagangan kawasan) telah menjadikan berbagai *issue* terkait mobilitas faktor produksi berada pada agenda utama program-program implementasi MEA.

Tulisan ini bertujuan untuk *memberi gambaran mengenai apa yang akan terjadi setelah mobilitas faktor secara bebas terwujud pasca-pembentukan MEA pada 2015* sekaligus sebagai sarana untuk *memperkuat alat analisis dalam mengantisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Kedua tujuan tersebut secara jelas telah dinyatakan oleh Gubernur Bank Indonesia sewaktu pertemuan tahunan perbankan (*Bankers' Dinner*) pada 18 Januari 2008. Dalam presentasi strategi tahunan ini, Gubernur menyatakan:

"Inisiatif ketiga di bidang moneter adalah memperkuat kemampuan analisis kebijakan untuk

*menyongsong MEA 2015. Penandatanganan Piagam ASEAN atau ASEAN Charter di Singapura pada 20 November 2007 memberi implikasi bahwa program integrasi ekonomi ASEAN merupakan komitmen yang tak dapat ditawar lagi. Hampir tuntasnya agenda perdagangan bebas intra-ASEAN akan membawa perubahan yang signifikan pada pergerakan faktor produksi, baik physical capital yang bergerak lewat financial investment, misalnya FDI atau Portfolio Investment, maupun modal sumber daya manusia melalui berpindahnya skilled labor. Dampak dari bebasnya pergerakan faktor produksi tersebut adalah terciptanya konfigurasi baru dari distribusi produksi perekonomian intra-ASEAN. Determinan dari konfigurasi baru ini haruslah dipahami oleh kita semua. Kita dituntut memiliki kemampuan memprediksi bagaimana karakteristik serta determinan distribusi produksi perekonomian yang baru tersebut. Tentunya karena kita bicara sesuatu yang akan terjadi di masa depan, kita belum memiliki data yang dapat diinterpretasikan melalui suatu kajian empiris. Oleh karena itu diperlukan riset yang bersifat konseptual teoritis sesuai kaidah-kaidah ekonomi dengan menyertakan sejumlah asumsi yang plausible."*²

5.1.2 Pemodelan Ekonomi

Kita tinjau suatu ekonomi (atau unit ekonomi) yang memproduksi suatu barang tunggal menggunakan suatu fungsi produksi yang bersifat *constant return to scale*:³

$$(1) Y_t = F(K_t, H_t).$$

dimana Y_t adalah tingkat output, K_t adalah tingkat dari stok kapital fisik (*physical capital*) and

2. Lihat Pidato Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, pada Pertemuan Tahunan Perbankan: "Meretas Jalan Stabilitas, Mengawal Pembangunan Ekonomi Negeri," 18 Januari 2008, halaman 62.
3. Lihat Bowen, Munandar dan Viena (2005).

H_t adalah tingkat dari stok kapital manusia (*human capital*), semuanya pada waktu t . Untuk memfasilitasi interpretasi kita asumsikan bahwa fungsi produksi berbentuk *Constant Elasticity of Substitution (CES)*:

$$(2) Y_t = \gamma \{ \delta K_t^{-\rho} + (1-\delta) H_t^{-\rho} \}^{-1/\rho}$$

dimana γ adalah parameter efisiensi, δ adalah tingkat penggunaan modal fisik, dan ρ adalah parameter substitusi sedemikian hingga elastisitas substitusi antara dua input adalah $\sigma = 1/(1+\rho)$. Berdasarkan (2) produk marginal (*marginal product*) dari kapital fisik (*physical capital*) adalah:

$$(3) (F_{K_t}) = \gamma \delta \left\{ \delta + (1-\delta) \left[\frac{K_t}{H_t} \right]^\rho \right\}^{-1/(1+\rho)\rho}$$

Dengan menggabungkan (2) dan (3) dapat kita peroleh:

$$(4) (F_{K_t}) = \gamma^{-\rho} \delta \left[\frac{Y_t}{K_t} \right]^{1+\rho}$$

Mirip dengan sebelumnya, ekspresi dari produk marginal dari tenaga kerja efektif (*human capital*) adalah:

$$(5) (F_{H_t}) = \gamma (1-\delta) \left\{ (1-\delta) + \delta \left[\frac{K_t}{H_t} \right]^\rho \right\}^{-1/(1+\rho)\rho}$$

atau

$$(6) (F_{H_t}) = \gamma^{-\rho} (1-\delta) \left[\frac{Y_t}{H_t} \right]^{1+\rho}$$

Kita sekarang memperkenalkan ekonomi kedua dan menganalisis implikasi dari adanya mobilitas faktor produksi antara kedua ekonomi tersebut. Jika kapital fisik dan kapital manusia dapat bergerak sempurna antara kedua ekonomi tersebut maka kita dapat berharap bahwa tiap faktor akan mengalir dari negara yang memberikan tingkat pengembalian yang rendah ke negara yang memberikan tingkat pengembalian yang tinggi sampai tingkat pengembalian tiap faktor (produk marginal) menjadi sama antara kedua ekonomi

tersebut. Namun, jika terdapat halangan dari pergerakan faktor produksi maka tingkat pengembalian hanya sebagian disamakan (*partially equalized*).⁴ Untuk penyederhanaan, kita dapat merepresentasikan halangan-halangan tersebut sebagai variabel proporsional yang berubah menurut waktu, satu relatif terhadap tingkat pengembalian dari kapital fisik, dan satu relatif terhadap tingkat pengembalian kapital manusia. Dengan demikian, hubungan antara tingkat pengembalian antara kedua ekonomi dapat ditulis sebagai:

$$(7) \gamma^{-\rho} \delta \left[\frac{Y_t}{K_t} \right]^{1+\rho} = \lambda_t(k) (\gamma^*)^{-\rho} \delta^* \left[\frac{Y_t}{K_t} \right]^{1+\rho}$$

$$(8) \gamma^{-\rho} \delta (1-\delta) + \delta \left[\frac{Y_t}{H_t} \right]^{1+\rho} = \lambda_t(h) (\gamma^*)^{-\rho} (1-\delta^*) \left[\frac{Y_t}{H_t} \right]^{1+\rho}$$

dimana ‘*’ menyatakan variabel-variabel ekonomi kedua. Rasio dari (7) dan (8) menunjukkan rasio dari kapital manusia dan kapital fisik:

$$(9) \frac{H_t}{K_t} \eta (\lambda_t)^{1/(1+\rho)} \left[\frac{H_t}{K_t} \right]^\theta$$

dimana:

$\eta = [\delta^* (1-\delta)/(1-\delta^*)\delta]^{1/(1+\rho)}$, yang menyebabkan

$\eta = 1$ saat $\delta = \delta^*$;

$\theta = (1+\rho^*)/(1+\rho)$, yang menyebabkan $\theta = 1$ saat

$\rho = \rho^*$;

$\lambda_t = \lambda_t(k) / \lambda_t(h)$, yang menyebabkan $\lambda_t = 1$ saat.

$\lambda_t(k) = \lambda_t(h)$ Dengan menggunakan definisi

tersebut, kita dapat menuliskan (7) sebagai:

$$(10) \frac{Y_t}{K_t} = v \omega (\lambda_t(k))^{1/(1+\rho)} \left[\frac{Y_t}{K_t} \right]^\theta$$

dimana

$$v = (\delta^*/\delta)^{1/(1+\rho)}$$

$$\omega = [(\gamma^*)^{-\rho} \gamma^\rho]^{1/(1+\rho)}$$

4 Halangan terhadap mobilitas *physical capital* mencakup adanya resiko politik, berbagai kontrol kapital dan perbedaan aturan pajak yang menghambat aliran investasi antar negara. Halangan terhadap mobilitas *human capital* mencakup berbagai aturan pemerintah terkait imigrasi dan izin kerja, perbedaan system pension dan bahasa antar negara.

Kita sekarang telah siap untuk menggambarkan implikasi dari model untuk distribusi output dan faktor produksi antara dua ekonomi. Untuk menunjukkan peran dari kapital manusia, tulis kembali (8) sebagai:

$$(11) \frac{Y_i}{H_i} = \frac{\omega \eta}{\nu} (\lambda_i(h))^{1/(1+\rho)} \left[\frac{Y_i}{H_i} \right]^\theta$$

Secara tradisional, (11) merupakan suatu dasar perhitungan produktivitas dan perbandingan antar negara. Namun berbeda dengan literatur-literatur lainnya dimana produktivitas diukur oleh output per tenaga kerja, persamaan (11) mengekspresikan (seperti dalam literatur teori pertumbuhan endogen) produktivitas dalam bentuk output per unit tenaga kerja efektif. Bukti empiris menunjukkan sensitivitas dari perbandingan produktivitas terhadap ukuran kapital manusia yang digunakan.

Untuk memperoleh ekspresi pertama dari hubungan kesamaan proporsi (*equal-share relationship*), perhatikan bahwa (9) dan (10) dapat ditulis sebagai berikut:

$$\frac{H_i}{K_i} = \eta (\lambda_i)^{1/(1+\rho)} \left[\frac{Y_i}{K_i} \right]^\theta = \frac{H_i + (H_i)^\rho \eta (\lambda_i)^{1/(1+\rho)}}{K_i + (K_i)^\rho}$$

$$\frac{Y_i}{K_i} = \nu \omega (\lambda_i(k))^{1/(1+\rho)} \left[\frac{Y_i}{K_i} \right]^\theta = \frac{Y_i + (Y_i)^\rho \nu \omega (\lambda_i(k))^{1/(1+\rho)}}{K_i + (K_i)^\rho}$$

Dengan menggabungkan kedua ekspresi diatas dihasilkan:

$$(12) \frac{H_i}{H_i + (H_i)^\rho \eta \lambda_i^{1/(1+\rho)}} = \frac{Y_i}{Y_i + (Y_i)^\rho \nu \omega \lambda_i(k)^{1/(1+\rho)}} = \frac{K_i}{K_i + (K_i)^\rho}$$

Persamaan (12) menunjukkan suatu hubungan antara proporsi dari output total, kapital fisik, dan kapital manusia dari ekonomi pertama terhadap kedua ekonomi. Perbedaan dalam teknologi antara kedua ekonomi hanya menyebabkan penskalaan dari variabel-variabel awal. Suatu perbedaan antara γ^* dan γ menunjukkan suatu perbedaan yang netral dari teknologi yang tidak mengandung efek pada seleksi optimal dari kapital fisik dan kapital manusia, namun

memiliki efek pada distribusi output melalui ω pada (12). Perbedaan antara elastisitas substitusi menyebabkan munculnya pangkat θ sementara perbedaan antara parameter-parameter lainnya menyebabkan penskalaan berganda dari sejumlah variabel.

Persamaan (12) berisi sejumlah hubungan proporsi yang bergantung dari asumsi-asumsi yang berbeda terkait teknologi dan mobilitas faktor produksi. Jika teknologi identik antara kedua ekonomi tersebut maka (12) disederhanakan menjadi:

$$(13) \frac{H_i}{H_i + H_i^* \lambda_i^{1/(1+\rho)}} = \frac{Y_i}{Y_i + Y_i^* \lambda_i(k)^{1/(1+\rho)}} = \frac{K_i}{K_i + K_i^*}$$

Dalam bentuk baru dari hubungan kesamaan proporsi ini, sejumlah variabel dari ekonomi kedua diskalakan oleh perbedaan proporsional dalam tingkat pengembalian. Sebagai contoh, dari (13), ketiadaan halangan pada mobilitas kapital fisik ($\lambda_i(k)=1$) menyebabkan kesamaan proporsi output dan proporsi kapital fisik yang berbeda dengan proporsi kapital manusia. Jika diasumsikan bahwa $\lambda_i(k)=1$ dan $\lambda_i(h)=1$ maka hubungan kesamaan proporsi mempunyai bentuk yang sederhana, yaitu:

$$(14) \frac{H_i}{H_i + H_i^*} = \frac{Y_i}{Y_i + Y_i^*} = \frac{K_i}{K_i + K_i^*}$$

Hasil ini mengatakan bahwa saat tak lagi terdapat halangan terhadap mobilitas faktor produksi serta teknologi adalah seragam, proporsi dari output total, kapital fisik total dan kapital manusia total dari tiap ekonomi akan identik.

5.1.3 Implikasi Kebijakan

Hubungan kesamaan proporsi (14) memiliki tiga implikasi. Pertama, suatu realokasi dari kapital fisik antara ekonomi-ekonomi yang terintegrasi (investasi!), yaitu, pastilah akan disertai oleh peningkatan output dan peningkatan kapital manusia (baik melalui aliran masuk kapital manusia

asing atau akumulasi dari kapital manusia domestik) untuk menyeimbangkan kesamaan dari proporsi-proporsi dunia. Mirip dengan hal tersebut, suatu kebijakan yang meningkatkan proporsi kapital manusia total suatu negara akan menaikkan proporsi dari output total ekonomi terintegrasi negara tersebut dan proporsi dari kapital fisik total negara tersebut (baik melalui aliran masuk kapital fisik asing maupun akumulasi kapital domestik).

Kedua, kerangka berpikir ini dapat dihubungkan dengan topik konvergensi output dimana jika (14) berlaku maka kedua persamaan berikut juga akan berlaku:

$$(15) \frac{H_i}{H_i} = \frac{Y_i + Y_i^*}{H_i + H_i^*} \qquad (16) \frac{Y_i}{H_i} = \frac{Y_i^*}{H_i^*}$$

Dari (16) menjadi jelas bahwa, jika hubungan kesamaan-proporsi berlaku, kedua ekonomi akan memiliki output per tenaga kerja efektif yang sama. Implikasi ini adalah esensi dari hipotesis konvergensi produktivitas, dalam hal ini diinterpretasikan dalam bentuk unit tenaga kerja efektif dan bukan per kapita.

Ketiga, hubungan kesamaan-proporsi (14) dapat diperluas untuk kasus suatu ekonomi terintegrasi yang terdiri dari $j = 1, \dots, N$ anggota. Jika kesemua anggota memiliki teknologi yang sama, dan terdapat mobilitas yang sempurna dari kapital fisik atau kapital manusia di antara anggota, maka penyamaan tingkat pengembalian dari faktor produksi menyebabkan:

$$(16) \frac{H_u}{\sum_{j=1}^N H_{j^u}} = \frac{Y_u}{\sum_{j=1}^N Y_{j^u}} = \frac{K_u}{\sum_{j=1}^N K_{j^u}} \quad \text{for } i = 1, \dots, N$$

Himpunan persamaan ini mengekspresikan distribusi dari output dan faktor produksi di antara N anggota dari suatu ekonomi yang terintegrasi secara penuh. Seperti juga dengan (12), ekspresi (17) dapat diperluas untuk mengakomodasi perbedaan dalam teknologi atau ketidaksempurnaan pasar faktor produksi di antara negara-negara anggota.

5.1.4 Epilog

Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), hubungan kesamaan-proporsi menawarkan suatu ramalan mengenai bentuk limit dari distribusi produksi antar negara anggota-anggota ASEAN pasca 2015. Negara yang unggul dari segi *human capital*, dan oleh karenanya memiliki proporsi total *human capital* yang tinggi, akan juga mempunyai bagian stok *physical capital* dan irisan kue output ekonomi regional yang paling besar. Ini mudah dimengerti karena sumber daya manusia yang unggul merupakan magnet sekaligus komplemen dari kapital fisik yang padat dengan teknologi canggih dan mutakhir sementara teknologi merupakan komponen yang mampu melipatgandakan produktivitas ekonomi dalam takaran eksponensial.

Selain itu, negara ASEAN yang mampu menyediakan atmosfer (baca: kebijakan) paling kondusif bagi datangnya investasi asing berpeluang paling besar untuk memiliki stok *physical capital* dengan proporsi paling besar relatif terhadap negara-negara ASEAN lain. Selain itu, ekonomi yang semakin maju akan menyebabkan tingginya tingkat investasi domestik masyarakatnya, sehingga akan semakin memperbesar proporsi *physical capital* negara tersebut. Negara dengan modal fisik yang besar (baik keuangan maupun non-keuangan) akan mampu mempekerjakan kalangan tenaga kerja unggul (*highly skilled*) baik domestik maupun asing yang merupakan energi ampuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Sesuai dengan sumber daya dan kebijakan ekonomi yang dipilih oleh masing-masing negara ASEAN, tiap anggota ASEAN akan menempati *ranking* tertentu dalam urutan negara partisipan MEA dari segi output ekonomi, *human capital* dan *physical capital*. Tentu saja menjadi menarik untuk menjawab pertanyaan: dimanakah posisi Indonesia?

5.2 Integrasi Ekonomi Kawasan, Investasi dan Peran Otoritas Moneter¹

Dipersiapkan oleh Haris Munandar, Ferry Kurniawan, Oki Hermansyah (Biro Riset Ekonomi – Bank Indonesia)

5.2.1 Latar Belakang dan Motivasi

Dalam kancah perekonomian global, sejumlah negara sering menggabungkan diri membentuk suatu kelompok ekonomi yang terintegrasi. Sebagai contoh adalah ke-10 negara ASEAN yang membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Pendirian suatu klub ekonomi yang terintegrasi secara penuh (*fully integrated economy*) dapat mengubah distribusi output ekonomi negara-negara yang terlibat. Artinya, dalam suatu gabungan perekonomian yang terintegrasi dimana mobilitas faktor produksi sudah tidak menemui hambatan lagi dan penggunaan teknologi untuk keperluan produksi boleh dikatakan semakin seragam, maka pangsa dari total output, total modal fisik (*physical capital*) dan total sumber daya manusia (*human capital*) suatu negara diprediksikan akan identik. Negara yang pangsa outputnya kecil akan memiliki proporsi stok kapital (baik fisik maupun SDM) yang juga kecil.²

Implikasi dari adanya hubungan tersebut adalah bahwa realokasi modal fisik (investasi) ke suatu negara akan menyebabkan peningkatan output negara tersebut dan adanya aliran masuk *human capital* asing atau akumulasi *human capital* domestik. Akibatnya, kebijakan-kebijakan untuk menciptakan iklim investasi kondusif serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia

(*human capital*) adalah vital sifatnya, bukan hanya agar negara dapat bersaing, namun juga agar negara tersebut dapat bertahan hidup, mengingat penurunan pangsa *human capital* akan berakibat menurunnya output ekonomi yang berarti merosotnya taraf hidup masyarakat negara tersebut.

Apabila direnungkan lebih lanjut, strategi peningkatan *human capital* menuntut implementasi jangka menengah-panjang yang melibatkan komitmen dan implementasi anggaran yang besar serta kerja keras yang terus menerus, terutama dari dunia pendidikan, sehingga dapat dikatakan peran bank sentral pada area ini sangat terbatas. Namun di sisi lain, bank sentral *kemungkinan* dapat berbuat sesuatu terkait strategi peningkatan stok kapital fisik. Peningkatan *physical capital* secara signifikan membutuhkan investasi yang tinggi, baik dari sumber domestik (akumulasi tabungan masyarakat) maupun dari luar negeri (melalui aliran masuk FDI).

Sejumlah penelitian telah berusaha menyelidiki kemungkinan hubungan antara kinerja kebijakan moneter (yang merupakan *domain* bank sentral) dengan tingkat investasi. Dalam tataran teori, Barro (1996) menemukan secara konseptual bahwa efek inflasi terhadap pertumbuhan dan investasi adalah negatif dan signifikan, sementara Agenor (2004) menyatakan bahwa membaiknya stabilitas ekonomi makro akibat kebijakan yang tepat menyebabkan peningkatan tabungan dan investasi. Dalam kaitan ini menjadi penting dan menarik untuk mengkaji apakah terdapat bukti empiris dari hasil kajian konseptual tersebut. Pencarian bukti tersebut sangat penting bila dikaitkan dengan akan segera

1 Tulisan ini merupakan rangkuman Working Paper DKM No. WP/17/2007 berjudul "Integrasi Ekonomi Kawasan, Mobilitas Faktor Produksi dan Peran Bank Sentral."

2 Seperti pada *topical issue 1*, kondisi ini disebut sebagai hubungan kesamaan-proporsi (*equal-share*).

terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja kebijakan moneter (terutama inflasi) dengan kinerja investasi di negara-negara ASEAN (utamanya aliran masuk FDI). Bila memang hubungan tersebut ditemukan, maka otoritas moneter memang dapat berperan untuk meningkatkan stok kapital fisik (*physical capital*) suatu negara yang bermuara pada peningkatan pangsa output ekonomi (baca: kemakmuran) negara tersebut. Dengan kata lain, otoritas moneter dapat berperan secara positif dalam menyongsong pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

5.2.2 Data dan Metode Analisis

Untuk meneliti keberadaan hubungan tersebut di atas, Bank Indonesia telah melakukan suatu studi empiris yang melibatkan data ekonomi makro negara-negara ASEAN-7 (Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam) pada periode 1991-2006. Tahap pertama dalam studi tersebut adalah dilakukannya analisis jangka pendek menggunakan data investasi, inflasi dan GDP riil tahunan tiap negara, dimana data diperoleh dari *International Monetary Fund* (IMF) dan *Asian Development Bank* (ADB).³ Dalam *jangka pendek*, spesifikasi model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Model 1: } y_t = a_1 + b_1 x_{1,t-1} + e_{1t}$$

$$\text{Model 2: } y_t = a_2 + b_2 x_{2,t-1} + e_{2t}$$

dimana y_t adalah pertumbuhan investasi pada tahun t , $x_{1,t-1}$ adalah inflasi pada tahun sebelumnya dan $x_{2,t-1}$ adalah pertumbuhan GDP Riil pada tahun sebelumnya. e_{1t} diasumsikan memiliki properti IID. Spesifikasi di atas berusaha menangkap

pola hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di suatu periode terhadap pertumbuhan investasi di periode berikutnya. Nilai koefisien b_1 atau b_2 yang signifikan akan mengkonfirmasi keberadaan hubungan yang dimaksud. Secara teoretis nilai b_1 negatif (inflasi tinggi mengurangi investasi) dan nilai b_2 positif (pertumbuhan ekonomi akan lebih mendorong pertumbuhan investasi).

Analisis jangka panjang menggunakan *cross-section* data aliran masuk FDI (*inward* FDI) negara tahun 2006 serta *cross-section* data rata-rata *inward* FDI periode 2002-2006 dari ke-7 negara ASEAN diatas. Penggunaan rata-rata tersebut bertujuan untuk meminimumkan volatilitas yang tinggi dari data FDI. Terlihat di sini bahwa tahun 2006 dipakai sebagai tahun referensi. Untuk masing-masing data *cross-section*, dihitung inflasi jangka panjang menggunakan rata-rata inflasi tahunan (CPI) periode 1991-2005 sedangkan instabilitas ekonomi makro didekati dengan standar deviasi pertumbuhan PDB nominal juga pada periode 1991-2005. Tingkat investasi dalam analisis jangka panjang menggunakan data aliran masuk FDI dari *International Monetary Fund*. Model regresi *jangka panjang* tersebut dibuat sebagai berikut:

$$\text{Model 4: } y_i = c_1 + d_1 x_{1,i} + e_{3i}$$

$$\text{Model 5: } y_i = c_2 + d_2 x_{2,i} + e_{4i}$$

dimana y_i adalah aliran masuk FDI ke negara i , $x_{1,i}$ inflasi jangka panjang negara i , $x_{2,i}$ tingkat instabilitas ekonomi makro negara i , dimana e_3 dan e_4 diasumsikan memiliki properti IID. Spesifikasi diatas berusaha menangkap pola hubungan antara inflasi jangka panjang dan stabilitas ekonomi makro terhadap besarnya aliran masuk FDI di negara-negara ASEAN. Nilai koefisien d_1 atau d_2 yang signifikan akan mengkonfirmasi keberadaan hubungan yang dimaksud. Secara teoretis, inflasi jangka panjang yang rendah akan mendorong

³ Data IMF yang digunakan adalah International Financial Statistics (IFS) berbagai tahun.

inward FDI sedangkan instabilitas ekonomi makro yang tinggi akan menghambat *inward* FDI.

5.2.3 Analisis Jangka Pendek

Hasil analisis regresi untuk jangka pendek (tahunan) ditampilkan pada Tabel 5.1 sampai 5.7. Di beberapa negara (termasuk Indonesia dan Thailand), terlihat bahwa inflasi tahunan yang rendah dan peningkatan GDP riil berasosiasi dengan tumbuhnya investasi. Namun ternyata hubungan tersebut kurang meyakinkan di beberapa negara ASEAN lain yang diteliti (Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam) sehingga tidak dapat diperoleh suatu hasil yang konklusif.

Tabel 5.1 Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Thailand

	Sampel: 2002-2006		Sampel: 1992-2006	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
Inflasi Tahunan (-1)	-0.006 (0.8086)		-0.035 (0.0696)	
Pertumbuhan PDB Riil (-1)		0.030 (0.0319)		0.018 (0.0354)

Note: Variabel dependen adalah **Pertumbuhan Investasi**; nilai dalam kurung adalah **p-value**

Tabel 5.2 Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Indonesia

	Sampel: 2002-2006		Sampel: 1992-2006	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
Inflasi Tahunan (-1)	-0.028 (0.0250)		-0.005 (0.0023)	
Pertumbuhan PDB Riil (-1)		0.070 (0.2783)		0.012 (0.0124)

Note: Variabel dependen adalah **Pertumbuhan Investasi**; nilai dalam kurung adalah **p-value**

Tabel 5.3 Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Kamboja

	Sampel: 2002-2006		Sampel: 1992-2006	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
Inflasi Tahunan (-1)	-0.028 (0.0250)		-0.005 (0.0023)	
Pertumbuhan PDB Riil (-1)		0.070 (0.2783)		0.012 (0.0124)

Note: Variabel dependen adalah **Pertumbuhan Investasi**; nilai dalam kurung adalah **p-value**

Tabel 5.4 Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Singapura

	Sampel: 2002-2006		Sampel: 1992-2006	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
Inflasi Tahunan (-1)	-0.017 (0.8380)		0.038 (0.1042)	
Pertumbuhan PDB Riil (-1)		0.014 (0.2882)		0.012 (0.0638)

Note: Variabel dependen adalah **Pertumbuhan Investasi**; nilai dalam kurung adalah **p-value**

Tabel 5.5 Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Malaysia

	Sampel: 2002-2006		Sampel: 1992-2006	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
Inflasi Tahunan (-1)	0.036 (0.2049)		0.019 (0.6281)	
Pertumbuhan PDB Riil (-1)		0.011 (0.1636)		0.013 (0.2173)

Note: Variabel dependen adalah **Pertumbuhan Investasi**; nilai dalam kurung adalah **p-value**

Tabel 5.6 Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Filipina

	Sampel: 2002-2006		Sampel: 1992-2006	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
Inflasi Tahunan (-1)	0.000 (0.9981)		0.007 (0.3104)	
Pertumbuhan PDB Riil (-1)		-0.017 (0.4737)		-0.010 (0.3992)

Note: Variabel dependen adalah **Pertumbuhan Investasi**; nilai dalam kurung adalah **p-value**

Tabel 5.7 Pertumbuhan Investasi dan Kinerja Ekonomi Makro Vietnam

	Sampel: 2002-2006		Sampel: 1992-2006	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
Inflasi Tahunan (-1)	-0.003 (0.4570)		0.007 (0.0000)	
Pertumbuhan PDB Riil (-1)		-0.024 (0.2468)		0.007 (0.8188)

Note: Variabel dependen adalah **Pertumbuhan Investasi**; nilai dalam kurung adalah **p-value**

Hasil analisis jangka pendek di atas harus dilihat dengan hati-hati. Di satu sisi, hasil yang diperoleh bergantung dari siklus bisnis masing-masing negara sehingga sulit dicari pola yang seragam dalam lingkup ASEAN. Di sisi lain, hal yang menarik dari integrasi ekonomi adalah efeknya dalam jangka panjang, bukan jangka

pendek. Di samping itu, fokus dari kebijakan investasi negara umumnya adalah pada aliran masuk dari luar negeri mengingat investasi dalam negeri yang cenderung sudah stabil. Dari segenap investasi luar negeri, FDI merupakan yang paling diminati karena efek dari FDI yang lebih langsung terasa ke sektor riil (dibandingkan dengan efek dari investasi portofolio yang cenderung tinggal di pasar keuangan saja). Jadi, bagaimana menarik FDI sebanyak-banyaknya merupakan tujuan dari banyak negara berkembang, termasuk negara-negara ASEAN. Analisis jangka panjang berikut diharapkan dapat memberi penjelasan atas sejumlah *issue* tersebut.

5.2.4 Analisis Jangka Panjang

Hasil analisis jangka panjang ditampilkan pada Tabel 5.8 dan 5.9 di bawah. Kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara inflasi yang rendah dengan

Tabel 5.8 Inward FDI dan Kinerja Ekonomi Makro - Tahun Referensi 2006

	Model 3	Model 4
Inflasi Jangka Panjang (1991-2005)	-0.141 (0.0112)	
Instabilitas Ekonomi Makro (1991-2005)		-0.061 (0.052)

Note: Variabel dependen adalah *Inward FDI 2006*; nilai dalam kurung adalah *p-value*

Tabel 5.9 Inward FDI dan Kinerja Ekonomi Makro - Periode Referensi 2002-2006

	Model 3	Model 4
Inflasi Jangka Panjang (1991-2005)	-0.148 (0.0031)	
Instabilitas Ekonomi Makro (1991-2005)		-0.064 (0.0325)

Note: Variabel dependen adalah *Rata-Rata Inward FDI 2002-2006*; nilai dalam kurung adalah *p-value*

tingkat *inward FDI* yang tinggi. Negara-negara yang berhasil mencapai tingkat inflasi yang rendah secara konsisten akan memperoleh aliran masuk FDI yang tinggi. Disamping itu terlihat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara stabilitas ekonomi makro dan aliran masuk FDI. Negara-negara dengan ekonomi makro yang stabil memiliki aliran masuk FDI yang tinggi, demikian pula sebaliknya. Kedua hasil tersebut berlaku untuk seluruh negara-negara ASEAN.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan bank sentral yang bertujuan *mencapai dan mempertahankan inflasi yang rendah serta ekonomi makro yang stabil* adalah kebijakan moneter yang *pro-investasi!*

5.2.5 Kesimpulan

Integrasi ekonomi kawasan akan menghasilkan distribusi ekonomi yang bergantung dari distribusi faktor produksi baik kapital fisik maupun sumber daya manusia (*human capital*) tiap negara. Peran investasi menjadi semakin sentral dan langsung menentukan posisi kesejahteraan suatu negara relatif terhadap *peer*-nya di kawasan. Bank sentral melalui kebijakan moneternya dapat berperan mempengaruhi kinerja investasi: inflasi yang rendah dan ekonomi makro yang stabil mendorong investasi secara signifikan. Dengan kata lain kebijakan moneter menuju inflasi rendah dan ekonomi makro yang stabil merupakan kebijakan moneter yang *pro-investasi*. Adanya integrasi ekonomi kawasan menjadikan peran bank sentral dalam meningkatkan investasi menjadi semakin esensial.

5.3 Dampak Kedekatan Lokasi Terhadap Ekspor Komoditas Provinsi: Pendekatan Model Gravitasi

Dipersiapkan oleh Yayat Cadarajat dan Yanfitri (Biro Riset Ekonomi – Bank Indonesia)

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 membuka peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui integrasi ekonomi dan keuangan di kawasan. Dari sisi perdagangan internasional, upaya Indonesia dalam menarik manfaat optimal dari pembentukan pasar tunggal ASEAN akan tergantung dari kemampuan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Luasnya wilayah Indonesia dengan komoditas unggulan ekspor yang relatif bervariasi antar provinsi membuka peluang peningkatan diversifikasi ekspor Indonesia baik dalam rangka meningkatkan ekspor ke kawasan ASEAN, Asia lainnya maupun dunia. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar yang luas bagi ekspor negara ASEAN lainnya, namun juga dapat memanfaatkan negara tetangga untuk menjadi pasar bagi ekspor Indonesia. Secara spesifik, kinerja ekspor Indonesia ditentukan oleh kinerja ekonomi dan perdagangan masing-masing propinsi. Oleh karena itu pola perdagangan setiap propinsi menjadi penting untuk diperhatikan.

Melengkapi penelitian mengenai permintaan ekspor Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah jarak antara lokasi produksi (lokasi eksportir) dengan pasar (lokasi importir) juga menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor. Kajian ini menggunakan data panel 15 komoditas utama dari 24 propinsi di Indonesia dengan *partner* dagang meliputi negara ASEAN ditambah Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Bangladesh, India, Srilanka, Jepang, Korea Selatan, dan China. Metodologi yang digunakan

adalah regresi panel atas model gravitasi dengan *random effect* dengan periode estimasi 1999-2006. Sebelum menguji model gravitasi, kajian ini diawali dengan analisis pola ekspor dari setiap propinsi di Indonesia.

5.3.1 Gambaran Singkat Ekspor Provinsi-Propinsi di Indonesia

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perdagangan internasional di suatu negara dapat dibangun oleh perdagangan dari setiap propinsi. Luasnya wilayah Indonesia dengan komoditas unggulan ekspor yang relatif bervariasi antar propinsi dapat didayagunakan untuk memacu pertumbuhan ekspor propinsi tersebut. Hingga saat ini propinsi yang paling dominan melakukan kegiatan ekspor adalah Jawa Barat diikuti Riau, Jawa Timur dan Jakarta (Tabel 5.1). 26,2% ekspor Jabar ditujukan ke ASEAN dengan negara tujuan utama Malaysia, Filipina, Thailand,

Tabel 5.10 Kontribusi Provinsi Terhadap Ekspor Impor Nonmigas

PROVINSI	E K S P O R			
	2005	2006	2007	Rata-Rata 2001-2007
JAWA BARAT	23,2	21,4	19,4	26,2
RIAU	13,6	13,0	13,5	14,0
JAWA TIMUR	9,9	10,4	11,5	10,3
JAKARTA	8,1	7,9	7,8	9,1
SUMUT	6,6	6,4	6,5	6,0
KALTIM	5,9	6,2	5,9	5,5
BANTEN	7,7	7,6	6,6	5,4
JAWA TENGAH	4,2	3,9	3,8	4,1
IRIAN	3,8	3,9	4,8	3,2
KALSEL	3,1	3,7	3,8	3,0

SUMBER : BI, DSM

dan Vietnam. Propinsi Riau melakukan kegiatan ekspor terutama ke kawasan Singapura.

Jika dilihat secara lebih detail, maka setiap wilayah di Indonesia memiliki kekhususan komoditas utama yang diekspor, misalnya:

- Propinsi di Sumatera : minyak sawit, karet mentah,
- Propinsi di Kalimantan : barang-barang tambang (batu bara)
- Propinsi di Sulawesi : kaklat, minyak sawit, metalliferous
- Propinsi di Pulau Jawa

dan Bali : komoditas industri seperti tekstil & garmen, kertas, furniture & produk kayu

- Propinsi di Nusa Tenggara: metalliferous
- Irian Jaya : metalliferous

Dari Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar propinsi di Indonesia hanya memiliki komoditas ekspor utama yang terbatas pada satu hingga dua komoditas. Hanya beberapa propinsi di Pulau Jawa yang memiliki komoditas ekspor unggulan yang lebih terdiversifikasi.

Tabel 5.11 Komoditas Ekspor Utama dan Beberapa Wilayah Pengekspornya

FISH, CRUST., MOLLUSCS AND THEIR PREP		COAL, COKE AND BRIQUETTES		OFFICE MACH. & AUT. DATA PROC.	
JAWA TIMUR	31.9	KALIMANTAN TIMUR	59.1	RIAU	48
JAKARTA	12.4	KALIMANTAN SELATAN	35.6	JAWA BARAT	39.4
SUMATERA UTARA	10.3	BENGGULU	1.9	JAKARTA	0.8
LAMPUNG	6.9	LAMPUNG	1.6	SUMATERA UTARA	0.1
SULAWESI SELATAN	6.2	SUMATERA SELATAN	0.5	JAWA TIMUR	0
Total	67.7	Total	98.7	Total	88.3
COFFEE, TEA, COCOA, SPICES		FIXED VEGETABLE OILS & FATS		TELECOMMUNICATION & REPRO. APP	
SULAWESI SELATAN	21.2	SUMATERA UTARA	38.9	JAWA BARAT	66.3
LAMPUNG	17.4	RIAU	36.1	RIAU	19.4
JAWA BARAT	13	SUMATERA BARAT	5.5	JAKARTA	4.2
SUMATERA UTARA	11.2	SUMATERA SELATAN	4.7	JAWA TIMUR	1
JAWA TIMUR	10.9	SULAWESI UTARA	3.4	JAWA TENGAH	0.8
Total	73.7	Total	88.6	Total	91.6
CRUDE RUBBER		PAPER, PAPERBOARD & MFD THEREOF		FURNITURE AND PARTS THERE OF	
SUMATERA SELATAN	25.8	JAWA TIMUR	35.5	JAWA TENGAH	32.9
JAMBI	8.8	JAWA BARAT	34.4	JAWA TIMUR	26.5
RIAU	8.2	RIAU	15.3	JAWA BARAT	21.4
SUMATERA BARAT	7.9	JAKARTA	2.6	JAKARTA	6.4
KALIMANTAN BARAT	6.4	JAWA TENGAH	0.9	BALI	3
Total	57.1	Total	88.7	Total	90.2
METALLIFEROUS ORES & METAL SCR		TEXTILE YARNS, FABRICS & PROD.		CLOTHING	
IRIAN JAYA	36.5	JAWA BARAT	61.8	JAWA BARAT	39.8
NUSA TENGGARA BARAT	18	JAWA TENGAH	17.3	JAKARTA	39.1
SULAWESI SELATAN	14.4	JAKARTA	8.6	JAWA TENGAH	8.9
RIAU	1.2	JAWA TIMUR	6.4	JAWA TIMUR	1.9
JAWA BARAT	0.6	BALI	0.6	BALI	1.8
Total	70.7	Total	94.6	Total	91.6

5.3.2 Model dan Hasil Estimasi

Model gravitasi dalam teori perdagangan internasional pada dasarnya menggambarkan pengaruh ukuran pasar dan jarak terhadap tingkat perdagangan. Model gravitasi menggunakan asumsi bahwa jarak mencerminkan biaya dan hambatan perdagangan. Model tersebut mengasumsikan bahwa setiap negara akan memproduksi barang yang berbeda, tetapi dengan fungsi utilitas yang sama dan seragam. Dalam model tersebut juga berlaku asumsi *constant elasticity of substitution* (CES) yang mengandung implikasi bahwa ketika beberapa wilayah memproduksi barang yang sama, maka biaya transportasi akan menjadi penentu dalam melakukan perdagangan.

Persamaan dasar model tersebut adalah sebagai berikut :

$$T_{ij} = A_{ij} \times \left(\frac{Y_i \times Y_j}{Dist_{ij}} \right) \quad (1)$$

Dalam kajian, persamaan (1) dinyatakan dalam bentuk linier dengan beberapa penyesuaian variabel yaitu penyesuaian variabel Y_j dengan M_j untuk mencerminkan permintaan riil dari negara importir dan menambahkan variabel nilai tukar riil (RER) untuk menangkap pengaruh dari daya saing harga ekspor. Dengan demikian model analitikal dapat dinyatakan dalam persamaan (2) berikut:

$$\log T_{ij} = \alpha + \beta_1 \log Dist_{ij} + \beta_2 \log Y_i + \beta_3 \log M_j + \beta_4 \log RER + \varepsilon_{ij} \quad (2)$$

$Dist_{ij}$ dimana T_{ij} adalah tingkat ekspor komoditas dari wilayah i ke j ,

Y_i adalah jarak antara wilayah i dan j ,

M_j adalah PDB wilayah eksportir

RER mewakili impor negara partner perdagangan adalah nilai tukar riil

5.3.3 Hasil Estimasi

Hasil estimasi dengan menggunakan metode *random effect* menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas ekspor utama Indonesia mempunyai elastisitas negatif terhadap jarak tujuan ekspor (Tabel 5.3). Besarnya koefisien jarak dipengaruhi oleh karakteristik dari komoditas yang diperdagangkan tersebut serta kondisi dari negara *partner* dagang dari propinsi-propinsi tersebut. Komoditas yang berbobot berat dan relatif sulit dipindahkan mempunyai elastisitas yang tinggi terhadap jarak, seperti: batubara, CPO (dengan elastisitas di atas 1) dan bijih metal antara lain seperti bijih tembaga, bijih nikel, timah (dengan elastisitas mendekati 1). Sebaliknya komoditas yang cenderung mudah dipindahkan seperti mesin-mesin listrik, peralatan telekomunikasi, dan kopi-teh-coklat cenderung memiliki koefisien elastisitas yang kecil terhadap jarak.

Di sisi lain, rendahnya elastisitas ekspor beberapa komoditas utama juga dikarenakan adanya kesamaan jenis produk yang dihasilkan oleh negara-negara yang termasuk dalam sampel sehingga propinsi-propinsi di Indonesia lebih banyak mengekspor ke negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dibandingkan ekspor ke negara-negara sampel.

Selain itu, terdapat beberapa ekspor komoditas produk kayu, kertas, pakaian jadi, furniture, dan karet tidak dipengaruhi oleh jarak, dimana komoditas-komoditas ini terutama di ekspor melalui pelabuhan di pulau Jawa.

Selain dipengaruhi oleh jarak, hasil estimasi model gravitasi ini juga menunjukkan bahwa ekspor dipengaruhi secara positif oleh permintaan riil dari negara *partner* dagang di Asia dengan elastisitas yang lebih tinggi pada ekspor komoditas primer dan bahan baku dibandingkan ekspor

Tabel 5.12 Hasil Estimasi Model Gravitasi

Commodities	Jarak _{ij}	Impor _j	PDRB _i	RER
Fish, Crust., Mollusc	-0.68***	0.80***	0.73***	0.00
Coffee, Tea, Cocoa, Spices	-0.38*	0.56***	0.62***	-0.03*
Crude Rubber	0.21	1.25***	1.39***	-0.04
Wood, Lumber&Cork	-0.03	0.47***	0.140	-0.02
Metalliferous ores & scraps	-0.95*	1.27***	1.47***	-0.07
Coal	-1.96***	0.80***	-0.75*	-0.09
CPO	-1.19***	0.94***	0.140	0.01
Wood&Cork Manufactured	-0.12	0.80**	0.75***	-0.01
Paper, Paperboard	-0.10	0.21**	1.74***	-0.01
Textile yarns, fabrics&prod.	-0.04	0.26***	1.65***	-0.03
Office machinery	0.50	1.25***	0.68***	0.04
Telecommunication app	-0.41***	0.94***	3.00***	0.05
Electrical machinery	-0.28*	0.45***	1.82***	-0.02
Furniture	0.21	0.36***	0.95***	-0.02
Clothing	0.43	0.39***	2.05***	0.01

Catatan : *) 10%, **) 5% dan ***) 1% significance level.

produk industri (kertas, tekstil & *clothing*, dan *furniture*).

Selain jarak dan impor negara *partner*, model gravitasi juga memprediksikan bahwa besarnya ekspor dipengaruhi oleh pendapatan eksportir. Pendapatan propinsi eksportir menunjukkan sisi penawaran dari komoditas ekspor. Di antara 15 komoditas tersebut, hanya ikan, kopi-teh-coklat, dan peralatan kantor yang elastisitas ekspornya terhadap PDRB relatif tinggi (lebih besar dari 1). Pada tabel 5.3 terlihat bahwa semua komoditas utama ekspor dipengaruhi secara positif oleh pendapatan eksportir kecuali kayu dan batu bara. Ekspor batubara memiliki hubungan yang negatif dengan PDRB propinsi diduga antara lain karena pasar domestik dari batubara relatif cukup besar sehingga pertumbuhan PDRB akan meningkatkan permintaan domestik terhadap batubara.

Selain ketiga faktor di atas, apresiasi nilai tukar riil (setelah memperhitungkan perbedaan

inflasi domestik dengan negara partner dagang) diprediksi berpengaruh negatif terhadap ekspor komoditas unggulan. Hasil estimasi menunjukkan nilai tukar riil tidak signifikan pengaruhnya terhadap ekspor ke kawasan Asia, kecuali ekspor komoditas kopi-teh-coklat.

5.3.4 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat perdagangan komoditas utama ekspor propinsi mempunyai hubungan negatif dengan jarak lokasi antara propinsi di Indonesia dengan negara partner dagangnya, dan memiliki hubungan positif dengan tingkat pertumbuhan daerah dan tingkat permintaan riil negara partner dagang. Namun demikian, nilai tukar kurang berpengaruh terhadap sebagian besar ekspor komoditas unggulan. Sehubungan dengan hal tersebut dapat direkomendasikan hal-hal berikut:

- Perlu dikembangkan komoditas manufaktur (industri hilir) yang dapat menjadi produk ekspor unggulan dengan menggunakan bahan baku komoditas berbasis sumber daya alam yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia sehingga dapat mengurangi dampak elastisitas negatif dari jarak terhadap ekspor.
- Komoditas ekspor yang berupa barang manufaktur dapat dikembangkan di semua daerah karena faktor jarak terhadap pasar negara tujuan ekspor Asia kurang berpengaruh terhadap ekspor barang manufaktur.

5.4 Formasi Sumber Daya Manusia, Ketimpangan Pendapatan dan Integrasi Ekonomi: Kajian Meta-Analisis

Dipersiapkan oleh Haris Munandar, Oki Hermansyah dan Myrnawati Savitri (Biro Riset Ekonomi – Bank Indonesia)

5.4.1 Latar Belakang dan Motivasi

Mobilitas sosial dan ketimpangan pendapatan yang persisten merupakan dua hal yang penting baik dalam perspektif teoretis maupun dalam tataran pembuatan kebijakan. Pertanyaan mengenai bagaimana suatu keluarga dapat menanjak status ekonominya dan apa yang menentukan tingkat pendapatan keluarga tersebut merupakan hal yang menarik dan penting. Penelitian *mengenai apa yang menjadi pembentuk kondisi ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang dan mengapa ketimpangan pendapatan berbeda pada tiap negara* merupakan topik kajian yang menarik. Penjelasan dari berbagai penelitian sebelumnya adalah bahwa fenomena ketimpangan pendapatan disebabkan oleh perbedaan kemajuan teknologi antarnegara serta merupakan dampak globalisasi perdagangan dunia dan pasar finansial yang tidak simetris. Namun kebijakan konvensional serta intuisi mengatakan bahwa penjelasan kedua masalah tersebut juga harus melibatkan pendidikan sebagai faktor utama.

Berbagai organisasi internasional telah berhasil menyusun daftar indikator sehingga kita mampu membandingkan pencapaian tingkat kelulusan sekolah di sejumlah negara. Karakteristik utama dari indikator-indikator tersebut adalah bahwa pendidikan formal, bimbingan orang tua, dan metode akuisisi pengetahuan lainnya memiliki posisi yang berbeda di berbagai belahan dunia. Tingkat dan efisiensi pendidikan umum, kontribusi orang tua, dan utilisasi teknologi terbaru berbeda-beda di berbagai perekonomian dimana variasinya

dapat sangat besar. Jika kita sepakat bahwa proses yang menjelaskan pembentukan sumber daya manusia (*human capital*) mempengaruhi *output* perekonomian dan distribusi pendapatan, maka kita perlu untuk memformalkan proses tersebut untuk mencari tahu bagaimana signifikansi faktor tersebut.

5.4.2 Pendidikan, Keterbukaan dan Ketimpangan Pendapatan

Tulisan ini merupakan kajian meta-analisis dari topik di atas. Kajian meta analisis merupakan studi penggabungan berbagai tesis yang diperoleh dari berbagai riset yang berhubungan. Sejumlah literatur memberikan pemahaman yang begitu mendalam mengenai pembentukan ketimpangan pendapatan. Atkinson (1999), Corneo dan Jeanne (2001) menunjukkan bahwa norma-norma sosial merupakan penentu distribusi pendapatan. Beragam studi telah dilakukan untuk menganalisis peran akumulasi *human capital* pada distribusi pendapatan dalam beragam konteks.

Terdapat banyak literatur yang berkaitan dengan komponen-komponen pendidikan dan hubungannya dengan perbedaan distribusi pendapatan. Becker dan Chiswick (1966) menunjukkan bagaimana ketimpangan pendapatan secara positif berkorelasi dengan ketimpangan dalam jenjang sekolah dan secara negatif berkorelasi dengan tingkat pendidikan. Berdasarkan data dari sembilan negara, Chiswick (1971) mengklaim bahwa perbedaan tingkat pendapatan sejalan dengan perbedaan tingkat

pendidikan. Dengan menggunakan sampel negara-negara yang lebih besar, Adelman dan Morris (1973) dan Chenery dan Syrquin (1975) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun kemajuan teknologi terkini ternyata tidak mempengaruhi formasi sumber daya manusia (*human capital formation*) di berbagai negara sesuai pola-pola tadi.

Pengalaman berbagai negara memberikan penjelasan yang saling bertentangan tentang hubungan antara keterbukaan (*openness*) dan ketimpangan pendapatan (*income inequality*). Wood (1998) menyatakan bahwa perdagangan dipersalahkan atas terjadinya ketimpangan pendapatan yang melanda Amerika pada akhir abad ke-20. Namun Feenstra dan Hanson (1999) memperkirakan bahwa sebenarnya hanya 15 sampai 33 persen dari peningkatan ketimpangan tersebut yang merupakan hasil dari kompetisi perdagangan. Sejumlah riset lain mengklaim bahwa ketimpangan pendapatan tidak memiliki kaitan dengan globalisasi dan integrasi ekonomi, tetapi justru akibat faktor lain seperti turunnya pertumbuhan penawaran (*supply*) per tenaga kerja dan adanya perubahan teknologi yang menghentikan permintaan tenaga kerja tidak terlatih (*unskilled*) relatif terhadap tenaga kerja terlatih (Williamson, 2006). Hasil yang tampak kontradiktif ini memberi petunjuk bahwa integrasi ekonomi bisa jadi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Sampai pertengahan tahun 1980, hanya Amerika dan Inggris yang mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan, sedangkan sejak pertengahan 1980-an 20 dari 21 negara OECD mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan secara signifikan (Burniaux *et al.*, 1998). Studi ini

mengungkapkan bahwa pada kebanyakan negara OECD, pendapatan tenaga kerja *full-time* tidak semakin tidak merata. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak negara menderita ketimpangan pendapatan dalam bentuk pengangguran yang lebih tinggi dan pengurangan waktu kerja. Penemuan yang terakhir ini mendorong seseorang untuk memasukkan penawaran tenaga kerja yang bersifat elastis (tidak tetap) dalam setiap model yang mencoba untuk menjelaskan ketimpangan pendapatan.

Meskipun ada keterbatasan literatur pada hubungan antara liberalisasi perekonomian dan ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang, hasil kajian yang dapat dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda di antara negara-negara tersebut. Ketimpangan pendapatan tampak menurun ketika Jepang, Korea, dan Taiwan melakukan liberalisasi pada akhir 1960-an. Akan tetapi ketimpangan upah secara umum melebar ketika enam negara Amerika Latin melakukan liberalisasi setelah akhir 1970-an (Hanson dan Harrison, 1999; Robbins, 1997). Hal ini lagi-lagi mengindikasikan pentingnya menjawab pertanyaan apakah integrasi ekonomi berasosiasi dengan penurunan atau peningkatan ketimpangan pendapatan.

Seperti yang ditekankan oleh Wood (1998), tampaknya masuk akal bahwa konteks historis adalah penting, karena sejumlah hal tidaklah sama saat terjadinya berbagai proses liberalisasi tersebut. Sebagai contoh, melebarnya upah di Amerika Latin, yang tampaknya berlawanan dengan prediksi *Stolper-Samuelson* seperti pada liberalisasi Meksiko pada periode 1985-1990. Kebijakan yang pro-globalisasi ini sayangnya bertepatan dengan kemunculan Cina dan eksportir Asia lainnya ke dalam pasar dunia, sehingga memaksa Meksiko

untuk berhadapan dengan kompetisi baru di semua pasar ekspor. Kompetisi dari negara-negara berupah rendah semacam ini justru tidak terlalu ekstrem ketika tiga negara macan Asia (Jepang, Korea dan Taiwan) membuka dirinya pada akhir 1960-an dibandingkan dengan pada akhir 1970-an ketika Amerika Latin menurunkan tarif dan hambatan perdagangan mereka lainnya.

Meskipun peningkatan ketimpangan pendapatan di Cina, India, dan Rusia tampak mendominasi tren ketimpangan pendapatan secara global pada generasi saat ini, fenomena ini sangat mungkin tidak banyak berhubungan dengan kebijakan integrasi ekonomi (Williamson, 2006). Kebanyakan dari situasi melebarnya ketimpangan selama fase liberalisasi negara-negara tersebut terkait dengan fakta bahwa proses pembukaan perekonomian mereka tidak lengkap serta selektif. Peningkatan ketimpangan tampaknya tidak mengikutsertakan bagian terbesar dari populasi untuk menikmati keuntungan globalisasi. Sebagai contoh, hasil liberalisasi di Cina tampaknya hanya dinikmati oleh mereka yang tinggal di sepanjang area pantai dari Cina. Contoh lainnya adalah Meksiko. Setelah liberalisasi yang terkait GATT pada 1986 dan liberalisasi yang terkait NAFTA pada 1994, Meksiko justru mengalami peningkatan ketimpangan, bukannya penurunan ketimpangan seperti yang diramalkan para pakar. Hanson (2002) mengungkapkan bahwa ini disebabkan oleh stimulus regional yang tidak rata dan pembangunan mendadak di sepanjang perbatasan dengan Amerika Serikat. Robertson (2001) menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan upah akan mulai hilang setelah tiga sampai lima tahun.

Memang tampak jelas bahwa pengaruh integrasi ekonomi pada ketimpangan pendapatan sering diperdebatkan.

5.4.3 Model Ekonomi *Overlapping Generation*, Heterogenitas dan Integrasi Ekonomi

Berikut akan dibahas suatu model ekonomi *overlapping generation* yang terdiri dari agen-agen heterogen yang menghasilkan barang tunggal dengan menggunakan dua tipe faktor produksi: kapital fisik (*physical capital*) dan kapital manusia (*human capital*).¹ *Human capital* diwakili oleh interaksi antara jumlah tenaga kerja dan keahlian. Setiap individu hidup dalam tiga periode, dimana selama masa 'kanak-kanak' (tidak ada keputusan ekonomi yang diambil) pendidikan diperoleh. Transfer antargenerasi dalam perekonomian terjadi melalui dua saluran: (1) pendidikan publik yang dibiayai pajak pendapatan dari tenaga kerja dan (2) investasi yang dilakukan oleh orang tua dalam membimbing anak-anaknya di rumah. Setiap anak juga diberkati dengan kemampuan bawaan tertentu sejak lahir. Masa kedua adalah masa 'bekerja' sedang masa ketiga adalah masa 'pensiun.'

Pemerintah memiliki dua peran dalam perekonomian: pertama menyediakan dana pendidikan publik melalui penarikan pajak dari upah, dan kedua mengadakan pendidikan publik itu sendiri sambil juga menentukan kualitasnya. Pendidikan publik terdiri dari pendidikan formal di sekolah serta segala pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan (seperti perpustakaan umum dan media).

Pendidikan di rumah disediakan oleh keluarga terdekat dan diselenggarakan oleh orang tua, interaksi sosial, dan teknologi pembelajaran yang terdapat di rumah (seperti buku dan internet). Dalam kasus ini, tingkat *human capital* orang tua dan waktu yang mereka sediakan untuk mengajar anak-anaknya merupakan faktor yang esensial.

1 Lihat Munandar (2008).

Banyak model ekonomi yang membentuk mekanisme yang serupa untuk menjelaskan pembentukan *human capital*. Proses semacam itu umumnya terfokus pada sedikit parameter untuk menjamin kemudahan penelusuran (*tractability*). Dalam model yang dibahas saat ini, proses pembentukan *human capital* menunjukkan beberapa sifat penting. Pertama, individu dari keluarga yang memiliki *human capital* di atas rata-rata memiliki *return on investment* yang lebih rendah dalam pendidikan publik ketimbang yang diperoleh oleh mereka yang berasal dari keluarga dengan *human capital* di bawah rata-rata. Demikian pula biaya pencapaian suatu tingkat *human capital* tertentu untuk generasi yang lebih muda lebih kecil untuk keluarga yang memiliki tingkat *human capital* yang relatif lebih tinggi. Model lainnya yang memiliki sifat-sifat tersebut misalnya Tamura (1991) dan Fischer dan Serra (1996). Kedua, model ini menunjukkan pentingnya *human capital* orang tua dalam membentuk *human capital* keturunan mereka. Burnhill *et al.* (1990) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap kemampuan anak-anak mereka memperoleh pendidikan tinggi. Barro dan Lee (2001) serta Brunello dan Checchi (2005) menemukan bahwa karakteristik keluarga, termasuk pendidikan orang tua, meningkatkan prestasi anak. Alasannya adalah bahwa tingkat pendidikan orang tua mempengaruhi kualitas pendidikan anak di rumah.

Ketika analisis efek integrasi ekonomi, dilibatkan dua perekonomian dimana satu mengeksport kapital sedangkan lainnya mengimpor kapital. Kondisi ini akan mengarah pada penyamaan *return on capital* pascaintegrasi. Ada beberapa literatur yang membahas perbedaan *return on capital*

antarnegara, misalnya Lucas (1990) serta Leidiernan dan Razin (1994).

Dengan menggunakan model *overlapping generation* di atas, faktor penjas ketimpangan pendapatan yang umum seperti mobilitas *physical capital* dan kemajuan teknologi dalam produksi ternyata tidak memainkan peran apapun dalam menentukan distribusi pendapatan dalam jangka panjang. Kondisi awal pada stok *human capital* ternyata merupakan faktor yang relevan, dalam arti bahwa sebuah negara yang dimulai dari tingkat *human capital* yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar dalam menghilangkan ketimpangan pendapatan seiring berjalannya waktu. Namun mobilitas *physical capital* yang dihasilkan dari ketimpangan pendapatan tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan setelah terjadinya integrasi ekonomi, meskipun efek pada kesejahteraan bisa saja substansial. Temuan ini mengisolasi proses pembentukan *human capital* sebagai sumber utama perbedaan ketimpangan pendapatan. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil dalam Viaene dan Zilcha (2002) yang mengatakan bahwa setelah integrasi pasar modal, ketimpangan dalam distribusi pendapatan antargenerasi berubah setiap saat. Perbedaan ini ada karena mereka mengasumsikan keberadaan transfer *physical capital* antargenerasi (warisan). Namun bukti empiris memperlihatkan bahwa di antara berbagai keluarga, warisan bukanlah sesuatu yang umum (Laitner, 1997).

5.4.4 Peran *Human Capital* dalam Kondisi Ekuilibrium

Konsekuensi dari berbagai proses pembentukan *human capital* pada ketimpangan pendapatan dalam suatu perekonomian *overlapping generation* dengan agen-agen yang

heterogen telah diamati. Heterogenitas dalam model berasal dari distribusi awal *human capital* antarindividu dan dari kemampuan bawaan individu sejak lahir. Hasil pengembangan model tersebut memberikan pandangan mengenai hubungan antara ketimpangan pendapatan dan berbagai sifat dari proses pembentukan *human capital* yang meliputi: a) lingkungan internasional, seperti mobilitas *physical capital*, b) kondisi awal stok *human capital*, c) tingkat dan eksternalitas pendidikan publik, d) efisiensi yang berasal dari teknologi pendidikan. Model tersebut juga menunjukkan bahwa sifat ketimpangan

pendapatan antargenerasi yang tidak berubah. Sifat ini menyatakan bahwa meskipun tingkat upah disamakan setelah integrasi ekonomi, ketimpangan tetap tidak berubah karena semua pendapatan individu terpengaruh dengan proporsi yang sama. Namun demikian, antarnegara, distribusi pendapatan antargenerasi setelah terbukanya perekonomian menjadi lebih setara. Namun demikian terjadinya jebakan kemiskinan maupun pertumbuhan positif *human capital* dapat terjadi, dan keduanya tergantung pada tingkat *human capital* awal dalam perekonomian.

Daftar Pustaka

- Adelman, M., dan U. Morris, 1973, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, Stanford: Stanford University Press.
- Aguilar, C., 2006, *Trade Analysis of Specific Agri-food Commodities Using a Gravity Model*, Department of Agricultural Economics.
- Anderson, J., 1979, a Theoretical Foundation for the Gravity Equation, *American Economic Review* 69, 106-116.
- ASEAN Secretariat, 2007, www.aseansec.org.
- Atkinson, A.B., 1999, Is Rising Income Inequality Evitable? A Critique of the Transatlantic Consensus, UNU/WIDER
- Bank Indonesia, 2006, *Outlook Ekonomi Indonesia 2006-2010*, edisi Juli 2006, Bank Indonesia.
- _____, 2007, *Outlook Ekonomi Indonesia 2007-2011*, edisi Januari 2007, Bank Indonesia.
- _____, 2007, *Outlook Ekonomi Indonesia 2007-2011 "Inflasi, Kemiskinan dan Penawaran Agregat di Perekonomian Indonesia"*, edisi Juli 2007, Bank Indonesia.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2007, www.bkpm.go.id.
- Badan Pusat Statistik, 2008.
- Bank of England, 2007, *Inflation Report November 2007*, www.bankofengland.co.uk/publications/inflationreport
- Baldwin, R., dan C. Wyplosz, 2004, *the Economics of European Integration*, McGraw Hill.
- Barro, R. J., 1996, *Inflation and Growth*, Federal Reserve Bank of St. Louis Review 78 (May/June 1996).
- Becker, G.S., dan B.R. Chiswick, 1966, Education and the Distribution of Earnings, *American Economic Review*, 86, 218-223.
- Ben-David, D., Ayal K., 2000, Trade and the Rate of Income Convergence, *Center for Economic Policy Research Discussion Paper* 2390.
- Bowen, H.P., E.E. Leamer dan L. Sveikauskas, 1987, Multicountry, Multifactor Tests of the Factor Abundance Theory. *American Economic Review*, (December) 77, 791-809.
- Bowen, H.P., H. Munandar, dan J.-M. Viaene, 2005, *The Limiting Distribution of Production in Integrated Economies: Evidence from U.S. States and E.U. Countries*, Tinbergen Institute Discussion Paper 05-045/2.
- Chenery, H.B., dan M. Syrquin, 1975, *Patterns of Development, 1950-1970*, London: Oxford University Press.
- Chiswick, B.R., 1971, Earnings Inequality and Economic Development, *Quarterly Journal of Economics*, 85, 21-39.
- Choesni, Tb.A., 2007, bahan tayangan *Focus Group Discussion Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012*,

- Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Corneo, G., dan O. Jeanne, 2001, Status, the Distribution of Wealth, and Growth, *Scandinavian Journal of Economics*, 103, 283-293.
- de Dios, L.C., 2006, An Investigation into the Measures Affecting the Integration of ASEAN's Priority Sectors (Phase 2): Overview: Non-Tariff Barriers to Trade in the ASEAN Priority Goods Sectors, REPSF Project No.06/001a.
- Deardorff, V. A., 1995, Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity Work in a Neoclassic World?, *NBER Working Paper* No. 5377.
- Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No.1/2008.
- Devereux, M.B., dan B.J. Lapham, 1994, The Stability of Economic Integration and Endogenous Growth, *Quarterly Journal of Economics* 109, 299-308.
- DeRosa, D.A., 1995, International Trade, Regional Integration, and Food Security in the Middle East, *Trade and Macroeconomic Division, International Food Policy Research Institute Discussion Paper* 40.
- Economist Intelligence Unit, 2007, World Investment Prospects to 2011, Dominican Republic Export and Investment Center (CEI-RD).
- Egger, P., 2000, A Note on the Proper Econometric Specification of the Gravity Equation, *Economic Letter* 66, 25-31.
- Endoh, M., 1999, Trade Creation and Trade Diversion in the EEC, the LAFTA and the CMEA: 1960-1994, *Applied Economics* 31, 207-216.
- _____, 2000, the Transition of Post-war Asia-Pacific Trade Relations, *Journal of Asian Economics*, 10, 4, 571-89.
- Energy International Agency, 2007, International Energy Outlook, November 2007.
- _____, 2007, Short-Term Energy Outlook.
- Evans, C.L., 2000, the Economic Significance of National Border Effects, Mimeo, Federal Research Bank of New York.
- Fajnzylber, P.R., dan A.M. Fernandes, 2004, International Economic Activities and the Demand for Skilled Labor: Evidence from Brazil and China, *Social Science Research Network*.
- Frankel, J.A., 1993, Is Japan Creating a yen block in East Asia and the Pacific?, In Jeffrey A. Frankel and Miles Kahler (eds.), *Regionalism and Rivalry: Japan and the United States in Pacific Asia*, University of Chicago Press, 53-85.
- _____, 1997, Regional Trading Blocs in the World Economic System, *Institute for International Economics*, Washington, DC.
- Grossman, G.M., dan E. Helpman, 1991, *Innovation and Growth in the Global Economy*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Hamilton, C., dan A. Winters, 1992, Opening Up International Trade with Eastern Europe, *Economic Policy*, 77-104.

- Hartono, D., Priyarsono, D.S., Nguyen, T. D., Ezaki, M., 2007, Regional Economic Integration and its Impacts on Growth, Poverty and Income Distribution: The Case of Indonesia, Working paper in Economics and Development Studies No. 200702, Department of Economics Padjajaran University.
- Helpman, E., dan P. Krugman, 1985, Market Structure and Foreign Trade. *Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Imada, P., M.F. Montes, dan S. Naya, 1991, A Free Trade Area: Implications for ASEAN, *ASEAN Economic Research Unit, Institute Southeast Asian Studies (ISEAS)*, Singapore.
- International Country Risk Guide, berbagai tahun, Published Monthly by The PRS Group Inc., NY, USA.
- International for Management Development, berbagai edisi, The World Competitiveness Scoreboard.
- International Labour Organization, 2007, Labour and Social Trends in ASEAN 2007: Integration, Challenges, and Opportunities.
- International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics, www.imfstatistics.org.
- _____, IMF Survey Magazine, IMF Research, www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/home.aspx.
- _____, 2007, World Economic Outlook, Globalization and Inequality, October 2007.
- International Telecommunication Union, 2007, www.itu.int.
- Jallilian, H. dan J. Weiss, 2001, Foreign Direct Investment and Poverty in the ASEAN Region, *Final Report of the First Sub-Project*, University of Bradford.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2008, Keputusan Menteri Keuangan No.1/2008.
- Klein, M., C. Aaron, dan B. Hadjmichael, 2001, Foreign Direct Investment and Poverty Reduction, *New Horizons and Policy Challenges for Foreign Direct Investment in the 21st Century*, Mexico City, 26-27.
- Laitner, J., 1997, Intergenerational and Interhousehold Economic Links, in: M.R. Rosenzweig dan O. Stark (eds.), *Handbook of Population and Family Economics*, Amsterdam: North Holland
- Leamer, E. E., 1984, *Sources of International Comparative Advantage: Theory and Evidence*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Leiderman, L., dan A. Razin, 1994, Capital Mobility: The Impact on Consumption, Investment and Growth, Cambridge University Press, Cambridge.
- Melitz, J., 2007, North, South and Distance in the Gravity Model, *European Economic Review* 51, 971-991.
- Mirza, H., 2002, Regionalisation, FDI, and Poverty Reduction: Lessons from other ASEAN Countries, *University of Bradford School of Management*.
- Munandar, H., 2006, *Essays on Economic Integration*, Ph.D. Dissertation, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.
- Negara, S. D., 2007, *Integrasi Ekonomi ASEAN dan Mobilitas Tenaga Terampil*, bahan tayangan Focus Group Discussion Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012, Pusat Peneliti Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

- Okubo, T., 2000, *the Border Effect in the Japanese Market: A Gravity Model Analysis*.
- O'Connor, J., dan D. Orsmond, The Recent Rise in Commodity Prices: A Long Run Perspective, Economic Analysis Department.
- Pöyhönen, P., 1963, A Tentative Model for the Volume of Trade Between Countries, *Weltwirtschaftliches Archiv* 90, 93-100.
- Rivera-Batiz, L., dan P. Romer, 1991, Economic Integration and Endogenous Growth, *Quarterly Journal of Economics* 106, 531-555.
- Sohn, C.-H., dan J. Yoon, 2001, Does the Gravity Model Fit Korea's Trade Patterns? Implications for Korea's FTA Policy and North-South Korean Trade.
- Sharma, S.C., dan S.Y. Chua, 2000, *ASEAN: Economic Integration and Intra-Regional Trade*, *Applied Economics Letters* 7, 165-169.
- Tan, H.W., 2000, Technological Change and Skills Demand: Panel Evidence from Malaysian Manufacturing. Working Paper the World Bank Institute.
- _____, 2004, Skills, Training Policies and Economic Performance: International Perspectives, Paper presented at MENA Training Impact Evaluation Workshop Casablanca, Morocco, January 20-22, The World Bank Institute.
- Tinbergen, J., 1962, *Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy*, the Twentieth Century Fund, New York.
- United Nations, Statistics Division, Commodity Trade Statistics Database, www.comtrade.un.org/db/.
- _____, 2007, Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, World Investment Report, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
- _____, 2007, World Investment Prospect Survey 2007-2009, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
- _____, 2007, Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World, Human Development Report, United Nation Development Programme (UNDP).
- _____, 2008, Doing Business Survey, www.doingbusiness.org.
- Viaene, J.-M., dan I. Zilcha, 2003, Human Capital Formation and Cross-Country Comparison of Inequality, Mimeo, Erasmus University Rotterdam.
- World Economic Forum, 2006, Global Competitiveness Report, Geneva, Switzerland.
- _____, 2007, Global Competitiveness Report, Geneva, Switzerland.